



INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dr. Muhammad Ramadhan

Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dr. Muhammad Ramadhan

INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Edisi Pertama

Copyright @ 2022

ISBN 978-623-377-419-2

15 x 23 cm

216 h.

cetakan ke-1, Maret 2022

Penulis

Dr. Muhammad Ramadhan

Editor

Dr. Adi Bandonono, M.Pd

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR



Dr. Muhammad Ramadhan

A *lhamdullahirabbil'alamin*, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat, Hidayah dan karuniaNYA, yang telah memberikan kesabaran, kekuatan fisik dan ketenangan pikiran sehingga tahap demi tahap proses penulisan buku ini dapat dilewati dengan baik. Untuk mampu mencapai tahapan demi tahapan tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah, mengingat dengan segala keterbatasan dan berkat bimbingan serta arahan dan dorongan dari banyak kolega, maka pada akhirnya penulisan buku yang berjudul *“Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan”* dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari, bahwa segalanya tak ada yang sempurna, begitu pula dengan halnya buku ini, masih banyak kekurangan dan masih memerlukan penyempurnaan. Namun demikian inilah hasil kerja keras yang melibatkan dukungan dan bantuan serta do'a dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah banyak membantu, seperti Prof. Dr. H. Ujianto, MS., Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., Prof. Dr. Amiartuti Kusmanintyas, SH., MM, Dr. Slamet Riyadi, Ak., CA dan Dr. Mulgianto, Msi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan untuk para Guru semasa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Samarinda hingga menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Ekonomi Negeri 1 Samarinda. Para dosen mulai jenjang S1, S2 dan S3, yang telah mendidik, mengajarkan berbagai teori, pengalaman empiris dengan tulus dan ikhlas. Semoga apa yang telah mereka berikan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, Drs. Haris Makkie, Msi., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Tidak terlupakan pula untuk Ayanda H. M. Thambirin H. Atin dan Alm. Ibunda Norjannah yang dengan tulus ikhlas mengasuh dengan penuh kasih dan sayang, mendidik dan membesarkan penulis sejak dari kandungan hingga dewasa, serta selalu mendoakan agar penulis kelak menjadi orang yang berbakti pada orang tua, agama, dan negara. Saudara-saudari kandung yang berada di Samarinda dan Tidak lupa peranan istriku Darmayanti, SE dan Anaknda M. Haykal Akbar, yang turut mendukung secara moral maupun material yang dengan tulus dan ikhlas berbagi “ jatah biaya hidup “ untuk membiayai studi S3 penulis, serta biaya studi anakku. Semoga segala pengorbanan kalian memberikan manfaat bagi keluarga kita dimasa mendatang, dan Allah SWT akan mengangkat derajat, serta melindungi kita semua dari segala kemungkar dan kezaliman. Amin ya rabbal ‘alamin.

Akhirnya sekali lagi penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik yang sudah disebutkan namanya, maupun yang tidak, yang telah membantu penulis sejak awal penulisan sampai selesainya penulisan buku ini. Semoga segala amal baik mereka mendapatkan ganjaran pahala, rahmat dan hidayah yang berlimpah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Menyadari akan keterbatasan buku ini, maka penulis mengharapkan sumbang saran, masukan yang berharga untuk penyempurnaan buku ini. Setidak-tidaknya buku ini dapat berguna untuk meningkatkan wawasan dan juga perluasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Ekonomi serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya serta Indonesia pada umumnya.

Semoga penulisan buku yang berbasis hasil penelitian ini senantiasa memperoleh berkah dari Allah SWT. Paling tidak banyak yang menjadikan buku ini sebagai referensi yang bermanfaat dan berguna dalam meningkatkan wawasan, khususnya terkait dengan bidang perekonomian. Amin-amin ya rabbal alamin.

Samarinda, Maret 2022

Muhammad Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian.....	20
BAB 2 PERSPEKTIF AKADEMIS.....	22
2.1. Landasan Teori	22
2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan	45
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	48
3.1. Kerangka Konseptual	48
3.2. Hipotesis.....	54
BAB 4 METODE PENELITIAN	58
4.1. Jenis dan Rancangan Penelitian.....	58
4.2. Populasi, Sampel dan Teknis Pengambilan Sampel.....	58
4.3. Variabel Penelitian	59
4.4. Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	63
4.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64
BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN	72
5.1. Deskripsi Daerah Penelitian	72
5.2. Kondisi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	81
5.3. Deskripsi Variabel Penelitian.....	123

5.4. Hasil Analisis Data PLS (Partial Least Square)	138
5.5. Hasil Pengujian Hipotesis	147
5.6. Pengujian Pengaruh Moderasi.....	149
BAB 6 PEMBAHASAN	156
6.1. Pembahasan Hasil Deskripsi Variabel.....	156
6.2. Pembahasan Pengaruh Antar Variabel	160
6.3. Temuan Penelitian	170
6.4. Keterbatasan Studi	183
BAB 7 PENUTUP	186
7.1. Kesimpulan.....	186
7.2. Saran.....	187
DAFTAR PUSTAKA	189
INDEKS	201
RIWAYAT HIDUP PENULIS	202

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2011-2015.....	5
Tabel 1.2	Kontribusi Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2011-2015.....	6
Tabel 1.3	Perbandingan PAD Dengan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015	7
Tabel 1.4	Investasi Pemerintah dari Belanja Investasi Kab/Kota Provinsi di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Dalam Jutaan).....	8
Tabel 1.5	Realisasi Investasi Swasta di Kalimantan Selatan Periode 2011 – 2015 (Dalam Jutaan).....	9
Tabel 1.6	Investasi Swasta Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.....	10
Tabel 1.7	Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 S/D 2015	11
Tabel 1.8	Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 – 2015.....	13
Tabel 1.9	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2015 (orang).....	14
Tabel 1.10	Disparitas Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015	16
Tabel 1.11	Klasifikasi Variabel	60
Tabel 5.1	Perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2007 – 2015	75
Tabel 5.2	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Dalam Jiwa) Periode Tahun 1980 – 2015	76
Tabel 5.3	Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 1980 – 2015	77
Tabel 5.4	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Kalimantan Selatan, Periode Tahun 2011-2015 (Dalam Jiwa).....	79
Tabel 5.5	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Prov. Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	80
Tabel 5.6	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah	

	Laut Provinsi Kalimantan Selatan menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	83
Tabel 5.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	84
Tabel 5.8	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011-2015 (Dalam %)	86
Tabel 5.9	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Th. 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	87
Tabel 5.10	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotabaru Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011-2015	89
Tabel 5.11	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	91
Tabel 5.12	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	93
Tabel 5.13	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010	94
Tabel 5.14	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapi Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015	96
Tabel 5.15	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2007 - 2015 (Dalam %)	97
Tabel 5.16	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	99
Tabel 5.17	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hss Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2011 -2015 (Dalam %)	100
Tabel 5.18	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Menurut	

	Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	102
Tabel 5.19	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	103
Tabel 5.20	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	104
Tabel 5.21	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Th 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	105
Tabel 5.22	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hsu Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	108
Tabel 5.23	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Tabalong Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011-2015	110
Tabel 5.24	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	111
Tabel 5.25	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banjarbaru Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015	113
Tabel 5.26	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Th 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	115
Tabel 5.27	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Th 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	117
Tabel 5.28	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	119
Tabel 5.29	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Th 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)	121
Tabel 5.30	Perkembangan Ekonomi Sektoral Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Th 2010 Periode Tahun 2011 - 2015	122
Tabel 5.31	Investasi Pemerintah Kabupaten/Kota Diprovinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015	

	(Jutaan/Rupiah)	124
Tabel 5.32	Investasi Swasta Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Jutaan/Rupiah)	126
Tabel 5.33	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Rupiah)	129
Tabel 5.34	Penyerapan TenagaKerja Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.....	132
Tabel 5.35	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Dalam Persen)	135
Tabel 5.36	Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Dalam Persen)	137
Tabel 5.37	Nilai Outer Loading Setiap Indikator.....	139
Tabel 5.38	Nilai Ave Pada Evaluasi Outer Model.....	141
Tabel 5.39	Nilai Cross Loading Pada Evaluasi Outer Model.....	141
Tabel 5.40	Pengujian Discriminant Validity Dengan Akar Ave	142
Tabel 5.41	Hasil Composite Reliability.....	143
Tabel 5.42	Nilai R-Square	144
Tabel 5.43	Evaluasi Goodness Of Fit	145
Tabel 5.44	Nilai Koefisien PLS Pengaruh Antar Variabel	146
Tabel 5.45	Pengujian Hipotesis Dengan Inner Weight.....	147
Tabel 5.46	Pengujian Hipotesis Pengaruh Moderasi.....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	(Hypothetical Kuznets curve)	43
Gambar 3.2	Kerangka Konseptual.....	52
Gambar 4.1	Rancangan Model Penelitian	66
Gambar 5.1	Trend Investasi Pemerintah Tahun 2011-2015	125
Gambar 5.2	Trend Investasi Swasta Tahun 2011-2015.....	127
Gambar 5.3	Trend Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015.....	130
Gambar 5.4	Trend Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2011-2015	133
Gambar 5.5	Trend Tingkat Kemiskinan Tahun 2011-2015.....	136
Gambar 5.6	Trend Disparitas Pendapatan Tahun 2011-2015	138
Gambar 5.8	Visualisasi Pengaruh Moderasi $Y1*Z$ Terhadap $Y3$	151
Gambar 5.9	Visualisasi Pengaruh Moderasi $Y2*Z$ Terhadap $Y3$	153

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pembangunan mengalami redefinisi, yang pada era sebelum 1970 an pembangunan semata-mata hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi saja yang sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan *Gross National Income* (GNT) yang diyakini dapat menetes ke bawah (*trickle down effect*) dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya. Setelah era 1970 definisi pembangunan ekonomi mengalami redefinisi penghapusan atau pengurangan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja yang berdasarkan redistribusi hasil pembangunan yang lebih merata (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Profesor Dudley Seer dalam Todaro dan Smith (2006) jika tidak ada perbaikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan penduduk, tingkat pengangguran dan tidak adanya perubahan penanggulangan masalah ketimpangan pendapatan maka negara tersebut dapat dikatakan belum mengalami proses pembangunan positif walaupun pendapatan perkapitanya mengalami peningkatan positif hingga dua kali lipat. Pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang bertujuan antara lain untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang membangun termasuk Indonesia adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ketidakmampuan mekanisme pasar dalam teori ekonomi klasik dalam menjawab persoalan ekonomi merupakan titik awal perkembangan pemikiran Keynes.

Masalah utama perekonomian adalah pengangguran yang besar menjadi alasan kuat perlunya campur tangan pemerintah (kebijakan) yang merupakan karakter dari pemikiran Keynes. Perubahan pemikiran dari aliran klasik yang mengedepankan mekanisme pasar yang dimotori oleh

Adam Smith (1776) mulai kehilangan perannya dan berganti dengan pemikiran baru yang dimotori oleh John Maynard Keynes sebagaimana tertuang dalam bukunya "*The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) yang banyak direspon oleh masyarakat saat itu termasuk Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon sehingga mewarnai kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Ajaran Keynes menekankan pentingnya perhatian permintaan agregat masyarakat dan kebijakan yang lebih aktif dari pemerintah. Keynes menolak gagasan klasik yang menyatakan bahwa sistem kapitalis akan menyesuaikan sendiri dalam jangka panjang, kapitalisme tidak stabil yang menyebabkan ekonomi yang *stagnan* secara terus menerus pada tingkat ekuilibrium pengangguran, tergantung pada level ketidakpastian dalam sistem finansial yang rapuh (Skousen, 2009). Keynes menawarkan adanya jalan tengah antara perencanaan terpusat dengan mekanisme pasar. Perencanaan pembangunan diperlukan karena adanya kegagalan mekanisme pasar, ketidakpastiannya yang akan datang dan memberikan arah pembangunan yang jelas (Kuncoro, 2012).

Pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan fungsi investasi dan memungkinkan suatu masyarakat terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja (Sukimo, 2000). Model pertumbuhan WW. Rostow (1960) menekankan bahwa negara hanya dapat mencapai tahapan tinggal landas menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan yang digerakkan pembaharuan-pembaharuan (*innovations*) dan peningkatan penanaman modal (investasi) sehingga tingkat pertambahan pendapatan nasional lebih tinggi daripada tingkat pertambahan penduduk (Sukimo, 1985). Pada perekonomian yang mengakui mekanisme transmisi tingkat bunga, besaran suku bunga harus terpantau oleh pemerintah sehingga sesuai dengan daya jangkau sektor riil.

Pangkal masalah pengangguran dapat terpecahkan dengan mengadakan investasi penyerapan tenaga kerja karena adanya hubungan positif antara investasi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi pen lorong konsumsi menjadi normal (Sagir, 2009). Salah satu alat kebijakan ekonomi adalah *easy money policy* (kebijakan uang longgar) yang diharapkan dapat menciptakan kemudahan dalam memperoleh kredit perbankan untuk investasi. Terjadinya peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan barang - barang investasi dan barang-barang

konsumsi sehingga dapat meningkatkan kecenderungan kenaikan harga-harga umum (inflasi).

Inflasi dapat ditekan melalui kebijakan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) yang ditandai dengan meningkatnya suku bunga perbankan yang cukup tinggi dan berakibat lemahnya pertumbuhan ekonomi, juga lemahnya laju penciptaan lapangan kerja. Ricardo dalam Adisasmita (2013) menjelaskan pemupukan modal bergantung pada kemampuan dan kemauan menabung. Modal dapat dinaikkan dengan cara menaikkan produksi dan mengurangi konsumsi. Pendapat ini merupakan mekanisme pembentukan modal swasta yang merupakan sumber investasi swasta sedangkan sumber pemupukan modal yang ada ditangan pemerintah sebagai sumber investasi pemerintah berasal dari pajak. Pengenaan pajak bagi para kapitalis, pemilik tanah dan buruh merupakan upaya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan melalui investasi pemerintah.

Tidak diragukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang memang sangat penting bagi penghapusan/pengurangan jumlah penduduk miskin. Pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun saat mendekati akhir pembangunan jumlah orang miskin akan berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor lainnya yang mempengaruhi pengurangan jumlah penduduk miskin seperti struktur ekonomi, pola distribusi pendapatan, ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, tingkat investasi, dan keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Tambunan, 2008).

Otonomi daerah sebagai salah satu solusi mendidik daerah menjadi lebih mandiri dalam berekonomi yang pada akhirnya mampu mengembangkan perekonomian daerah dan pada gilirannya dapat mendukung perekonomian nasional. Sejak tahun 1999 pada saat UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah digulirkan, maka sistem pemerintahan daerah di Indonesia juga mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini merupakan sebuah perubahan yang sangat mendasar bagi tatanan pemerintahan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah mendapatkan kepercayaan dan kewenangan yang sangat besar dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pemerintahan. Otonomi daerah memang didesain agar pemerintah daerah lebih leluasa dalam

menjalankan roda pemerintahannya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan di daerah dipandang sebagai bentuk prestasi bagi pemerintahan pusat dalam mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada pemerintahan daerah di bawahnya.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya disempurnakan menjadi UU No. 33 Tahun 2004 yang menjelaskan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam mentransfer dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari dana bagi hasil terdiri pajak dan sumber daya alam. Tujuan otonomi daerah yaitu terjaminnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan terjangkau secara luas serta peningkatan daya saing daerah. Pembangunan daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antar wilayah yang timpang seperti yang terjadi pada masa lalu (Carson, 2002).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi namun tidak banyak mengalami perubahan dalam struktur ekonomi yang dibagi dalam tiga sektor utama PDRB yaitu Sektor Pertanian, Sektor Industri (Pertambangan, Industri Pengolahan, Listrik, Gas & Air dan Konstruksi), dan Sektor Jasa (Perdagangan, Hotel & Restoran, Transportasi & Komunikasi, Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa). Kontribusi yang semakin mengecil adalah sektor pertanian. Pergeseran struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan tergambar pada Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1
Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2011-2015

Tahun	Sektor (%)			Total (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Pertanian	Industri	Jasa		
2011	23,40	39,47	37,07	100	-
2012	22,57	39,87	37,57	100	5,97
2013	22,60	39,90	37,60	100	5,33
2014	22,62	39,92	37,70	100	4,84
2015	22,65	39,93	37,75	100	3,83

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah), 2016

Pendekatan PDRB melalui pendekatan konsumsi, produksi dan pengeluaran pendapatan. Perhitungan PDRB melalui pendekatan produksi tidak terlepas dari peranan tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya. Kontribusi Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

*Tabel 1.2 Kontribusi Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2011-2015*

Tahun	Sektor (%)			Total (%)
	Pertanian	Industri	Jasa	
2011	41,45	22,14	36,41	100
2012	41,43	24,67	33,90	100
2013	41,40	24,70	35,80	100
2014	41,39	24,72	37,20	100
2015	41,37	24,73	38,10	100

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2016 (diolah)

Terjadi pergeseran proporsi penyerapan tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 dimana masih didominasi sektor Pertanian sebesar 41,45%, sektor jasa 36,41% dan sektor Industri 22,14%. Namun pada tahun 2015 walaupun masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu 41,37%, di sektor industri ternyata mampu meningkat cukup tinggi bersama sektor jasa 38,10% dan industri 24,73%. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik itu diharapkan terjadi peningkatan kinerja pencapaian terhadap penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan keadaan angkatan kerja Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin meningkat diperlukan adanya pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja yang optimal.

Pemerintah daerah selain dana perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat juga memiliki pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan sumber PAD agar meningkat kemampuan keuangan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak otonomi daerah tahun 2000 terus mengalami peningkatan, demikian pula dana perimbangan juga mengalami peningkatan sehingga APBD Provinsi Kalimantan Selatan juga meningkat.

Tabel 1.3
Perbandingan PAD Dengan Dana Transfer Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

Tahun	PAD (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Total APBD (Rp)
2011	1.913.087.350.951	1.195.565.014.393	3.108.652.365.344
2012	1.803.998.515.560	1.803.998.515.560	3.108.943.628.560
2013	2.502.279.216.720	1.505.123.319.820	4.007.402.536.540
2014	2.898.704.954.950	1.531.320.000.520	4.430.024.955.470
2015	3.001.297.216.830	1.474.714.660.000	4.476.011.876.830

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Investasi pemerintah tergambar dari besarnya APBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tabel 1.3 dimana Peningkatan PAD dan Dana Transfer memperbesar APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang menonjol sejak 2011 karena PAD mencapai angka Rp1.913.087.350.951,- dan Dana Transfer mencapai Rp 1.195.565.014.393,- sehingga total APBD menjadi sebesar Rp 3.108.652.365.344,- Total APBD Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang cukup besar sejak tahun 2011 sebesar Rp 3.108.652.365.344,- dan APBD tahun 2015 yang besarnya mencapai Rp 4.476.011.876.830,-

Tabel 1.4

Investasi Pemerintah dari Belanja Investasi Kab/Kota Provinsi di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Dalam Jutaan)

Kab/Kota	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Tanah Laut	324.300	349.058	360.085	370.722	390.810
Kotabaru	318.816	339.023	350.620	365.622	375.211
Banjar	152.070	232.702	242.711	251.614	263.710
Banto Kuala	273.034	287.390	295.710	301.213	305.620
Tapin	175.159	245.400	255.200	268.730	280.721
Hulu Sungai Selatan	292.936	313.597	339.329	345.298	355.600
Hulu Sungai Tengah	286.625	307.115	320.831	328.710	335.830
Hulu Sungai Utara	129.257	160.866	175.722	183.980	190.820
Tabalong	327.626	353.169	360.730	365.710	372.650
Tanah Bumbu	249.611	269.339	275.821	280.645	286.730
Balangan	524.808	611.427	620.713	645.820	652.720
Banjarmasin	883.219	966.998	985.820	1.005.100	1.025.210
Banjarbaru	479.178	352.413	360.271	365.820	367.812

Sumber: APBD Kab/Kota se Kalimantan Selatan, 2016 (diolah)

Belanja Investasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011- 2015 yang merupakan investasi langsung pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 1.4., dimana berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa investasi pemerintah kabupaten/kota meningkat secara berkala dalam tiap tahunnya. Namun yang mengalami peningkatan cukup menarik adalah Kabupaten Tanah Bumbu dimana pada tahun 2011 mencapai sebesar Rp 249.611 juta, pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 286.730 juta dan Kabupaten Balangan yang meningkat dari Rp 524.808 juta menjadi Rp 652.720 juta. Peningkatan kedua daerah ini, besarnya melebihi dari kabupaten induknya masing-masing yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Kotabaru.

Peningkatan yang terjadi pada investasi baik investasi pemerintah maupun investasi swasta akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan menurunnya tingkat kemiskinan sehingga dalam studi ini akan menguji, membuktikan dan menganalisis semua itu. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan ekonomi menurut Smith dalam

Sukimo (2006) yang menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan nasional dan perkembangan penduduk akan memperluas pasar dan penciptaan tabungan yang digunakan untuk kebutuhan investasi.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar mencakup sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perikanan laut, serta sektor pertambangan batu bara yang menarik kegiatan investasi baik berasal dari domestik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2002 menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah yang diikuti kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja (Kuncoro, 2009).

Tabel 1.5
Realisasi Investasi Swasta di Kalimantan Selatan
Periode 2011 – 2015 (Dalam Jutaan)

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total Investasi (Rp)
2011	783.114,1	130.194.743	130.977.857,1
2012	862.438,6	407.592.156	408.454.594,6
2013	902.280,2	620.500.200	621.402.480,2
2014	1.010.820,3	743.664.300	744.675.120,3
2015	1.070.240,7	820.764.210	821.834.450,7

Sumber : DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Berdasarkan parameter survei KPPOD maka kondisi iklim investasi Provinsi Kalimantan Selatan relatif cukup kondusif sehingga realisasi investasi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Secara lebih rinci hal di atas dapat dilihat dari Tabel 1.5. Salah satu indikator kinerja investasi yang dapat dilihat disini adalah pencapaian nilai realisasi investasi terhadap perencanaan. Realisasi investasi meningkat pada tahun 2011 sebesar Rp. 130.977.857,1 juta dan pada tahun 2015 realisasi investasi menjadi Rp. 821.834.450,7 juta.

Jika dibandingkan dengan investasi swasta yang masuk pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan

yang dari tahun ke tahun yang berdampak semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Tabel 1.6 menunjukkan terjadi peningkatan investasi swasta tersebut.

Tabel 1.6
Investasi Swasta
Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Kab/Kota	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Tanah Laut	396.009	424.800	458.982
Kotabaru	2.810.823	231.753	5.347.534
Banjar	993.482	545.987	591.376
Barito Kuala	10.000	2.975.983	191.422
Tapin	97.572	309.480	193.825
Hulu Sungai Selatan	170.954	185.071	200.359
Hulu Sungai Tengah	8.263.380	9.603.041	8.896.462
Hulu Sungai Utara	155.735	167.480	180.406
Tabalong	1.506.240	7.456.321	7.456.321
Tanah Bumbu	863.575	537.907	584.555
Balangan	123.851	429.420	142.380
Banjarmasin	869.434	6.167.793	192.464
Banjarbaru	369.273	396.932	435.001

Sumber : BPS dan DPMPTSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Investasi swasta yang cukup besar pada tahun 2013 terdapat pada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Rp 8.896 milyar), Kabupaten Kotabaru (Rp 5.347 milyar) dan Kabupaten Tabalong (Rp 7.456 milyar). Sedangkan kabupaten dengan investasi yang tidak begitu besar pada tahun 2013 Kabupaten Balangan hanya Rp 142.380 juta, Kabupaten Barito Kuala Rp 191.422 juta dan Kota Banjarmasin Rp. 192.404 juta. Kabupaten Balangan, Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin menurun dibandingkan tahun 2013 yang cukup tinggi.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam mengembangkan investasi khususnya dengan fasilitas PMDN dan PMA ini adalah untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif diperlukan karena berarti telah menggerakkan roda perekonomian lebih

cepat. Pergerakan itu membawa peningkatan produksi atau nilai tambah dan produktivitas di berbagai rantai ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu cukup penting kiranya untuk mengukur peranan kegiatan investasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 1.7
Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 S/D 2015

Kabupaten Kota	Tahun				Rata-rata Laju Pertumbuhan 2005-2015 (%)
	2005 (Orang)	2008 (Orang)	2010 (Orang)	2015 (Orang)	
Tanah Laut	254.301	270.091	278.929	325.283	1,72
Kotabaru	261.792	276.574	285.634	320.208	1,90
Banjarnegara	457.242	489.056	507.095	554.443	1,72
Barito Kuala	263.732	272.332	277.882	298.282	1,48
Tapin	147.638	153.066	154.890	181.778	1,52
Hulu Sungai Selatan	200.956	208.571	210.693	227.153	1,28
Hulu Sungai Tengah	233.394	244.192	247.972	260.292	1,29
Hulu Sungai Utara	207.663	216.181	219.970	225.386	1,44
Tabalong	184.373	193.082	197.094	239.593	1,75
Tanah Bumbu	210.717	226.208	236.078	325.115	3,82
Balangan	98.377	102.296	103.058	123.449	1,82
Banjarmasin	574.325	627.245	650.533	675.440	1,46
Banjarbaru	145.590	167.737	175.272	234.371	3,10
Kalimantan Selatan	3.240.100	3.446.631	3.545.100	3.989.793	1,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Berdasarkan Tabel 1.7., jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan menurut sensus tahun 2015 mencapai 3.989.793 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,84%. Penduduk terbesar Kota Banjarmasin

mencapai 675.440 orang dan terkecil Kabupaten Balangan sebesar 123.449 orang dengan pertumbuhan terendah 1,82% dan Kabupaten Tapin yang hanya 181.778 orang dan laju pertumbuhan 1,52%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 3,82% dan Banjarbaru sebesar 3,10%. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dikarenakan daerah pemekaran dan di pesisir pantai dan Kota Banjarbaru karena daerah ini merupakan daerah transit dan pintu gerbang masuknya penduduk dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya perkembangan sektor perumahan juga mempengaruhi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk kota ini.

Perkembangan penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan tahun 2000 s/d 2015 terus menerus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sebesar 198.450 orang jauh sekali menurun dibandingkan pada tahun 2000 sebesar 340.000 orang. Menurunnya tingkat kemiskinan ini merupakan hasil proses pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambaran yang lebih rinci tentang jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 1.8. dimana Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun 2000 sebesar 10 % turun menjadi hanya 4,97 % pada tahun 2015 seiring dengan meningkatnya investasi yang realisasi pada berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada berbagai sektor ekonomi. Investasi pemerintah dan investasi swasta yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan dari tahun 2000 sebesar 340.400 orang menjadi hanya 198.450 orang. Investasi mendorong munculnya berbagai usaha yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan daya beli yang dapat meningkatkan konsumsi dan produksi.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang atau *kelompok* orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan *mengembangkan* kehidupan yang bermartabat Berdasarkan Tabel 1.8. jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang penurunan yang cukup baik, dimana pada tahun 2005 penduduk miskin mencapai 235.700 jiwa (7,32%) dan pada tahun 2010 sudah turun menjadi 181.960 jiwa (5,21%).

Terjadinya penurunan persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 terlihat sebesar 5,06% (189,875 jiwa) dari jumlah penduduk lebih rendah dibanding tahun 2011 sebesar 5,35%. Jadi dalam lima tahun terakhir ini persentase penduduk miskin menunjukkan perkembangan yang menurun. (Bappeda Provinsi Kalsel, 2016).

Tabel 1.8
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 – 2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
2000	340.400	10,00
2001	357.442	11,92
2002	259.800	8,51
2003	258.960	8,16
2004	231.000	7,19
2005	235.700	7,32
2006	278.500	8,32
2007	233.500	7,01
2008	218.900	6,48
2009	175.980	5,12
2010	181.960	5,21
2011	198.611	5,35
2012	189.875	5,06
2013	183.903	4,77
2014	189.435	4,82
2015	198.450	4,97

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Sebaran penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 pada Tabel 1.9 cukup merata dan menurun dibandingkan tahun 2010, hanya yang menonjol cukup besar pada Kota Banjarmasin 31.606 orang dan Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 17.454 orang, dan yang terkecil pada Kabupaten Balangan hanya 8.722 orang dan Kabupaten Tapin 9.393 orang.

Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2010-2015 (orang)

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tanah Laut	15.156	14.698	14.000	13.654	14.039	14.790
Kotabaru	15.218	14.698	14.600	14.656	15.050	14.720
Banjar	16.983	16438	15.500	15.287	15.719	18.050
Barito Kuala	15.819	15.278	14.600	14.909	15.318	15.960
Tapin	9.369	9.089	8.700	6.045	6.518	7.010
Hulu Sungai Selatan	15.300	13.107	15.100	14.836	15.233	14.590
Hulu Sungai Tengah	15.385	14.891	14.200	14.181	14.557	15.080
Hulu Sungai Utara	16.241	15.664	15.000	15.228	15.623	15.940
Tabalong	14.358	13.924	13.200	14.305	14.709	15.710
Tanah Bumbu	17.454	16.900	16.100	16.039	16.563	17.910
Balangan	8.722	8.412	8.000	7.383	7.664	7.280
Banjarmasin	31.606	30.555	29.100	27.777	28.537	29.950
Banjarbaru	12.021	11.603	11.100	9.997	9.965	11.460

Sumber : BPS Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin perlu diteliti lebih dalam apakah ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang juga terjadi peningkatan dan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengertian kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada di bawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada di bawah garis kemiskinan (*poverty tine*). Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu besarnya rupiah, yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (setara 2100 kalori/kapita/hari) dan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya.

Atas dasar kebutuhan minimal yang harus dicukupi untuk hidup maka ditentukan biaya garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS untuk memperkirakan jumlah dan persentase penduduk miskin. Garis kemiskinan untuk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perhitungan BPS tahun 2010 adalah sebesar Rp.210.850,00/kapita. Sementara, menurut BKKBN,

keluarga miskin dikelompokkan dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I karena alasan ekonomi belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimum.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong industrialisasi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya serta dapat memperbaiki pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian empiris yang berkaitan dengan pengaruh variabel ekonomi makro seperti investasi (Badrudin, 2011, Warsilan, 2013), pendapatan asli daerah, transfer pemerintah (Warsilan, 2013), ekspor, inflasi, perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan (Siswantoro dan Mulyanti, 2012). Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut maka perlu dikaji dan dilakukan studi untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis adanya perbedaan teori dan praktik artinya investasi pemerintah dan investasi swasta berperan cukup besar dalam mendorong perekonomian daerah. Jadi investasi yang secara teori dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan ternyata dalam praktik belum mampu berdasarkan fakta yang terjadi.

Selanjutnya terjadi pembagian kerja dan spesialisasi yang mendorong inovasi produk dan proses yang meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin pemerintah dapat menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya maka disitulah terjadi pertumbuhan ekonomi menurut definisi Kuznet dalam Djoyohadikusumo (1994). Dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja yang *selanjutnya* dapat menurunkan jumlah penduduk miskin baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tentunya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan antar wilayah (*regional disparity*). Basri (1995) menyatakan bahwa ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan, yaitu : (1) kesenjangan antar daerah, (2) kesenjangan antar sektor, dan (3) kesenjangan distribusi pendapatan

masyarakat. Kesenjangan antar daerah dapat terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan wilayah yang terbelakang atau kurang maju, hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut lebih besar atau lebih kecil tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Disparitas Pendapatan antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan cukup bervariasi sebagaimana terlihat pada tabel 1.10 di bawah ini:

Tabel 1.10
Disparitas Pendapatan (Gini Ratio)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Tanah Laut	0,327	0,324	0,332	0,347	0,349
Kotabaru	0,333	0,313	0,326	0,351	0,323
Banjar	0,354	0,333	0,326	0,351	0,324
Barito Kuala	0,321	0,318	0,333	0,335	0,366
Tapin	0,258	0,295	0,279	0,265	0,345
Hulu Sungai Selatan	0,345	0,295	0,264	0,269	0,312
Hulu Sungai Tengah	0,290	0,301	0,301	0,279	0,327
Hulu Sungai Utara	0,283	0,293	0,259	0,266	0,359
Tabalong	0,345	0,327	0,332	0,297	0,285
Tanah Bumbu	0,348	0,319	0,329	0,294	0,333
Balangan	0,308	0,329	0,304	0,247	0,403
Banjarmasin	0,382	0,413	0,370	0,325	0,388
Banjarbaru	0,339	0,370	0,361	0,365	0,352

Sumber : BPS Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan maka diperlukan studi mendalam dan komprehensif terhadap keterkaitan variabel penelitian. Hal inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian untuk menguji, membuktikan dan menjelaskan tentang Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Ketimpangan Pendapatan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan tingkat kemiskinan sebagian sudah pernah dilakukan.

Penelitian mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Todaro (2000) yang menyatakan investasi merupakan salah satu faktor komponen utama pertumbuhan ekonomi. Mursinto (2004) dalam penelitian sebelumnya juga menyimpulkan investasi pemerintah daerah dan investasi swasta keduanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil penelitian Kuznet dalam Pressman (2000) yang menunjukkan investasi swasta dampaknya kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai bagi hasil dan royalti yang nilainya sangat kecil. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, khususnya mengenai pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja ditunjukkan oleh Wurarah (2011) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja, Halim (2008) dalam penelitiannya juga menunjukkan investasi pemerintah mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hasil ini berbeda dengan pernyataan Mangkosoebroto (2001) bahwa investasi pemerintah merupakan investasi padat modal infrastruktur, sehingga tidak banyak membutuhkan tenaga kerja, India (2012) dalam penelitiannya memperkuat realita tersebut bahwa investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja karena banyak digunakan untuk penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana transportasi. Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan ketidakkonsistenan hasil, sehingga ada *gap* penelitian yaitu mengenai signifikansi pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja juga masih terjadi inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Teori Lewis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi khususnya pada negara-negara berkembang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat investasi di sektor industri juga tinggi, sehingga menimbulkan perluasan output lapangan kerja. Pernyataan ini ternyata bertolak belakang dengan hasil penelitian Todaro (2000) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, karena reinvestasi yang dilakukan oleh negara berkembang justru untuk mengembangkan sektor industri yang tidak padat tenaga kerja. Fei dan Ranis dalam Jhingan (2003) juga menyatakan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya *research gap*, yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel disparitas pendapatan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan. Masalah disparitas pendapatan merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan ekonominya, karena tidak sedikit negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, karena memang adanya disparitas yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi seringkali gagal untuk mengurangi kemiskinan, kondisi ini membuat inkonsistensi penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, yang disebabkan penelitian tersebut tidak membedakan wilayah-wilayah dengan disparitas pendapatan yang rendah dan wilayah dengan disparitas yang tinggi. Adanya variabel disparitas pendapatan pada model tingkat kemiskinan membuat model penelitian lebih komprehensif dan bisa menjawab alasan lebih detail mengenai inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah investasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?

3. Apakah investasi pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
4. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi dengan meratanya disparitas pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ?
7. Apakah penyerapan tenaga kerja dengan meratanya disparitas pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. menguji pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. menguji pengaruh investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. menguji pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. menguji pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan dengan meratanya disparitas pendapatan sebagai variabel moderasi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. menguji pengaruh penyerapan tenaga kerja dengan meratanya disparitas pendapatan sebagai variabel moderasi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademik.** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dalam bidang teori ekonomi makro khususnya yang berkaitan dengan indikator ekonomi makro sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja serta menurunkan tingkat kemiskinan.
2. **Manfaat Praktis.** Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi di wilayahnya guna meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja serta menurunkan tingkat kemiskinan.
3. **Manfaat Penelitian Lanjutan.** Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain yang ingin mendalami pengembangan teori ekonomi makro.

BAB 2

PERSPEKTIF AKADEMIK



2.1. Landasan Teori

Landasan teori menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan obyek penelitian. Menurut Chalmers (1983) teori harus dipandang sebagai keutuhan struktur sumber ilmu yang berkaitan dengan observasi dan teori yang tersusun secara koheren. Di dalamnya teori disusun sebagai petunjuk dalam pengembangan teori lebih lanjut.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijaksanaan pemerintah dan swasta dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru sekaligus merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (Meier, 1970). Masalah pokok dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan daerah masing-masing dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi pembangunan ini mengarahkan pada inisiatif daerah dalam proses menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Badrudin. 2013).

Wicksell dalam Pressman (2000) dan Kuznet dalam Pressman (2000) mengemukakan bahwa faktor jumlah stok modal dan perkembangannya dari waktu ke waktu akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kusreni (2009) bahwa setiap usaha pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha tersebut pemerintah beserta swasta harus bersama-sama mengambil kesempatan dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam

memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi yang diperlukan. Pendekatan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dirumuskan dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar dalam kerangka berpikir dan rencana tindakan dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

a. Pengertian Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Prof. Simon Kuznets dalam Jhingan (2000), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kebutuhan, kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan serta ideologi yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dan meningkat secara terus menerus dalam hal penyediaan barang.
2. Teknologi maju merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk.
3. Penggunaan teknologi secara luas, efektif dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sebagai inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Sukimo (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *Gross Domestic Product* atau perubahan tingkat ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah produksi dan barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan berbagai perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nilai tambah yang mampu dihasilkan suatu daerah tertentu, sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi daerah dapat diukur dengan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendapatan regional PDRB adalah jumlah nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/ lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian maka nilai PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki pada periode waktu tertentu (biasanya selama satu tahun). Dalam hal kepemilikan faktor produksi berpengaruh besar terhadap nilai PDRB yang dihasilkan.

PDRB sangat berguna sebagai alat perencanaan dan analisis kebijakan ekonomi, misalnya analisis untuk menentukan peningkatan pajak daerah beserta dampaknya, mengukur laju pertumbuhan ekonomi, perubahan sektor ekonomi, mengukur laju inflasi khususnya inflasi di tingkat harga produsen, mengukur produktivitas kerja sektoral serta tingkat kesejahteraan umum melalui nilai PDRB perkapita.

Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan ke dalam tiga pengertian:

1. Pendekatan Produksi. PDRB adalah jumlah nilai tambah dari produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap unit usaha di suatu daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, biasanya setahun.
2. Pendekatan Pendapatan. PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Balas jasa tersebut adalah upah atau gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Kesemuanya dinilai sebelum dipotong dengan pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam perhitungan ini termasuk juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung netto.
3. Pendekatan Pengeluaran. PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor *netto* di suatu wilayah/regional. Ekspor *netto* disini adalah ekspor dikurangi impor.

Dari ketiga pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nilai produk barang jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah sama dengan

jumlah balas jasa faktor produksi dan sama juga dengan jumlah pengeluaran untuk berbagai keperluan. PDRB tersebut selanjutnya disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena masih mencakup pajak tak langsung netto.

Ekonomi pembangunan menurut Djoyohadikusomo (1994) adalah ilmu yang mempelajari perubahan pada suatu tata susunan ekonomi masyarakat yang menyeluruh sebagai suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu ekonomi pertumbuhan lebih menekankan pada ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari kedua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan lebih luas dan komprehensif. Ekonomi pertumbuhan mempelajari kenaikan pendapatan nasional tanpa memandang terjadi tidaknya proses perubahan struktur ekonomi, sementara itu ekonomi pembangunan menekankan adanya proses terjadinya kenaikan pendapatan nasional dan perkapita suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan sistem kelembagaan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum yang berefek pada perubahan struktural dan transformasi kelembagaan.

Pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi lebih fokus pada subjek proses, dimana untuk lebih umumnya istilah itu banyak digunakan pada pertumbuhan ekonomi bagi negara maju dan pembangunan ekonomi untuk negara sedang berkembang (Arsyad, 2010). Oleh karena itu keberhasilan pembangunan ekonomi akhirnya tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih menyeluruh.

b. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Sukimo (2007) dan Badrudin (2012) menjelaskan teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi Klasik dan Modern

Menurut pandangan ahli-ahli Klasik ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan ahli ekonomi klasik adalah peranan tenaga kerja.

Menurut mereka peranan tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atau masa, secara berurutan dimulai dari tahap perburuan, beternak, bercocok taman, perdagangan, dan perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini sebagai upaya peningkatan produktivitas kerja.

Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang sangat penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi (Kuncoro, 1997).

Pendekatan teori pembangunan ekonomi model pertumbuhan linier atau klasik seperti Adam Smith, Ricardo, dan Arthur Lewis yang berkembang pada era 1950-1960an menjelaskan pembangunan ekonomi untuk meraih pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berjalan dengan memperoleh sejumlah tabungan, investasi dan bantuan luar negeri. Selanjutnya pendekatan struktural yang muncul pada era 1970 an seperti Harrod - Domar, Kaldor, dan Kuznet yang dalam model ini menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun muncul teori ketergantungan dengan adanya ketergantungan daerah pinggiran terhadap daerah metropolitan yang kapitalis.

Pada era 1990 terjadi perubahan model teori ketergantungan

dengan teori neo klasik melalui peran perdagangan bebas, keterbukaan ekonomi, dan privatisasi perusahaan publik. Model neo klasik memandang bahwa ketergantungan suatu negara menjadi semakin bertambah karena ketidakmampuan aspek teori ketergantungan dalam mengelola eksploitasi faktor eksternal dan internal seperti faktor luar negeri dan struktur sosio kultural dan pola perilaku masyarakat yang mengakibatkan intervensi pemerintah berupa regulasi dalam perekonomian.

2. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan tentang peranan pengusaha yang akan melakukan inovasi dan investasi dalam kegiatan ekonomi. Investasi yang baru akan meninggalkan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat konsumsi menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan investasi baru.

3. Teori Harrod-Domar

Teori ini menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Dalam teori ini disebutkan bahwa jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh. Pada dasarnya teori ini menentukan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.

Teori ini menganggap setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Rasio modal *output* (COR) sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut (Arsyad, 1999).

4. Teori David Ricardo

Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat

akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan membuat upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (*stationary-state*).

5. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Robert Solow (1956), berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau *output*. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.

6. Teori Walt Witman Rostow

Bermula dari artikel yang dimuat dalam *Economies Journal* (1956) dan dikembangkan dalam buku *The Stages of Economies Growth* (1960) bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dibedakan dalam lima tahapan yaitu tradisional, prasyarat tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi yang berdasarkan karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah proses transformasi masyarakat tradisional ke masyarakat modern dengan beberapa indikasi, yaitu: 1) perubahan struktur ekonomi ditandai dengan menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan sektor industri, 2) proses perubahan orientasi organisasi ekonomi, sosial dan politik dari suatu daerah dengan orientasi keluar, 3) perubahan pandangan masyarakat mengenai anak dan keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga kecil, 4) perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari investasi tidak *produktif* ke investasi produktif, dan 5) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang lebih merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Arsyad, 2010).

c. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2004) ada tiga faktor utama yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu akumulasi modal yang meliputi semua investasi baru, pertumbuhan penduduk yang memperbanyak tenaga kerja, dan kemajuan teknologi berupa cara-cara perbaikan barang dan menangani pekerjaan. Adam Smith menyatakan bahwa terjadinya akumulasi modal dan tenaga kerja berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Unsur produksi menurut Adam Smith terdiri dari sumber daya tanah, sumber daya manusia dan stok modal yang ada (Spechler, 1990). Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas EPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

2.1.2 Investasi

a. Pengertian Investasi

Secara umum investasi meliputi penambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, dan pembukaan tanah baru. Teori ekonomi mengartikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa dimasa yang akan depan (Samuelson, 2004 dan Sukimo, 2007).

Pengertian investasi ini mempertegas apa yang telah disampaikan oleh Lewis (1993) bahwa investasi sebagai permintaan barang-barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa yang akan datang. Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah.

Peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pada hakikatnya

merupakan cara yang dapat dilakukan oleh swasta maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003). Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran:

1. Merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Menurut Arsyad (2004: 64), Korelasi positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana namun jelas di dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod Domar Teon Harrod Domar (1947) (dikemukakan oleh Evsey domar dan R E Harrod) mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang merupakan perkembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi yang sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
2. Dalam perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan, berarti sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol).
4. Kecenderungan untuk menabung besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal dan *output* dan rasio penambahan modal-output.

Pendapat Todaro (2000) tentang tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi setiap negara yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Menurut Solow dan Swan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi dalam Arsyad (2010).

Menurut Harrod-Domar dalam Arsyad (2010) dan Todaro (2009) bahwa dalam pertumbuhan ekonomi peranan investasi memperbesar kapasitas produksi yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat dan pendapatan nasional. Sesuai dengan pemikiran Ricardo dan Smith, bahwa peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, *the law of diminishing return* dan memperlambat penurunan tingkat hidup (Skousen, 2009).

Menurut Raharjo (2006), salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal dari swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas, diharapkan dapat meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun.

Pemerintah membagi kegiatan penanaman modal yang berusaha di wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal oleh investor asing yang menggunakan modal asing baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian (dengan cara berpatungan bersama investor dalam negeri). Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan modal oleh penanaman modal dalam negeri dengan modal keseluruhannya dari dalam negeri.

Menurut Todaro (2006), Arus sumber-sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penanaman modal asing yang dilakukan pihak swasta (*private foreign investment*) dan investasi portofolio, terutama berupa penanaman modal asing “langsung” yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Di samping itu, terdapat pula arus permodalan serupa dari bank-bank swasta internasional, yang dana investasinya berupa portofolio.

Menurut pandangan kaum klasik dalam Sukimo (2007), pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu masyarakat untuk meningkatkan produksi. Bagi kaum Klasik, pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah barang-barang modal dalam masyarakat. Kalau kesanggupan itu bertambah, maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan ekonomi akan tercipta.

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan kedalam 5 tahap, yaitu: masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take off*), tinggal landas (*take off*), menuju kedewasaan (*the drive maturity*) dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*). Rostow dan Musgrave dalam Mangkusoebroto (1999, 2008) menjelaskan bahwa pada tahap pembangunan menengah investasi swasta sudah berperan besar tetapi peran investasi pemerintah bisa juga tetap besar. Untuk menjalankan fungsi stabilisasi. Fungsi ini untuk tahap pembangunan menengah terjadi kegagalan pasar dari peranan investasi swasta yang besar sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa dalam jumlah besar dan kualitas yang baik.

Menurut Schumpeter dalam Pressman (2000) pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi terus menerus tapi mengalami keadaan manakala berkembang dan terkadang mengalami kemunduran. Konjungtor tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) melakukan inovasi dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi diperlukan investasi yang dapat meningkatkan ekonomi.

b. Jenis-Jenis Investasi

Menurut Sianturi (2009), berdasarkan kekhususan tertentu dan kegiatannya, investasi dibagi dalam kelompok:

1. Investasi Baru.

Investasi baru yaitu investasi bagi pembuatan sistem produksi baru, baik sebagai bagian dari usaha baru untuk produksi baru maupun perluasan produksi, tetapi harus menggunakan sistem produksi baru.

2. Investasi Peremajaan.

Investasi jenis umumnya hanya digunakan untuk mengganti

barang-barang kapital lama dengan yang baru, tetapi masih dengan kapasitas dan ongkos produksi yang lama dengan alat yang digantikannya.

3. Investasi Rasionalisasi.

Pada kelompok ini peralatan yang lama diganti oleh yang baru tetapi dengan ongkos produksi yang lebih murah, walaupun kapasitas sama dengan yang digantikannya.

4. Investasi Perluasan.

Dalam kelompok investasi ini peralatannya baru sebagai pengganti yang lama. Kapasitasnya lebih besar sedangkan ongkos produksi masih lama.

5. Investasi Modernisasi.

Investasi ini digunakan untuk memproduksi barang baru yang memang proses baru, atau memproduksi lama dengan proses yang baru.

6. Investasi Diversifikasi.

Investasi ini untuk memperluas program produksi perusahaan tertentu, sesuai dengan program diversifikasi kegiatan usaha korporasi yang bersangkutan.

Jenis- jenis investasi juga dapat dibedakan berdasarkan dari pelaku yang terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. *Autonomous Investment* (Investasi Otonom).

Investasi otonom adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Artinya tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Investasi ini dilakukan oleh pemerintah karena di samping biayanya sangat besar. investasi ini juga tidak memberikan keuntungan, maka swasta tidak dapat melakukan investasi jenis ini karena tidak memberikan keuntungan langsung.

2. *Induced Investment* (Investasi Dorongan).

Investasi dorongan adalah investasi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Baik itu pendapatan daerah maupun pendapatan pusat atau nasional. Investasi ini dilakukan akibat adanya pertambahan permintaan, dimana pertambahan permintaan tersebut sebagai akibat dari pertambahan

pendapatan. Karena permintaan bertambah, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi permintaan tersebut.

c. Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah akan mengalami multiplier dengan terjadinya kenaikan GNP akibat kenaikan pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa sehingga bertambah output yang lebih besar dan pertambahan investasi yang besar. Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan barang oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam jangka panjang untuk pembangunan, surat berharga, investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat social dan lain-lain. Investasi pemerintah dalam pengeluaran belanja berupa pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan berupa belanja modal berkontribusi memberikan layanan kepada masyarakat dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena kesejahteraan masyarakat meningkat.

Berdasarkan Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 alokasi belanja daerah terbagi atas komponen belanja tidak *langsung* dan belanja langsung. Alokasi belanja modal termasuk belanja langsung yang dialokasikan untuk investasi sektor publik. Halim (2008) mengemukakan Investasi pemerintah merupakan penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan manfaat lainnya sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Adolf Wagner dalam Soepangat (1991) dan Mursinto (2005) pengeluaran pemerintah meningkat dari waktu ke waktu karena bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. Soepangat (1991) menjelaskan peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan barang publik akan bermanfaat bagi yang membutuhkan yang perlu diberikan oleh pemerintah yang pembiayaannya berasal dari belanja modal.

Halim (2008) mendefinisikan belanja modal sebagai bentuk investasi berupa *capital expenditure* sebagai belanja yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal dapat berupa tanah, gedung dan bangunan,

mesin dan peralatan, jalan, irigasi jaringan dan fisik lainnya. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti: dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringannya serta asset tetap lainnya. Menurut Permendagri No. 59 Th 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Th 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasar 52 belanja modal adalah belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja modal berupa belanja barang habis pakai. Belanja modal berupa bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, minuman, pakaian dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari- hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang dan jasa dan belanja lainnya yang sejenis.

d. Investasi Swasta

Besarnya nilai investasi yang terealisasi yang berasal dan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing merupakan investasi swasta.

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. PMDN adalah penanaman modal yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970. Untuk Undang-Undang Tentang Tata Cara Penanaman Modal, lebih jelasnya dapat dilihat di Keppres RI No.97 Tahun

1993. Permohonan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dapat dilakukan oleh PT (Perseroan Terbatas), CV (Comanditair Venootschap), Fa (Firma), Koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau Perorangan. Untuk permohonan penanaman modal baru yang berlokasi di 2 (dua) provinsi atau lebih diajukan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

2. Penanaman Modal Asing (PMA).

Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan penanaman modal untuk usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri. Bentuk penanaman modal asing ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya (Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 3): mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas, membeli saham, melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Menurut Sianturi (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi investasi **adalah** sebagai berikut:

1. Tingkat bunga.

Tingkat bunga sangat berperan dalam menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu negara. Apabila tingkat bunga rendah, maka investasi yang terjadi akan tinggi karena kredit dari bank masih menguntungkan untuk mengadakan investasi. Sebaliknya jika tingkat bunga tinggi, maka investasi kredit bank tidak menguat. Keynes mengatakan masalah investasi baik ditinjau dari penentuan jumlahnya maupun kesempatan untuk mengadakan investasi itu sendiri, didasarkan pada konsep *Marginal Efficiency of Capital* (MEC). MEC merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dilakukan (*return of investment*).

2. Peningkatan aktivitas perekonomian.
Harapan adanya peningkatan perekonomian di masa mendatang, merupakan salah satu faktor penentu untuk mengadakan investasi atau tidak. Jika diperkirakan akan terjadi peningkatan perekonomian di masa yang akan datang, walaupun tingkat bunga lebih besar dari tingkat MEC (sebagai penentu investasi), maka investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh investor yang instingnya tajam melihat peluang meraih keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang.
3. Kestabilan politik suatu negara.
Kestabilan politik suatu negara merupakan suatu pertimbangan yang sangat penting untuk mengadakan investasi. Karena dengan stabilnya politik negara yang bersangkutan terutama penanaman modal dan luar negeri (PMA) tidak akan ada risiko perusahaannya dinasionalisasikan oleh negara bersangkutan.
4. Kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Dengan demikian kemajuan teknologi yang berlaku di berbagai kegiatan ekonomi akan mendorong lebih banyak investasi. Semakin besar biaya yang diperlukan untuk melakukan perombakan dalam teknologi yang digunakan, maka semakin banyak investasi yang dilakukan.

Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun dan Yasin, 2003).

Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada. Gambaran perkembangan pembangunan daerah secara makro sektoral

tidak lepas dari perkembangan (distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan itu perlu dipisahkan jenis investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Umumnya pemerintah masih harus memperhatikan beberapa faktor, seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian yang khusus pula.

Usaha pemerataan pembangunan antar daerah juga merupakan faktor lain yang diperhitungkan pemerintah. Pihak swasta tidak berurusan secara khusus dengan faktor-faktor tersebut. Kalaupun ada keterkaitannya, sifatnya tidak langsung, yaitu melalui berbagai peraturan (Azis, 1985). Faktor produksi sering diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap keempat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elastisitas penawaran parsial, karakteristik yang terkandung pada setiap faktor produksi, dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produksi. Secara historis, perbedaan ini bersesuaian dengan berkembangnya *bergaining position* antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan-tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang kemudian menentukan berapa besar imbalan yang akan diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga.

2.1.3. Tenaga Kerja dan Penyerapannya

Menurut Sumarsono (2006), tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja, artinya bahwa semua orang yang melakukan kegiatan pekerjaan untuk diri sendiri atau orang lain tanpa menerima upah atau mereka yang sanggup bekerja. Menurut Simanjuntak (1998) yang termasuk tenaga kerja adalah seseorang yang mengurus rumah tangga, sekolah, yang mencari kerja, atau sedang bekerja dengan usia 14-60 tahun.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia yang berlaku *di Indonesia adalah berumur 15 tahun - 64 tahun*. Menurut pengertian ini setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebut di atas 20 tahun.

Menurut Todaro (2006) Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dan pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Berdasarkan profil tenaga kerja menurut BPS pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam pengumpulan data Sakemas adalah konsep dasar angkatan kerja. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja digolongkan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya). Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu.

Menurut BPS Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode pendataan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tenaga atau lainnya (pensiun, penerima transfer, penerima pendapatan/bunga bank, jompo atau alasan lain). Menurut

Ananta (1991) tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang unik karena tenaga kerja berbeda dengan faktor produksi lainnya seperti tanah, mesin dan uang. Perbedaan utama tersebut adalah sumber daya / tenaga kerja tidak dapat dipisahkan secara fisik dari tenaga kerja itu sendiri, sebaliknya tanah dapat dimanfaatkan untuk suatu produksi tanpa pemilik tanah itu berada di lokasi produksi.

Kesempatan kerja menurut Tambunan (2001) adalah banyak orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia, apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat di satu sisi namun sisi lainnya tingkat pertumbuhan lapangan kerja *relative* lambat, merupakan masalah di negara berkembang termasuk Indonesia. Masalah yang sering muncul dalam ketenagakerjaan ini adalah terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja yang dikenal dengan *excess supply*. Pentingnya faktor tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi menurut Lewis dalam Ananta (1988) bahwa kelebihan tenaga kerja di satu sektor (pertanian) memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan output dan penyediaan tenaga kerja di sektor lainnya (industri).

Pandangan ekonomi kapitalis terhadap tenaga kerja tidak terlepas dari konsep faktor produksi atau input. Perkembangan iklim usaha menuntut adanya penyesuaian Perlakuan terhadap tenaga kerja. Pada awalnya ada kecenderungan tenaga kerja dianggap sebagai suatu faktor produksi lainnya yang memberikan kontribusi relatif tetap terhadap produksi.

Pandangan ini yang menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap tenaga kerja sebagaimana input tanah mendapatkan sewa tetap dan modal mendapatkan bunga. Adanya ketidakstabilan sifat dan karakter tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk memberikan perlakuan lain terhadap tenaga kerja. Jika tanah dan modal dapat diperjualbelikan di pasar sedangkan tenaga kerja tidak demikian. Namun demikian, hal ini tidak cukup menjadikan alasan bagi aliran ekonomi utama (*mainstream economy*) untuk melakukan pembedaan analisis terhadap faktor produksi lain.

Tenaga kerja dibedakan dengan *entrepreneur* (wirausaha) adalah

lebih didasarkan atas perbedaan karakter intrinsik yang ada pada kedua faktor produksi tersebut. Entrepreneur dipandang sebagai tenaga kerja yang berani mengambil resiko, sehingga ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan resiko yang diambil dan nilainya belum tentu tetap. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah dan memanfaatkan modal) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu invests dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga kerja.

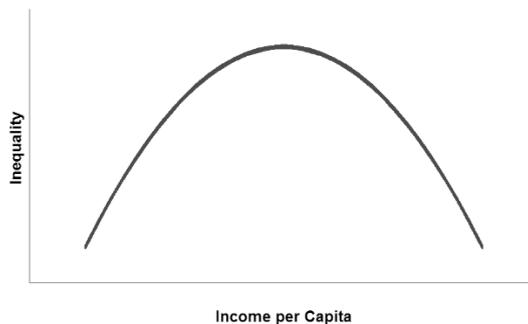
2.1.4. Disparitas Pendapatan

Masalah disparitas pendapatan merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh berbagai negara miskin atau negara sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan ekonominya. Tidak sedikit negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali gagal untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan kemiskinan absolut. Pertumbuhan PDB perkapita yang cepat tidak secara otomatis dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, karena apa yang disebut dengan proses *'trickle down effect'* dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan (Arsyad, 1988).

Pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat yang terus mengalami peningkatan dalam jangka panjang merupakan akibat dari meningkatnya pembangunan ekonomi daerah tersebut. Tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya semata-mata menciptakan modernisasi masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat tersebut. Tujuan ini tidak akan tercapai jika pembangunan ekonomi mengakibatkan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat menjadi semakin memburuk keadaannya.

Adelman dan Moris dalam Kuncoro, (1997) berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan didaerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain pertumbuhan ekonomi. Kuznets (1955)

menganalisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, dan mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya distribusi pendapatan semakin membaik, hal inilah yang dikenal dengan hipotesis “U-terbalik” Kuznets, bentuk rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini, pertumbuhan GNP per kapita seperti yang disajikan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 (Hypothetical Kuznets curve)

Terdapat banyak pendapat yang mencoba untuk menjelaskan mengapa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, untuk kemudian membaik. Sebagian besar pendapat tersebut mengaitkannya dengan kondisi dasar perubahan struktural, bahwa pada tahap pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern (dalam model Lewis), lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kesenjangan pendapatan antar sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya melebar dengan cepat sebelum akhirnya menyempit kembali.

2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan menurut definisi Bank Dunia, 2007 sebagai salah satu kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati kebutuhan dasarnya yang meliputi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Orang miskin absolut menurut Bank Dunia adalah orang yang hidup dengan pendapatan di bawah \$ 1 per hari,

kemiskinan menengah dengan pendapatan di bawah \$ 2 hari. Kemiskinan merupakan tahapan yang harus dilewati dalam perkembangan ekonomi suatu daerah dan pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikkelsen, 2003).

Pengertian kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada di bawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu besarnya rupiah, yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (setara 2100 kalori/kapita/hari) dan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. Atas dasar kebutuhan minimal yang harus dicukupi untuk hidup maka di tentukan biaya garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS untuk memperkirakan jumlah dan persentase penduduk miskin.

Ukuran kemiskinan menurut Kuncoro (2006) membedakan 3 (tiga) golongan yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana hasil pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini menentukan tingkat pendapatan minimal yang cukup memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, perumahan guna menjamin kelangsungan hidupnya. Kesulitan utama konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan tetapi juga iklim, tingkat kemajuan negara **bersangkutan** serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Untuk hidup layak seseorang membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

Menurut Kuncoro (1997) penyebab kemiskinan secara makro karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Rendahnya tingkat kemiskinan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith, (2006) kesejahteraan merupakan ukuran pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagian besar penelitian membuktikan adanya faktor penentu keberhasilan investasi, perekonomian suatu negara terutama di negara Eropa seperti yang diteliti oleh Scaperland dan Mauer (1969) adalah indikator makro perekonomian. Hasil penelitian Prachowny (1972) perekonomian dan investasi suatu negara juga dipengaruhi oleh stabilitas politik, fundamental ekonomi makro dan keamanan, dapat disimpulkan adanya peningkatan risiko dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya dalam perekonomian dan akhirnya tidak akan ada pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan suatu negara.

Berdasarkan penelitian Suharto (2011) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel PDB, tingkat suku bunga, nilai tukar, ekspor, dan inflasi terhadap investasi asing. dan berimplikasi terhadap perekonomian di Indonesia 1972- 2010. Penelitian Suharto ini memperkuat hasil penelitian Widodo dan Tarsidin (2007) yang menyimpulkan bahwa pengaruh tingkat bunga, nilai tukar, inflasi meningkatkan resiko pada sektor usaha ekonomi di Indonesia. Penelitian Alfin Yulistino dan Oktarani (2008) juga menyimpulkan tentang perdagangan internasional, investasi asing langsung dan investasi portofolio serta perkembangan pasar uang dapat meningkatkan kinerja perekonomian di negara ASEAN.

Studi yang meneliti tentang keterkaitan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan penyerapan tenaga kerja dilakukan oleh Fitriadi (2008) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini juga menguraikan bahwa pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Bahrudin (2011) menyimpulkan adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah membuktikan bahwa transfer pemerintah sangat penting peranannya dalam perekonomian daerah di era otonomi sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menurunkan kemiskinan suatu daerah.

2.2. Implikasi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Penelitian Rachim (2005) tentang pengaruh struktur pendapatan dan belanja pemerintah kota terhadap kemandirian wilayah dan perkembangan kegiatan sosial di Kota Samarinda menyimpulkan tentang penggunaan PAD dan dana perimbangan (transfer pemerintah) dalam pembangunan berpengaruh signifikan, sehingga kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang berarti dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Publik berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran pada studi kasus di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur diteliti oleh Hamzah (2007). Siswantoro dan Mulyanti (2012) menyimpulkan bahwa transfer pemerintah, PAD dan TK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dipengaruhi secara positif signifikan oleh transfer pemerintah dan TK namun signifikan secara negatif oleh PAD.

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS





BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Menurut Halim (2008) belanja modal berupa pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat dinamakan investasi pemerintah. Adolf Wagner dalam Soepangat (1991) dan Mursinto (2005b) pengeluaran pemerintah semakin meningkat dari waktu ke waktu karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. Menurut Adolf Wagner produksi barang dan jasa dalam masyarakat dibedakan barang dan jasa kolektif (barang publik) dan barang dan jasa swasta (barang private). Barang dan jasa kolektif disediakan pemerintah yang memerlukan investasi pemerintah sedangkan barang dan jasa swasta disediakan oleh swasta yang memerlukan investasi swasta.

Kelemahan teori Adolf Wagner menurut Peacock-Wiseman dalam Soepangat (1991) berdasarkan pada teori kenegaraan yang sekarang tidak lagi dianut negara-negara barat, tidak memperhitungkan pengaruh perang terhadap pengeluaran negara, selalu menekankan dalam jangka panjang sehingga tidak memperhatikan pola waktu atau proses pengeluaran negara. Jadi menurut teori perkembangan pengeluaran negara tidak bersifat pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi pola seperti tangga rumah yang disebut *steplike* akibat tiga efek yang saling berhubungan yaitu *displacement effect* (efek kenaikan pengeluaran pemerintah dan pajak akibat guncangan besar seperti perang dan depresi), *inspection effect* (efek infeksi dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan) dan *concentration effect* (efek konsentrasi yang dilakukan pemerintah pusat yang sebelumnya dilakukan pemerintah daerah dan atau sektor swasta).

Jhingan (1994) membedakan pengertian ekonomi pertumbuhan dengan ekonomi pembangunan. disertai berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang akan meningkatkan

pendapatan nyata per kapita Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan nyata per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang daripada tingkat pertumbuhan penduduk disertai berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita.

Menurut Djoyohadikusumo (1994), Jhingan (1994), Sen dalam Pressman (2000), Arsyad (2010), Sukimo (2006), Todaro dan Stephen C. Smith (2006) dan Kuncoro (2010) menyimpulkan bahwa ekonomi pertumbuhan adalah kenaikan pendapatan nasional (GDP atau GNP) tanpa memandang perubahan struktur ekonomi sedangkan pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka panjang disertai perubahan sistem kelembagaan.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006) kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan dan pemerataan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan masyarakat Menurut Sen dalam Pressman (2000) kesejahteraan masyarakat tergantung pada hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dengan baik meliputi dapat makan, membaca dan memberikan hak suaranya jadi ekonomi kesejahteraan tidak hanya masalah konsumsi tetapi lebih mengembangkan segala yang terkait kemampuan yang melekat pada manusia.

Dalam penyusunan kerangka konseptual terlebih dahulu akan diawali dengan kerangka proses berpikir yang disusun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi dan tinjauan pustaka. Kerangka proses berpikir disusun berdasarkan proses berpikir deduktif yang diperoleh dari hasil studi teoritik dan proses berpikir induktif yang diperoleh dari hasil studi empirik. Proses berpikir deduktif diperoleh dengan cara mempelajari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Proses berpikir induktif diperoleh dengan cara mempelajari hasil-hasil penelitian empirik terdahulu yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan proses berpikir deduktif dan induktif yang saling berhubungan tersebut, maka disusunlah hipotesis penelitian, sehingga hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara bersifat teoritis dan konseptual terhadap masalah penelitian, oleh karena itu perlu diuji kebenarannya melalui uji statistik. Bilamana hipotesis tersebut telah diuji dan ternyata benar, maka akan diperoleh pengetahuan ilmiah baru.

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kerangka konseptual penelitian kepada teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan, dalam hal ini fokus penelitian adalah Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Ketimpangan Pendapatan serta Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002-2015. Pendapat mengenai pengaruh PDRB, PAD, Transfer Pemerintah, Tingkat Bunga, Nilai Tukar, Ekspor, Inflasi dan Tenaga Kerja terhadap Perekonomian Daerah sector *Tradable* dan pengaruh PDRB, PAD, Transfer Pemerintah, Tingkat Bunga, Nilai Tukar, Ekspor, Inflasi dan Tenaga Kerja terhadap Perekonomian Daerah sektor non *Tradable* mengacu pada pendapat Basri dan Munandar (2009), Chenery dan Syrquin (1975).

Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Ketimpangan Pendapatan serta Tingkat Kemiskinan dikuatkan oleh pendapat Tambunan (2008) yang menyatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dapat diasumsikan sebagai akumulasi dari variabel ekonomi makro di atas dalam jangka panjang akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Yang berarti pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja. sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan tingkat upah dan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Kuatnya implikasi Investasi dan variabel PDRB, PAD, Transfer Pemerintah, Tingkat Bunga, Nilai Tukar, Ekspor, Inflasi, Tenaga Kerja, Tabungan dan Perekonomian Daerah sektor *Tradable* dan sektor non *Tradable* terhadap Tingkat Kemiskinan banyak dibuktikan studi empiris seperti adanya relasi trade off yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan (Deininger dan Squire, 1995a,b, 1996), kemudian penelitian Ravaliton dan Chen 1997 menjelaskan penurunan tingkat kemiskinan selalu berbarengan dengan peningkatan pendapatan perkapita dalam Tambunan

(2008).

Proses penelitian ini mengikuti kerangka berpikir sesuai Gambar 3.1. Studi teoritik pada kerangka proses berpikir di atas digunakan sebagai landasan berpikir teoritis mengenai investasi pemerintah dan investasi swasta dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta tingkat kemiskinan, kemudian dilanjutkan dengan studi empirik yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari studi atas teori-teori dan studi empirik diperoleh variabel dengan segala hubungan dan pengaruh kualitasnya sehingga dengan demikian dapat disusun rumusan masalah yang kemudian disusun menjadi hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bermakna atau postulat yang kebenarannya masih memerlukan pengujian yang mendalam.

Pengajuan hipotesis pada studi ini menggunakan Path Analysis (Analisis Jalur) yang diharapkan dapat membuktikan bahwa investasi pemerintah dan investasi swasta mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang diduga akan tingkat kemiskinan akan berkurang. Hasil studi diharapkan dapat memperoleh temuan-temuan penting yang dapat memberikan kontribusi dalam rumusan kebijakan pemerintah.

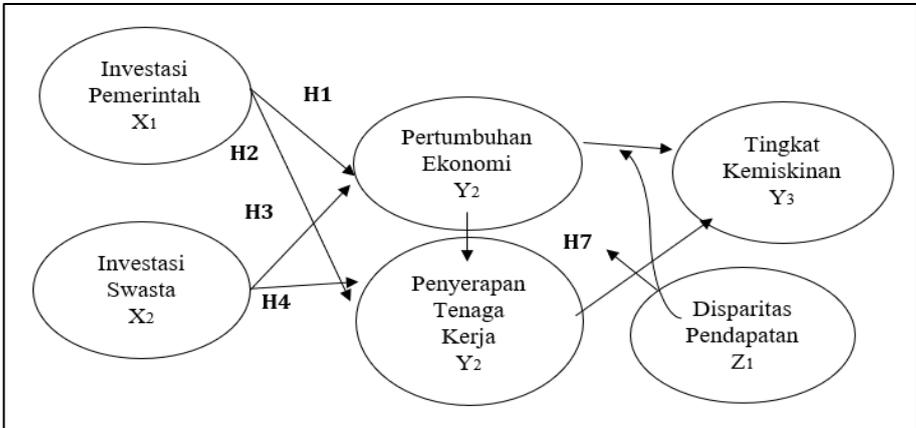
Kerangka konseptual menjelaskan pengaruh antar variabel yaitu variabel independent dan variabel dependent. Kerangka konseptual tersebut akan menghasilkan model struktural yang sangat bermanfaat sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis dan proses analisis data. Kerangka konseptual adalah kerangka teoritis yang menerangkan bagaimana hubungan antar variabel yang didukung oleh teori dan mempunyai pengaruh antara satu dengan lainnya yang dirumuskan dalam suatu model tertentu. Kerangka konseptual ini secara logis dirancang berdasarkan landasan teori dan hasil pengamatan dokumentasi dari riset sebelumnya yang pernah ditulis oleh para peneliti di berbagai tempat secara umum.

Kerangka konseptual ini mempunyai tujuan akhir yaitu untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Adam Smith (1965) dalam Skousen (2009) menjelaskan model kesuksesan ekonomi yang dikemukakan akan menghasilkan kekayaan universal yang akan sampai ke golongan rakyat

kebanyakan sekalipun, ia ingin merubah sistem yang menghasilkan kekayaan dan pertumbuhan yang nyata menuju perbaikan terhadap nasib orang awam.

Kemakmuran sebuah negara terjadi jika semua kebutuhan dan fasilitas untuk hidup tersedia dengan harga murah. Kuncinya pembuka kemakmuran Adam Smith dengan memberikan kebebasan alamiah kepada rakyat tanpa turut campur pemerintah. Kebebasan alamiah tidak hanya hak untuk membeli barang dimana saja, hak mendapat upah sesuai kemampuan pasar dan juga mencakup hak untuk menabung, berinvestasi dan mengumpulkan modal tanpa pembatasan pemerintah. Variabel investasi pemerintah dan investasi swasta merupakan dua variabel yang akan diuji hipotesisnya dengan berdasarkan teorinya Adam Smith.

Setelah menyusun dan menjelaskan kerangka proses berpikir di atas, akhirnya disusun kerangka konseptual melalui hubungan antara variabel eksogen yaitu Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta dan variabel endogen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Disparitas Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan. Kerangka konseptual tersebut seperti pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

Hubungan antar variabel menggunakan dasar teori dan kajian empiris. Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berdasarkan teori Keynes (Mankiw, 2006), Harrod - Domar (Arsyad, 2010), Solow - Swan (Arsyad, 2010). Keynes menjelaskan tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan kerja

menjadi full employment sehingga diperlukan kebijakan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui pengeluaran pemerintah, mendorong investasi dan konsumsi. Pembentukan pendapatan nasional (Y) tercipta melalui pengeluaran konsumsi masyarakat, investasi dan pengeluaran pemerintah. Investasi menurut Harrod-Domar selain menciptakan pendapatan juga memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok capital. Pendapat ini diperkuat oleh Solow - Swan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung ketersediaan faktor produksi yaitu antara lain akumulasi modal atau investasi (Arsyad, 2010).

Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja berdasarkan teori Adam Smith (Arsyad, 2010): Irawan, (2002), Rahardja (2008), Harrod-Domar dalam Arsyad (2010), dan Todaro (2000) yang menyimpulkan bahwa ketersediaan modal berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat output total (Y). Pengaruh langsung dengan penambahan modal/investasi sebagai input akan langsung meningkatkan output. Peningkatan kapasitas ekonomi memerlukan input yang lebih banyak dan salah satu input penting adalah tenaga kerja. Spesialisasi berpengaruh secara langsung dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga semakin besar investasi semakin besar kebutuhan tenaga kerja dan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja berdasarkan pendapatan Todaro melalui model makro output - kesempatan kerja yang berfokus pada hubungan antara akumulasi modal, pertumbuhan output industri dan penciptaan lapangan kerja. Model ini menggambarkan dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi maka dapat memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Menurut Harrod-Domar hasil kombinasi pemupukan tabungan dan akumulasi modal menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan didasarkan pada teori Kuznet (Todaro, 2000) yang secara garis besar menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan umum suatu bangsa indikatornya adalah nilai produk nasional bruto per kapita, semakin meningkat PNB per kapita semakin meningkat kesejahteraan dan berkurang tingkat kemiskinan. Seiring pendapat Adam Smith yang menyatakan manfaat kapitalisme bagi si miskin karena mereka mendapatkan

keuntungan dari sistem ekonomi liberal hal ini didukung studi oleh Lebergot (1976) dan Cox (1999) dalam Skousen, 2009: 30 menyatakan orang miskin juga bertambah kaya, standar hidup mereka meningkat secara substantive untuk semua golongan termasuk golongan miskin. Lebih lanjut Michael Cox menyimpulkan bahwa harga barang dan biaya hidup secara signifikan menurun.

Penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan berdasarkan teori Adam Smith dalam Pressman (2000), Marshall dalam Pressman (2000). Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi bisa berjalan karena proses mekanisasi dan pembagian kerja serta spesialisasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang akan menghasilkan kemakmuran terus menerus bagi mereka dan tingkat kemiskinan berkurang Marshall memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan melalui pasar tenaga kerja. Peningkatan kemakmuran berdampak terhadap tingkat upah yang tinggi, populasi meningkat maka persediaan tenaga kerja juga meningkat.

3.2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka proses berpikir serta kerangka konseptual maka disusunlah rumusan hipotesis sebagai berikut:

- H1. : Investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H2 : Investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H3 : Investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H4 : Investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H5 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- H6 : Pertumbuhan ekonomi dan dengan meratanya disparitas pendapatan sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

H7 : Penyerapan tenaga kerja dan dengan meratanya disparitas pendapatan sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB METODE PENELITIAN 4



4.1. Jenis dan Rancangan Penelitian

Dalam penelitian terdapat tiga tipe penelitian sosial yaitu penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatori. Rancangan penelitian ini menggunakan metode eksplanatori karena menjelaskan hubungan kausal antara variabel (variabel independen/eksogen dan variabel dependen/endogen) dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dan sekaligus penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini ada beberapa penjelasan mengenai variabel secara deskriptif.

4.2. Populasi, Sampel dan Teknis Pengambilan Sampel

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk time series tahunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Populasi sebagai keseluruhan unit analisis yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik (Singarimbun dan Effendi, 1995). Sementara Sugiono (2003) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Dapat disimpulkan bahwa populasi adalah pengambilan objek/subjek yang memiliki karakteristik tertentu secara lengkap.

Sampel (sampling) adalah menyeleksi bagian dari elemen - elemen populasi yang merupakan subjek dimana pengukuran itu dilakukan atau disebut unit penelitian (the unit of study) dalam Emory (1996). Populasi penelitian ini seluruh kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 13 kabupaten/kota.

Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan menggunakan populasi seluruh kabupaten/kota sebanyak 13 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan data time series dari tahun 2011-2015. Data cross section terdiri dari 13 kabupaten/kota sehingga merupakan panel data atau pooled the data yaitu gabungan antara data time series 5 tahun (2011-2015) dengan data cross section 13 kabupaten/kota.

Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS, Bappeda, dan SKPD/Instansi lainnya terkait

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan serta Bank Indonesia Banjarmasin periode waktu 2011-2015. Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena bersumber dari data sekunder, terdiri dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan diambil *crossing data* dalam 5 tahun secara *series* dan data yang dikumpulkan waktu pengumpulannya tidak tergantung waktu. Data investasi pemerintah dan investasi swasta diambil secara runtut waktu selama 5 tahun (2011-2015), sedangkan data pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan *time series* 5 tahun (2011-2015).

4.3. Variabel Penelitian

4.3.1. Klasifikasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang mempunyai variasi bermacam-macam nilai. Variabel pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal itu kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2008). Klasifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel endogen merupakan terdiri dari variabel *dependent/terikat* dan variabel antara (*intervening variable*) dan variabel eksogen merupakan variabel *independent/bebas*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) variabel sesuai dengan kerangka konseptual. Adapun klasifikasi variabel adalah

1. Variabel eksogen (*variable independen*) adalah *variable* yang tidak diprediksi oleh *variable* yang lain dalam model. Dalam penelitian ini yang diidentifikasi sebagai *variable independen* adalah: *variable* Investasi Pemerintah (X1) dan Investasi Swasta (X2).
2. Variabel Moderasi (*variable moderating*) adalah yang menghubungkan sebuah *variable independen* utama pada *variable dependen* yang dianalisis. Dalam penelitian ini yang diidentifikasi sebagai *variable moderasi* adalah *variable disparitas pendapatan*.
3. Variabel endogen (*variable dependen*) adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh satu atau beberapa variabel independen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y1), Penyerapan Tenaga Kerja (Y2) dan Tingkat Kemiskinan (Y3).

Klasifikasi dari lima variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 11
Klasifikasi Variabel

VARIABEL	INDIKATOR	SKALA
Variabel Eksogen/Bebas 1. Investasi Pemerintah 2. Investasi Swasta	1. Nilai Investasi yang ditanamkan pemerintah/tahun/kab/kota 2. Nilai Investasi yang ditanamkanswasta/tahun/kab/kota	Rasio
Variabel Moderating: 3. Disparitas Pendapatan	3. Persentase Perubahan nilai PendapatanPerkapita/pertahun/Kab/Kota	Rasio
Variabel Endogen/Terika: 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Penyerapan Tenaga Kerja 6. Tingkat Kemiskinan	4. Persentase perubahan nilai PDRB/per tahun/kab/kota 5. Jumlah Tenaga Kerja terserap /tahun/kab/kota 6. Persentase Penduduk Miskin/tahun/kab/kota	Rasio

4.3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan atas sifat- sifat dan kriteria yang dapat diamati dan diuji secara khusus yang mempunyai rujukan empiris, rincian dan prosedur yang harus jelas sehingga setiap orang yang kompeten apabila akan memakainya akan mengklasifikasikan objeknya dengan cara yang sama. (Cooper dan Emory, 1996).

Berdasarkan identifikasi variabel di atas maka dapat dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel yang diteliti adalah:

a. **Investasi Pemerintah (X1)**

Nilai investasi dalam satuan rupiah menggunakan definisi berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52 maka belanja modal berupa belanja barang dan

jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringannya dan aset tetap lainnya.

Menurut Permendagri No. 59 Th 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Th 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasar 52 belanja modal adalah belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja modal tersebut berupa belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, minuman, pakaian dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang dan jasa dan belanja lainnya yang sejenis.

Investasi Pemerintah adalah Belanja Modal yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Data Investasi Pemerintah (X_{t-1}) berupa belanja modal yang pengaruhnya dapat dilihat pada tahun berikutnya (lag) adalah bersumber dari APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan berbagai edisi dalam satuan rupiah.

b. Investasi Swasta (X2)

Investasi Swasta adalah investasi yang terealisasi dilakukan oleh swasta yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diinvestasikan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2011-2015 yang pengaruhnya dapat dilihat pada tahun berikutnya (lag) dinyatakan dalam satuan rupiah Sumber data dari Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan berbagai edisi.

c. Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

Variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha per tahun atas dasar harga konstan tahun 2000 selama kurun waktu penelitian 2011-2015 dalam satuan persen Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan menghitung persentase perubahan nilai PDB/PDRB suatu negara/daerah dalam suatu waktu dibandingkan dengan waktu sebelumnya PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa atau nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi (sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sector perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. Cara perhitungan atas dasar harga konstan ini telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dikatakan menunjukkan nilai riil (nyata). Perhitungan sederhana dapat dilihat pada rumus sederhana berikut ini:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi / Tahun} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100 \%$$

Keterangan : PDRB t adalah PDRB tahun ke -1
PDRB (t-1) adalah PDRB lag (t-1) atau
PDRB tahun sebelumnya

d. Penyerapan Tenaga Kerja (Y2)

Variabel penyerapan tenaga kerja pada studi ini adalah persentase jumlah tenaga kerja yang terserap pada setiap sektor ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan selama periode penelitian 2011-2015 yang diukur dalam jumlah orang. Tenaga kerja yang dimaksud adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinu dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan selama periode tahun 2011-2015 dalam satuan jiwa (orang).

e. Tingkat Kemiskinan (Y3)

Variabel tingkat kemiskinan berupa angka dalam persentase jumlah orang miskin berdasarkan data dari BPS setiap kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2011-2015 dalam jumlah jiwa (orang). Pengertian kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada di bawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada di bawah garis kemiskinan (poverty line). Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu besarnya rupiah, yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (setiap 2100 kalori/kapita/hari) dan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. Atas dasar kebutuhan minimal yang harus dicukupi untuk hidup maka di tentukan biaya garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS untuk memperkirakan jumlah dan persentase penduduk miskin.

f. Disparitas pendapatan (Z1)

Disparitas pendapatan merupakan kesenjangan distribusi pendapatan antara individu atau kelompok masyarakat pada masing-masing kabupaten/kota yang diproksi dengan nilai Indeks Gini dalam satuan decimal. Indeks Gini ini menggunakan pendapatan individu atau kelompok masyarakat sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat kemakmuran antar kelompok individu atau masyarakat.

4.4. Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilaksanakan pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menghimpun berbagai data dan informasi yang diterbitkan dan

dipublikasikan oleh lembaga, badan, dinas dan instansi terkait dengan kegiatan pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan data time series selama 5 tahun dari *tahun 2011-2015*. Sumber data dalam penelitian ini terutama dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi *Kalimantan Selatan*, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal provinsi Kalimantan Selatan (BKPMMD). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan serta instansi terkait lainnya.

4.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dan data cross section yang terdiri dari atas 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga merupakan pooled data yaitu gabungan antara data time series dengan data cross section.

4.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian baik eksogen maupun endogen. Statistik deskriptif dapat pula digunakan untuk memberikan informasi demografi responden dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata, median, dan standar deviasi.

4.5.2. Penggunaan SEM dalam Pengujian Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Analisis Jalur (Path Analysis), dengan bantuan perhitungan melalui Program SEM PLS (Statistic Program for Social Science). Pada penelitian ini, analisis jalur dikembangkan sebagai suatu metode untuk mempelajari tentang pengaruh secara langsung maupun tak langsung dari variabel eksogen/independen terhadap variabel endogen (dependen). Dalam penelitian ini tingkat kemandirian daerah terhadap variabel endogen-dependen, yaitu kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel endogen intervening yaitu; pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan.

Langkah-langkah analisis menggunakan persamaan struktural metode Analisis Jalur (Path Analysis), menurut Solimun (2010:115-135)

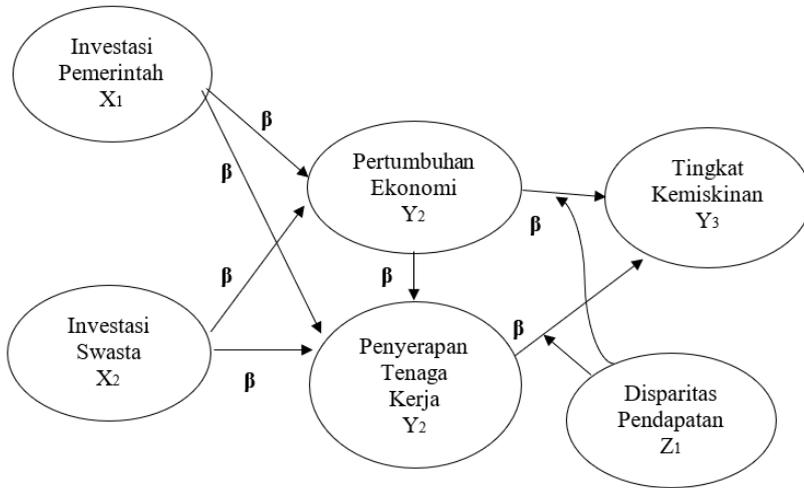
adalah sebagai berikut:

1. Langkah Pertama. Mengembangkan Model Hipotetik

Langkah pertama dalam analisis jalur (path analysis) adalah merancang model berdasarkan konsep dan teori. Model tersebut dinyatakan dalam bentuk Persamaan, sehingga akan membentuk sebuah sistem persamaan. Sistem persamaan tersebut disebut sebagai persamaan simultan, atau seringkali disebut juga sebagai model struktural. Model persamaan ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berbasis pada teori dan konsep. Karena itu model persamaan struktural ini dinamakan model hipotetik atau model konfirmatory. Model persamaan struktural yang dibuat terlihat dalam diagram jalur pada Gambar 4.1. Pengembangan model berbasis teori ini sudah dibahas dalam kerangka konseptual (tinjauan pustaka) dan hipotesis yaitu :

- a. Konstruk Eksogen (*exogenous constructs*) yang dikenal juga *source variable* atau *independent variable* yang tidak diprediksi oleh variabel dalam model. Variabel eksogen dalam model penelitian ini adalah :
 - 1) Investasi Pemerintah.
 - 2) Investasi Swasta.
- b. Kontruk Endogen (*endogenous constructs*) yaitu merupakan faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen yang lain. Konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen. Konstruk endogen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi.
 - 2) Penyerapan Tenaga Kerja.
 - 3) Ketimpangan Pendapatan.
 - 4) Tingkat kemiskinan.

Gambar pengembangan diagram jalur pada rancangan model penelitian ini terlihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Rancangan Model Penelitian

Dalam analisis jalur hubungan konstruk ditunjukkan oleh anak panah. Anak panah lurus menunjukkan sebuah hubungan kasual langsung antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Proses perhitungan koefisien dalam analisis jalur didekati melalui analisis regresi dengan variabel yang dibakukan (*standardized regression*). Komputasi model persamaan struktural dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_1 = \gamma_{11}X_1 + \gamma_{12}X_2 + \zeta_1$$

$$Y_2 = \gamma_{21}X_1 + \gamma_{22}X_2 + \beta_{21}Y_1 + \zeta_2$$

$$Y_3 = \gamma_{31}X_1 + \gamma_{32}X_2 + \beta_{31}Y_1 + \beta_{32}Y_2 + \zeta_3$$

$$Y_4 = \gamma_{41}X_1 + \gamma_{42}X_2 + \beta_{41}Y_1 + \beta_{42}Y_2 + \zeta_4$$

Dimana:

Y_1 adalah Pertumbuhan Ekonomi (persentase)

Y_2 adalah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)

Y_3 adalah Pendapatan per Kapita (persentase)

Y_4 adalah Tingkat kemiskinan (orang)

γ_{11} = Loading Faktor Variabel Eksogen Investasi

X_1 = Investasi Pemerintah (Rp)

γ_{12} = Loading Faktor Variabel Eksogen Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Investasi Swasta (Rp)

γ_{13} = Loading Faktor Variabel Eksogen Penyerapan Tenaga Kerja

X_3 = Penyerapan Tenaga Kerja (orang)

β_{31} = Regression Weight Variabel Endogen Perkembangan Ekonomi

Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi (persentase)

β_{31} = Regression Weight Variabel Endogen Penyerapan Tenaga Kerja

Y_2 = Penyerapan Tenaga Kerja (orang)

Y_3 = Pendapatan per Kapita (persentase)

$\zeta_{1,2,3}$ = Error Term

2. Langkah Kedua. Pemeriksaan/Uji Asumsi

Langkah kedua dari analisis jalur (path analysis) adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasinya. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam analisis jalur adalah bahwa di dalam model hubungan antar variabel adalah linear dan aditif. Bilamana asumsi ini tidak terpenuhi, maka ketika terjadi hasil yang tidak signifikan, akan membingungkan dalam melakukan interpretasi. Bisa jadi memang tidak ada pengaruhnya atau ada pengaruh, tetapi tidak linear. Jadi dengan demikian bisa mengakibatkan hasil penelitian menjadi bias. Asumsi linearitas dapat diperiksa dengan cara membuat diagram pencar (scatter diagram), namun hasilnya agak bersifat subyektif. Karena itu sering dilakukan melalui pengujian. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian dengan bantuan software SPSS adalah model linear, kuadrat, kubik, inverse, logaritmik, compound, growth, logistik, dan eksponensial. Rujukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip parsimony. Prinsip parsimony adalah bilamana model linear signifikan (tanpa harus memperhatikan model yang lain signifikan atau tidak signifikan) atau seluruh model yang digunakan dalam pengujian tidak signifikan, berarti model dikatakan linear.

3. Langkah Ketiga. Pendugaan/Perhitungan Koefisien Jalur

Analisis jalur (path analysis) dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui koefisien jalurnya yang dapat dihitung berdasarkan pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total. Untuk menghitung koefisien jalur, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi metode OLS (metode kuadrat terkecil), yang dilakukan pada masing-masing persamaan secara parsial.

Pertama : pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen, dan. pengaruh langsung variabel endogen intervening terhadap variabel endogen dependen. Pengukuran pengaruh langsung ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur yang ditunjukkan oleh nilai parameter/

koefisien α dan β dari masing-masing variabel berpengaruh langsung terhadap variabel yang dipengaruhi.

$$1. Y_1 \text{ it} = \alpha_{y_1} X \text{ it} + \alpha_{y_1} \varepsilon_1 \text{ it}$$

$$2. Y_2 \text{ it} = \alpha_{y_2} X \text{ it} + \alpha_{y_2} Y_1 \text{ it} + \alpha_{y_2} \varepsilon_1 \text{ it}$$

$$3. Y_3 \text{ it} = \alpha_{y_3} X \text{ it} + \alpha_{y_3 y_2} Y_2 \text{ it} + \alpha_{y_3} \varepsilon_3 \text{ it}$$

$$4. Y_4 \text{ it} = \alpha_{y_4} X \text{ it} + \alpha_{y_4 y_3} Y_3 \text{ it} + \alpha_{y_4} \varepsilon_4 \text{ it}$$

Kedua: Pengaruh tidak langsung antara variabel eksogen dengan endogen melalui variabel endogen lainnya. Pengukuran pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini adalah hasil perkalian koefisien (α dan β) dengan koefisien jalurnya adalah $\alpha_{y_3 y_1}$, $\alpha_{y_3 y_2}$ dan $\alpha_{y_4 y_3}$

Ketiga: Pengaruh total antara variabel eksogen dengan variabel endogen dilakukan dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung antara variabel yang dipermasalahkan. Dalam penelitian ini total efek X_1 (Investasi Pemerintah) dan X_2 (Investasi Swasta) terhadap Y_4 (Tingkat kemiskinan) diperoleh melalui penjumlahan pengaruh langsung X_1 dan X_2 terhadap Y_4 , yakni: $\alpha_{y_4 y_1}$ dan $\alpha_{y_4 y_2}$ dengan pengaruh tidak langsung X_1 dan X_2 terhadap Y_4 melalui Y_1 , Y_2 dan Y_3

4. Langkah Keempat. Pemeriksaan Validitas Model

Langkah keempat dalam analisis jalur adalah pemeriksaan validitas model. Sahih tidaknya suatu hasil tergantung dari terpenuhi atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa semua asumsi dipandang sudah terpenuhi, karena itu hasil analisis ini dianggap telah memenuhi asumsi, sehingga hasilnya valid. Salah satu indikator penting dalam analisis jalur adalah koefisien determinasi total. Interpretasi terhadap koefisien determinasi total ini adalah sama dengan interpretasi determinasi (R^2) pada analisis regresi. Koefisien determinasi total ini pada intinya mengukur seberapa besar keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model, dengan kata lain sejauh mana informasi yang terkandung dalam data dapat dijelaskan oleh model. Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan rumus: $R^2 \text{ model} = 1 - (1 - R^2_1) (1 - R^2_2) (1 - R^2_3)$. Dimana : R^2_i = Koefisien determinasi dari persamaan ke- i ($i = 1, 2, 3$) koefisien determinasi total berkisar antara 0 s/d 1 atau 0 % - 100 %. Model dengan koefisien determinasi total = 100 % dikatakan adalah model yang sempurna/*perfect*. Sedangkan model dengan koefisien determinasi total = 0 % adalah model yang salah. Oleh karena itu semakin besar nilai koefisien determinasi total berarti model semakin baik,

dan sebaliknya.

5. Langkah Kelima. Interpretasi Hasil Analisis

Langkah terakhir dalam analisis jalur adalah melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian. Interpretasi dilakukan terhadap jalur pengaruh langsung (*direct effect*). Kemudian interpretasi terhadap jalur pengaruh tak langsung (*indirect effect*) antar variabel dalam model. Selanjutnya interpretasi terhadap pengaruh total, yaitu jumlah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN



5.1. Deskripsi Daerah Penelitian

5.1.1. Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Selatan

Secara administratif Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin, terbagi dalam 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Kabupaten dan Kota tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Barito Kuala, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian masih berupa hutan, dan banyak dialiri oleh sungai besar dan kecil. Sungai-sungai tersebut antara lain adalah Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Balangan, Sungai Amandit, Sungai Negara, Sungai Batang Alai, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, dan lain sebagainya. Pada umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal di Pegunungan Meratus, dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makassar. Sebagian besar dari sungai-sungai tersebut masih menjadi sarana transportasi penduduk dan angkutan barang.

Berdasarkan luas wilayah, daerah yang mempunyai luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Kotabaru (25,11%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%). Sedangkan daerah yang wilayahnya terkecil adalah Kota Banjarmasin (0,19%) dan Kota Banjarbaru sebesar 0,97% (BPS Kalsel Dalam Angka 2013). Perkebunan yang telah ada dan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah karet, kelapa, cengkeh, kemiri, sagu, purun danau, kelapa sawit, coklat, kuli, manis. Selain itu Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar, meliputi perikanan darat maupun perikanan laut yang banyak dijumpai di kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan kabupaten Kotabaru. Hasil perikanan darat dan laut seperti udang, kepiting, ubur-ubur, kakap, sirip hiu, tongkol, dan sebagainya, umumnya di ekspor keluar negeri, terutama Jepang, dan Hongkong. Sementara flora dan fauna yang menjadi ciri khas Provinsi Kalimantan Selatan adalah buah Kasturi (*Mangifera casturi*), dan Bekantan (*Nasalis Larvatus*), yaitu jenis kera berhidung panjang/mancung, yang banyak dijumpai di sekitar hutan bakau perairan ambang Barito.

Provinsi Kalimantan Selatan juga mempunyai berbagai jenis tambang, seperti minyak tanah, emas, intan, batu semen, biji besi, dan batubara. Diantara jenis tambang tersebut, yang sudah banyak di ekspor adalah biji besi dan batubara. Potensi batubara menyebar di seluruh Kabupaten. Sumber daya alam, khususnya batubara banyak terdapat di Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru. Perusahaan terbesar yang mengeksploitasi batubara di Provinsi Kalimantan Selatan adalah PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, serta PT Bahari Cakrawala Sebuk. Deposit batubara Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai 1,8 milyar ton, dengan produksi rata-rata mencapai 12 juta ton pertahun (BPS Kalsel, 2015).

Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki potensi ekonomi dan perdagangan yang cukup baik dan prospektif Hal ini tidak terlepas dari letak geografisnya yang cukup strategis. berbatasan langsung dengan laut Jawa dan selat Sulawesi Sehingga menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang perdagangan bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang. Sarana tersebut diantaranya adalah bandara Syamsudin Noor di kota Banjarbaru, bandara Stagen di Kabupaten Kotabaru, bandara Warukin di Tanjung Kabupaten Tabalong, pelabuhan Tri Sakti di Banjarmasin, pelabuhan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu, pelabuhan Kotabaru di Kabupaten Kotabaru, serta pelabuhan samudera Tabonio di Kabupaten Tanah Laut.

5.1.2. Perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan

Salah satu indikator yang dapat memperlihatkan pemerataan kemampuan ekonomi wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah selama satu tahun. Melalui analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat diketahui aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu wilayah/daerah. Daerah yang

mempunyai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tinggi merupakan suatu indikasi bahwa kegiatan dan kemampuan daerah tersebut tinggi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

Kemampuan tersebut merupakan potensi yang memungkinkan daerah tersebut semakin berkembang. Meski demikian, perbedaan dalam menciptakan kemampuan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) antar Kabupaten/Kota tidak dapat langsung dibandingkan. Hal ini disebabkan kemampuan dalam menciptakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah luas wilayah dan jumlah penduduk. Semakin luas wilayah suatu Kabupaten/Kota, semakin besar pula kemungkinan menciptakan nilai tambah, demikian pula jika jumlah penduduknya lebih besar dibanding daerah lainnya.

Sampai akhir tahun 2015, kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan keadaan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan, dan pertumbuhan PDRB yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menjadi salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Tabel 5.1. di bawah ini, perkembangan PDRB terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 nilai PDRB Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan harga konstan adalah sebesar Rp.25.922.287,52. Kemudian pada tahun 2008, naik menjadi Rp. 27.538.452,00 atau meningkat sebesar 6,23 %. Selanjutnya tahun 2009 naik menjadi Rp. 29.051.631,00, atau meningkat sebesar 5,49 %. Tahun 2010 PDRB naik lagi menjadi sebesar Rp. 30.674.123,86,- atau meningkat sebesar 5,58 %. Pada tahun 2011 menjadi Rp. 32.552.849,54 atau naik sebesar 6,12 %. Pada tahun 2012 menjadi Rp. 34.413.316,67 atau naik 5,71%. Pada tahun 2013 menjadi Rp. 36.196.218,23 atau naik 5,18%. Tahun 2014 menjadi Rp. 38.125.476.41 atau naik 5,33%. Tahun 2015 menjadi Rp. 39.970.749,03 naik hanya 4,84% Secara keseluruhan selama periode tahun 2007-2015, rata-rata kenaikan PDRB mencapai 5,61 %.

Tabel 5.12
Perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2007 – 2015

Tahun	Nilai PDRB (Dalam Rp.)	Pertumbuhan (%)
2007	Rp. 25.922.287,52	6,01
2008	Rp. 27.538.452,00	6,23
2009	Rp. 29.051.631,00	5,49
2010	Rp. 30.674.123,86	5,58
2011	Rp. 32.552.849,54	6,12
2012	Rp. 34.413.316,67	5,71
2013	Rp. 36.196.218,23	5,18
2014	Rp. 38.125.476.41	5,33
2015	Rp. 39.970.749,03	4,84

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2016

5.1.3. Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa, jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan, apabila penduduk tersebut mempunyai kualitas yang baik. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1980, penduduk Kalimantan Selatan berjumlah 2.061.649 jiwa, kemudian pada tahun 1990 bertambah jumlahnya menjadi 2.596.647 jiwa, dan pada tahun 2000 jumlahnya meningkat menjadi 3.202.300 jiwa. Menurut Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan mencapai sebesar 3.626.616 jiwa, sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan mencapai sebesar Perkembangan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 1980 - 2010 disajikan dalam Tabel 5.2. berikut ini:

Tabel 5.2

*Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Dalam Jiwa)
Periode Tahun 1980 – 2015*

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk				
		1980	1990	2000	2010	2015
1	Kab Tanah Laut	122.929	183.397	265.100	296.333	324.283
2.	Kab Tanah Bumbu	-	-	-	267.929	325.115
3.	Kab Kotabaru	193.650	306.851	470.600	290.142	320.208
4	Kab Banjar	347.600	442.510	543.100	506.839	554.443
5.	Kab Tapin	108.573	126.625	142.400	167.877	181.778
6.	Kab Hulu Sungai Selatan	175.769	184.903	194.800	212.485	227.153
7.	Kab Hulu Sungai Tengah	200.426	220.750	233.900	243.460	260.292
8.	Kab Balangan	-	-	-	112.430	123.449
9.	Kab Hulu Sungai Utara	239.525	273.890	301.400	209.246	225.385
10.	Kab Tabalong	124.939	151.835	178.200	218.620	239.593
11.	Kota Banjarbaru	-	-	124.375	199.627	234.371
12.	Kab Barito Kuala	169.952	255.149	287.700	276.147	298.282
13.	Kota Banjarmasin	381.286	480.737	585.100	625.481	675.440
	Kalsel	2.064.649	2.596.647	3.202.300	3.626.616	3.989.793

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Berdasarkan Tabel 5.2. tersebut di atas terlihat, bahwa persebaran penduduk terkonsentrasi di Kota Banjarmasin (16,92%), Kabupaten Banjar (13,89%), Kabupaten Tanah Laut (8,12%), Kabupaten Kotabaru (8,02 %). Sedangkan sebaran penduduk di daerah lainnya masih di bawah 8%. Banyaknya penduduk yang tinggal di daerah tersebut di atas, tidak terlepas dari peran ketiga daerah ini dalam kegiatan perekonomian bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan bisnis dan perdagangan. Sedangkan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan

Kabupaten Kotabaru merupakan daerah penempatan transmigrasi dan Pertambangan seperti intan, biji besi, dan batubara, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Kabupaten Balangan merupakan pemekaran dari kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten pemekaran dan Kabupaten Kotabaru yang terbentuk berdasarkan SK Presiden RI tanggal 25 Februari 2003. Perkembangan pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 1980-2010 disajikan dalam Tabel 5.3 berikut ini:

*Tabel 5.3
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 1980 – 2015*

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pertumbuhan (Dalam %)				
		1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2015
1.	Kab Tanah Laut	5,21	4,08	4,45	2,51	1,72
2.	Kab Kotabaru	3,22	4,71	5,34	2,50	1,90
3.	Kab Tanah Bumbu	-	-	-	3,74	3,82
4.	Kab Banjar	2,20	2,44	2,27	2,08	1,72
5.	Kab Tapin	2,82	1,55	1,26	1,72	1,52
6.	Kab Hulu Sungai Selatan	0,66	0,51	0,54	0,85	1,28
7.	Kab Hulu Sungai Tengah	0,25	0,97	0,60	0,84	1,29
8.	Kab Hulu Sungai Utara	0,89	1,35	1,00	0,61	1,44
9.	Kab Tabalong	0,92	1,97	1,74	2,51	1,75
10.	Kab Balangan	-	-	-	1,59	1,82
11.	Kota Banjarbaru	-	-	-	4,84	3,10
12.	Kab Barito Kuala	3,16	2,85	1,28	1,14	1,48
13.	Kota Banjarmasin	3,38	2,34	2,17	1,70	1,46
Kalsel		2,16	2,32	2,33	1,98	1,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Berdasarkan Tabel 5.3 tersebut di atas, secara umum, pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan cukup tinggi, dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk secara nasional. Pada periode 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk mencapai sebesar 2,16%, sedikit lebih rendah daripada angka nasional yang besarnya mencapai 2,32%. Namun pada

periode berikutnya 1980-1990, pertumbuhan penduduk naik menjadi 2,32%, sementara laju pertumbuhan penduduk Indonesia hanya sebesar 1,97%. Sementara itu laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 (SP-2000) yang dilaksanakan oleh BPS, untuk periode 2000-2010 besarnya mencapai 1,49 % sedangkan laju pertumbuhan nasional sebesar 1,45 %. Pada periode 2010-2015 sebesar 1,48 % sedangkan pertumbuhan nasional 1,27%.

Relatif tingginya pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, tidak terlepas dari kedudukannya sebagai salah satu daerah penerima transmigrasi, di samping masih tingginya angka pertumbuhan alamiah. Sedangkan relatif rendahnya pertumbuhan penduduk pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah, karena faktor mobilitas penduduk, dimana penduduknya dikenal sebagai perantau. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, dapat menimbulkan berbagai masalah pembangunan. Masalah yang timbul dapat berupa terhambatnya usaha peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, baik berupa pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

5.1.4. Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan

Masalah ketenagakerjaan menjadi penting untuk dikaji lebih jauh. Hal ini disebabkan karena dampaknya yang cukup besar terhadap munculnya masalah sosial dan perekonomian di suatu daerah. Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Hal ini akan membawa dampak terhadap penyerapan angkatan kerja yang masuk dalam pasar kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, yang terus bertambah sejalan dengan penambahan penduduk.

Gambaran perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.4., dimana dalam tabel tersebut, terlihat bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang bekerja, tersebar di berbagai sektor/lapangan pekerjaan. Sektor/lapangan pekerjaan yang terbesar adalah sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan angkutan. Namun demikian sektor pertambangan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Tabel 15.4
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Kalimantan Selatan, Periode Tahun 2011-2015
(Dalam Jiwa)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian	834.685	867.042	901.423	937.973	974.533
pertambangan & Galian	66.497	69.497	77.876	76.395	74.914
Industri	127.743	128.742	129.847	131.059	132.271
Listrik & Air bersih	4.608	4.836	5.000	5.341	5.682
Bangunan	67.374	72.057	77.159	82.724	88.289
Perdagangan, Rest, Hotel	307.322	318.322	330.070	342.620	355.170
Pengangkutan & Komunikasi	95.633	98.800	102.132	105.641	109.150
Keuangan	11.209	11.907	12.664	13.487	14.310
Jasa-jasa	217.872	227.149	237.012	247.503	257.994
Jumlah	1.732.944	1.798.438	1.868.764	1.942.742	2.012.303

Sumber: Disnaker Trans Provinsi Kalsel, 2016

5.1.5. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan

Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan ini, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan faktor- faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang jasa (output), yang pada gilirannya proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk. Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan di suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2011 - 2015, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan terus bergerak positif. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 6,06 %. Kemudian meningkat menjadi sebesar 6,12 % pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan

selama rentang waktu 2011-2015 mengalami perkembangan yang cukup baik. Perkembangan pertumbuhan ekonomi secara sektoral disajikan dalam Tabel 5.5 berikut ini.

*Tabel 5.5
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Prov. Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)*

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	3,03	2,60	3,52	6,46	7,05
2.	Pertambangan & Galian	8,67	-2,55	1,01	0,88	-8,47
3.	Industri Pengolahan	3,23	3,24	3,16	6,83	7,62
4.	Listrik & Air bersih	8,02	0,69	-2,12	15,39	26,38
5.	Bangunan	7,01	2,86	3,36	8,29	8,70
6.	Perdagangan, Restoran & Hotel	7,32	5,70	3,35	6,70	7,27
7.	Pengangkutan & Komunikasi	6,52	4,54	6,03	8,15	6,60
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	6,71	8,12	5,12	6,02	5,42
9.	Jasa-jasa	9,44	3,27	3,42	8,99	9,34
Kalsel		8,25	1,96	3,07	5,28	3,23

Sumber : BPS : Provinsi Kalsel, 2016

Berdasarkan Tabel 5.5 tersebut di atas terlihat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 terjadi pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 9,44 %. Kemudian diikuti oleh sektor pertambangan & galian sebesar 8,67 %, dan sektor listrik & air bersih dengan pertumbuhan sebesar 8,02%. Sedangkan sektor pertanian mengalami perlambatan, dimana dalam tahun 2011 pertumbuhannya hanya mencapai sebesar 3,03 %. Berikutnya diikuti oleh sektor keuangan dan jasa perusahaan yang pertumbuhan pada tahun 2011 hanya mencapai 6,71 %. Pada tahun 2011 Sektor pertanian dan industri pengolahan tingkat pertumbuhannya hanya mencapai masing-masing 3,03 % dan 3,23 %.

5.2. Kondisi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

5.2.1. Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ibukotanya terletak di Pleihari. Secara geografis daerah ini terletak pada 114° 30 20 - 115° 23 31 Bujur Timur dan 3° 30 33 - 4° 11 38 Lintang Selatan., dengan luas sekitar 3.631,35 KM². Secara administratif terbagi dalam 135 Kelurahan/Desa, serta 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Penyipatan, Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kintap, Kecamatan Pleihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Bajuin.

Kabupaten Tanah Laut mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, terutama pengembangan sektor pertanian. Selain pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung dan palawija, juga sub sektor perkebunan antara lain, perkebunan karet, kelapa, dan kelapa sawit, serta buah-buah seperti semangka, melon. Para petani di Kabupaten Tanah laut ini, selain mengolah tanah pertanian, juga memelihara temak, khususnya sapi. Pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di samping memberikan nilai tambah terhadap komoditas tersebut, juga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Peluang lain di sektor pertanian adalah di sub sektor perikanan, selain sebagai petani, penduduk Kabupaten Tanah Laut juga bekerja sebagai nelayan serta pengembangan budidaya perikanan darat melalui kolam dan tambak, seperti udang, nila, patin. Bawal. Dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan ini dapat menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk menunjang perekonomian daerah, keberadaan infrastruktur khususnya jalan darat yang memadai lebih memudahkan masyarakat serta pelaku bisnis untuk berinteraksi, sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa. Akses jalan darat dapat dilakukan hingga mencapai wilayah provinsi Kalimantan Timur. Daerah ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung yang memadai, berupa listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, serta pelabuhan samudera Tabonio.

a. Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Laut

Proses pembangunan ekonomi, biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Perubahan struktur ini sebenarnya terjadi karena adanya interaksi antara 2 (dua) proses, yaitu, proses akumulasi (pembentukan modal) dan perubahan dalam konsumsi masyarakat. Hal ini adalah akibat adanya kenaikan dalam pendapatan perkapita masyarakat, dan perubahan pola permintaan.

Struktur perekonomian yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dan mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah merubah struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Guna mencapai hal tersebut dibutuhkan investasi yang cukup besar, dan perubahan teknologi. Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang, cukup sulit untuk melakukan hal tersebut.

Hal yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah mengidentifikasi keunggulan-keunggulan secara sektoral. Langkah selanjutnya adalah melakukan penguatan/revitalisasi terhadap sektor unggulan daerah, disertai dengan kebijakan lainnya, baik dibidang investasi maupun infrastruktur. Sehingga sektor-sektor unggulan tersebut dapat menjadi kekuatan penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Tanah Laut.

Memperhatikan peranan masing-masing sektor ekonomi, mempunyai peran penting dalam rangka penentuan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan sektor- sektor ekonomi di masing-masing daerah. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut selama rentang waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.6. Struktur perekonomian Kabupaten Tanah laut selama rentang waktu tahun 2011-2015, tidak menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian, masih didominasi oleh sektor-sektor, pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri pengolahan.

Tabel 5.6

Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	31,97	32,27	31,58	30,99	31,16
2.	Pertambangan & Galian	9,22	8,38	8,44	8,49	9,94
3.	Industri Pengolahan	19,15	19,01	19,54	20,06	16,31
4.	Listrik & Air bersih	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17
5.	Bangunan	2,31	2,13	2,23	2,33	2,33
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	23,65	24,97	24,69	24,37	24,52
7.	Pengangkutan & Komunikasi	1,81	1,87	1,86	1,85	1,76
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	3,64	3,39	3,46	3,52	3,85
9.	Jasa-jasa	8,11	7,83	8,04	8,24	9,96
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2016

b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dihitung dari perkembangan PDRB (Produk Domestik regional Bruto) atas dasar harga konstan. Melalui perkembangan PDRB harga konstan, tercermin pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu. Dalam hal ini pengaruh perubahan harga (inflasi) telah ditiadakan.

Laju pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menurut harga konstans tahun 2010, periode waktu 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.7. sebagai berikut:

Tabel 5.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	2,95	1,84	3,03	1,76	2,35
2.	Pertambangan & Galian	6,22	8,89	4,94	(0,91)	(2,22)
3.	Industri Pengolahan	9,98	5,11	4,67	4,64	4,34
4.	Listrik & Air bersih	6,86	6,96	5,83	18,14	25,30
5.	Bangunan	7,88	6,13	5,75	6,47	6,34
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,04	6,65	8,54	8,76	8,20
7.	Pengangkutan & Komunikasi	5,35	6,00	7,12	6,76	6,97
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	7,16	4,11	10,03	3,12	3,95
9.	Jasa-jasa	7,74	6,73	9,62	9,32	10,71
		5,26	5,82	6,56	6,65	7,82

Berdasarkan Tabel 5.7 terlihat bahwa selama rentang waktu tahun 2011 - 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut bergerak positif. Secara sektoral, dapat dilihat bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan dengan besaran yang berbeda-beda. Pada tahun 2015, sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 2,35 % Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2010 yang hanya mencapai sebesar 2,13%. Sedangkan sektor pertambangan & galian mengalami penurunan, dimana pada tahun 2010 mencapai sebesar 5,98% Tetapi pada tahun 2015 menurun mencapai sebesar (2,22 %).

Sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami penurunan yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 pertumbuhannya mencapai sebesar 4,34%, lebih tinggi dibanding tahun 2011, dimana pertumbuhannya mencapai sebesar 9,87% Sedangkan sektor jasa-jasa, pada tahun 2015 pertumbuhannya meningkat sebesar 10,71%, daripada tahun 2011 dengan pertumbuhan hanya sebesar 7,67%.

5.2.2. Kabupaten Tanah Bumbu

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak antara 2° 52' - 3° 47' Lintang Selatan dan U5° 15' - 116° 04' - Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu terletak di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Luas wilayah

Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 5.066,96 KM² Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Satui, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Mentewe, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Angsana. Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Bumbu adalah pertambangan, khususnya batubara serta perikanan laut. Selain itu, Kabupaten Tanah Bumbu juga mempunyai potensi yang baik terhadap pengembangan sektor perkebunan karet dan kelapa sawit, peternakan khususnya sapi, serta budidaya perikanan darat. Dalam budidaya perikanan darat, tidak hanya mengembangkan budidaya udang, patin, bawal melalui sistem tambak, tetapi juga pengembangan budidaya ikan lokal seperti gabus dan papuyu (ikan betok)

a. Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu

Besaran nilai PDFB (Produk Domestik Regional Bruto) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah (value added) bruto yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Struktur ekonomi menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah (Value Added) yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi. Melihat kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB (Produk Regional Domestik Bruto), maka dapat diketahui seberapa besar peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah bersangkutan. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu selama kurun waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.8 berikut ini:

Tabel 5.8
Perkembangan Ekonomi Sektoral
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011-2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	16,08	14,90	15,60	16,20	17,10
2.	Pertambangan & Galian	42,88	50,90	48,30	46,00	41,10
3.	Industri Pengolahan	7,22	6,00	6,40	6,70	7,40
4.	Listrik & Air bersih	0,23	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Bangunan	5,19	5,10	5,40	5,50	6,10
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	10,32	11,30	10,50	11,30	12,40
7.	Pengangkutan & Komunikasi	13,24	6,60	8,20	8,40	8,80
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	1,32	1,20	1,30	1,40	1,50
9.	Jasa-jasa	3,64	3,90	4,20	4,40	5,50
		100,00	100	100	100	100

Sumber : BPS : Kabupaten Tanah Bumbu, 2016

Berdasarkan Tabel 5.8, terlihat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, dimana struktur perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu didominasi oleh sektor-sektor pertambangan & galian, pertanian, pengangkutan, perdagangan, dan sektor industri pengolahan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor pertambangan & galian peranannya terus meningkat. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu, mengingat sektor pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dimasa mendatang, apabila tidak segera ditangani secara baik.

b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dihitung berdasarkan perkembangan PDRB (Produk Domestik regional Bruto) atas dasar harga konstan Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, disajikan dalam Tabel 5.9. berikut ini:

Tabel 5.9

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Th. 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	6,93	3,20	8,20	5,90	5,90
2.	Pertambangan & Galian	7,76	7,20	(0,3)	1,60	(0,4)
3.	Industri Pengolahan	2,93	8,10	10,50	5,30	4,60
4.	Listrik & Air bersih	2,62	11,10	14,80	15,50	25,40
5.	Bangunan	5,06	6,70	5,80	0,90	3,70
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,80	5,20	8,40	7,60	7,80
7.	Pengangkutan & Komunikasi	6,74	6,70	6,90	6,40	6,70
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	7,22	8,30	8,80	8,70	8,00
9.	Jasa-jasa	8,43	11,00	11,70	14,9	16,50
Tanah Bumbu		6,58	6,30	3,80	3,60	3,00

Sumber: BPS : Kabupaten Tanah Bumbu, 2016

Selama rentang waktu tahun 2011-2015, kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kinerja yang cukup baik terutama sampai dengan tahun 2015. Semua sektor ekonomi tumbuh secara positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 mencapai sebesar 6,58%. Angka ini meningkat dibanding tahun 2011 yang besarnya hanya mencapai sebesar 6,45%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 8,43%.. Kemudian diikuti oleh sektor pertambangan & galian sebesar 7,76%, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan sebesar 7,22%. Berikutnya adalah sektor pertanian sebesar 6,93%, dan sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 6,80 %. Namun menurun semenjak tahun 2013.

Sementara itu, angka pertumbuhannya sektor-sektor lainnya masih di bawah 6% pertahun. Namun demikian pertumbuhan sektor pertanian 1,2% lebih cepat dibanding tahun 2011. Percepatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi pada sub-sektor perkebunan dan perikanan. Keadaan ini cukup menggembirakan, mengingat perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu sampai sekarang masih bertumpu pada sektor pertambangan & galian. Sektor ini merupakan *leading* sektor bagi Kabupaten Tanah Bumbu.

Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak lagi terlalu menggantungkan perekonomiannya kepada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Secara ekonomi, dalam jangka pendek keunggulan komparatif yang dimiliki berupa Batubara akan menguntungkan perekonomian daerah. Namun perlu diingat bahwa sumber daya alam berupa batubara tersebut adalah sumberdaya/*resources* yang tidak dapat diperbaharui keberadaannya. Eksploitasi secara besar-besaran dapat merusak lingkungan bila tidak ditangani secara baik.

5.2.3. Kabupaten Kotabaru

Posisi Kabupaten Kotabaru terletak disisi tenggara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan titik koordinat diantara $2^{\circ} 20' - 4^{\circ} 56'$ Lintang Selatan, dan $115^{\circ} 29' - 116^{\circ} 30'$ Bujur Timur, dengan ibukotanya Kotabaru. Secara geografis, kabupaten Kotabaru mempunyai wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu kurang lebih 9.442,46 KM. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau tersebut diantaranya adalah Pulau Laut, Pulau Sebuku, Pulau Kunyit, dan Pulau Sewangi Kabupaten Kotabaru terbagi dalam 20 Kecamatan dan 195 Desa/Kelurahan. Kabupaten Kotabaru terletak berada pada posisi persilangan negara Republik Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik. Sehingga Kabupaten Kotabaru potensial menjadi alternatif pintu gerbang transit yang sangat efisien bagi lalulintas perdagangan internasional kawasan Asia Pasifik.

a. Perkembangan Penduduk di Kabupaten Kotabaru

Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari daya tarik Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam (batubara) yang besar di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sensus tahun 1980 jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru mencapai sebesar 193.650 jiwa. Kemudian pada sensus tahun 1990 jumlahnya meningkat menjadi 306.851 jiwa. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk selama periode 1980-1990 mencapai sebesar 4,71 % pertahun. Angka pertumbuhan penduduk tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia, yaitu masing-masing 2,32 % dan 1,98 % pertahunnya. Karena itu, jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru terus bertambah sejalan dengan masih tingginya angka

pertumbuhan penduduknya.

Pada Sensus Penduduk tahun 2000, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru mengalami peningkatan, sehingga jumlahnya mencapai 470.600 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,34 % pertahunnya. Angka pertumbuhan penduduk sebesar 5,34 % ini melebihi rata-rata angka pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang besarnya mencapai 2,33 %. Angka pertumbuhan tersebut melebihi angka pertumbuhan penduduk Indonesia yang besarnya hanya mencapai 1,49 % pertahunnya. Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotabaru, tidak terlepas dari daya tarik pertambangan batubara, dan juga disebabkan karena daerah ini merupakan salah satu daerah penerima Program Transmigrasi bagi Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Perkembangan PDRB Kabupaten Kotabaru

Kondisi perekonomian Kabupaten Kotabaru, secara umum dapat digambarkan melalui beberapa indikator ekonomi makro seperti misalnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada perekonomian suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto. Perkembangan besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Kota baru Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 8 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.10. berikut ini:

Tabel 5.10
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Kotabaru Menurut Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Nilai PDRB (Dalam Rp.)	Pertumbuhan (%)
2011	Rp. 5.196.138,76	-
2012	Rp. 5.539.083.91	6,6
2013	Rp. 5.827.116.27	5,2
2014	Rp. 6.095.163.34	4,6
2015	Rp. 6.284.113,06	3,1

Sumber : BPS : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2016

Jika diperhatikan secara seksama dari besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), maka Kabupaten Kotabaru memiliki potensi ekonomi yang relatif cukup besar bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Kotabaru antara lain sumber daya alam berupa batubara, biji besi dan minyak, di samping sumber daya kelautan berupa ikan laut dan sumber daya hayati lainnya. Bahkan meskipun 5 (lima) Kecamatan, yaitu Satui, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Sungai Loban, dan Batulicin yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kotabaru.

Sejak tanggal 23 Februari 2003 telah berdiri sendiri menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata PDRB Kabupaten Kotabaru masih yang terbesar sumbangannya terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2011 nilai PDRB Kabupaten Kotabaru mencapai sebesar Rp. 5.196.138,76 Kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 5.539.083,91. Selanjutnya pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 5.827.116,27 atau bertambah sebesar 5,20%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 6.095.163,34 atau naik sebesar 4,60%, dan selanjutnya pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp. 6.284.113,06. (BPS : 2016).

c. Struktur Ekonomi Kabupaten Kotabaru

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diukur dari peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Semakin besar nilai tambah (*value added*) yang tercipta pada suatu sektor ekonomi, akan membuat peranan sektor tersebut semakin penting. Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator apakah daerah bersangkutan didominasi oleh sektor primer, sekunder atau tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam (SDA) dalam proses produksi, yaitu sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan galian.

Sedangkan sektor sekunder merupakan sektor yang sudah tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya alam (SDA), tetapi sudah mengandalkan kemajuan teknologi dan peran Sumber daya Manusia (SDM). Adapun yang termasuk sektor ini adalah sektor industri pengolahan/manufaktur, listrik & air, serta konstruksi. Selanjutnya sektor tersier adalah merupakan sektor yang bisa dikatakan sudah tidak mengandalkan sumber daya alam lagi. Sektor-sektor tersebut adalah sektor Perdagangan, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor Bank dan

lembaga keuangan, serta sektor jasa-jasa.

Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2015 memperlihatkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru masih didominasi oleh 4 (empat) sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi dimaksud adalah sektor pertanian dengan kontribusi dalam perekonomian mencapai sebesar 19,16%. Selanjutnya sektor pertambangan & galian, dengan kontribusi sebesar 24,64%.

Sementara itu kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai sebesar 9,84%. Berikutnya adalah sektor industri pengolahan pengangkutan dan komunikasi, dengan kontribusi mencapai sebesar 32,03%. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru selama rentang waktu 9 (sembilan) tahun, yaitu antara tahun 2011 sampai dengan 2015 disajikan dalam Tabel 5.11 sebagai berikut:

*Tabel 5.11
Perkembangan Ekonomi Sektoral
Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)*

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	20,35	19,68	19,55	19,72	19,16
2.	Pertambangan & Galian	25,32	25,48	25,25	23,98	24,64
3.	Industri Pengolahan	32,37	32,53	32,13	32,15	32,03
4.	Listrik & Air bersih	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
5.	Bangunan	4,55	4,57	4,64	4,84	4,89
6.	Perdagangan, restoran &	8,67	9,06	9,28	9,82	9,84
7.	Hotel Pengangkutan &	0,39	0,39	0,39	0,41	0,44
8.	Komunikasi Keuangan,	1,88	1,86	1,88	1,97	1,94
9.	Persewaan & Jasa Prsh Jasa-jasa	6,30	6,34	6,79	7,02	6,95
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan Tabel 5.11 dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru masih didominasi oleh sektor primer, yaitu suatu sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam (SDA) dalam proses produksi. Sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam

kategori ini adalah sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan & galian, dengan persentase nilai tambah mencapai sebesar 56,67%. Secara khusus lagi Kabupaten Kotabaru merupakan daerah agraris. Hal ini disebabkan oleh peranan sektor pertanian yang masih dominan.

Pada tahun 2015 kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Kotabaru mencapai sebesar 32,03%. Sektor lain yang cukup tinggi kontribusinya dalam perekonomian adalah sektor pertambangan & galian mencapai sebesar 24,64 %, dan sektor pertanian dengan kontribusinya dalam *perekonomian* mencapai sebesar 19,16 %.

5.2.4. Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar berada pada posisi 2° 49' 55 - 3° 43' 38" Lintang Selatan dan di antara 114° 30' 20" -115° 35 37' Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai ± 4.688 KM². Kabupaten Banjar mempunyai batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin. Kota Martapura di samping sebagai kota kabupaten, dikenal pula sebagai kota "Serambi Mekkah" Kalimantan Selatan. Di Kabupaten ini tersebar beberapa madrasah dan Pondok Pesantren. Salah satu Pesantren yang cukup dikenal adalah Darussalam. Kota Martapura, pada masa lalu merupakan pusat kerajaan Banjar, salah satu raja Banjar yang dikenal sebagai penentang penjajah Belanda adalah Pangeran Hidayatullah. Selain itu Kota Martapura merupakan tempat kelahiran ulama terkenal Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari.

a. Struktur Ekonomi Kabupaten Banjar

Struktur perekonomian Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2015 masih bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian kabupaten Banjar mencapai sebesar 21,60%. Sedangkan sektor lainnya yang juga mempunyai kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian hotel dengan kontribusi mencapai sebesar 17,60%. Kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dengan kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Banjar mencapai sebesar 15,04%.

Selanjutnya sektor bangunan dengan kontribusi sebesar 9,53%.

Sedangkan sektor-sektor lainnya, seperti sektor industri pengolahan, pengangkutan & komunikasi, serta keuangan, kontribusinya dalam perekonomian kabupaten Banjar masih di bawah 10%. Bahkan sektor listrik & air bersih, kontribusinya hanya mencapai sebesar 0,32%. Struktur perekonomian suatu daerah dapat diukur dari peranan/kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Struktur perekonomian menjadi salah satu indikator terhadap kemajuan daerah. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.12 berikut ini.

*Tabel 5.12
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2011 – 2015 (Dalam %)*

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	19,30	18,86	18,65	18,16	17,78
2.	Pertambangan & Galian	23,71	24,09	23,06	22,57	21,60
3.	Industri Pengolahan	6,72	6,68	6,66	6,63	6,57
4.	Listrik & Air bersih	0,29	0,28	0,29	0,29	0,32
5.	Bangunan	9,10	9,11	9,20	9,29	9,43
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,69	6,77	6,98	7,09	7,24
7.	Pengangkutan & Komunikasi	3,29	3,27	3,32	3,45	3,59
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	5,33	5,32	5,50	5,52	5,56
9.	Jasa-jasa	14,21	14,01	14,28	14,52	15,04
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS : Kabupaten Banjar, 2016

Berdasarkan Tabel 5.12 di atas, terlihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2011-2015 masih didominasi oleh 4 (empat) sektor ekonomi, yaitu sektor pertambangan & galian, pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor bangunan. Secara umum sampai dengan tahun 2015, struktur perekonomian Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan belum menunjukkan perubahan yang cukup berarti, dibandingkan dengan

tahun-tahun sebelumnya. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi paling besar dalam menciptakan nilai tambah (vare added) bagi perekonomian kabupaten Banjar ini adalah sektor pertambangan & galian mencapai sebesar 21,60%. Disusul kemudian oleh sektor pertanian dengan kontribusinya mencapai sebesar 17,78%. Berikutnya adalah sektor jasa-jasa kontribusi mencapai sebesar 15,04%, dan sektor bangunan 9,43% Sektor-sektor lainnya juga mempunyai peranan di dalam pembentukan nilai tambah, namun peranannya masih belum berarti atau rendah.

b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah/daerah adalah dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dihitung dari perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan, karena semata-mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode waktu tertentu. Dalam hubungan ini pengaruh perubahan harga telah diabaikan.

*Tabel 5.13
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Tahun 2010*

Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	6,86	4,30	5,41	7,52	9,39
2.	Pertambangan & Galian	26,44	3,05	(1,07)	2,76	(7,85)
3.	Industri Pengolahan	9,38	8,43	4,65	10,29	8,79
4.	Listrik & Air bersih	6,22	2,36	3,41	32,82	59,57
5.	Bangunan	7,04	4,36	11,15	13,15	11,91
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	13,19	12,15	10,50	14,70	11,46
7.	Pengangkutan & Komunikasi	10,85	7,00	13,68	11,36	8,77
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Jasa-jasa	19,20 6,93	10,52 3,23	15,60 4,02	8,59 16,62	9,06 13,12
Kabupaten Banjar		13,24	6,09	6,40	9,55	7,03

Sumber: BPS : Kabupaten Banjar, 2016

Untuk melihat fluktuasi yang terjadi pada perekonomian Kabupaten Banjar secara riil, maka perlu disajikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan secara berkala dan berkelanjutan. Perkembangan pertumbuhan **ekonomi** Kabupaten Banjar selama rentang waktu tahun 2007-2015, disajikan dalam Tabel 5.13. Sesuai dengan Tabel 5.13 di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar cukup baik. Selama kurun waktu 2011-2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar terus bergerak positif. Pada tahun 2007 pertumbuhannya mencapai sebesar 6,40%. Sementara pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 6,06%. Kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan Kabupaten Banjar mencapai 7,03%, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 6,12%. Secara sektoral, semua sektor ekonomi pertumbuhannya bergerak secara positif, meskipun terjadi kenaikan dan penurunan dalam laju pertumbuhannya. Sektor pertanian mengalami peningkatan dari 3,71% pada tahun 2011 menjadi 9,39% pada tahun 2015. Sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami kenaikan.

5.2.5. Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayahnya mencapai 2.700,82 KM². Kabupaten Tapin secara administratif terbagi dalam 12 (dua belas) Kecamatan, dengan 131 (seratus tiga puluh satu) kelurahan/desa. Berdasarkan letak geografisnya berada di jalur utama lalu lintas antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, serta antar Provinsi khususnya menuju ke Provinsi Kalimantan Timur. Potensi ekonomi yang penting di Kabupaten Tapin meliputi sektor pertambangan khususnya batubara, serta perkebunan karet dan kelapa sawit

a. Perkembangan PDRB Kabupaten Tapin

Kondisi perekonomian Kabupaten Tapin, dilihat melalui Produk Domestik *Regional* Bruto (PDRB). secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu daerah dalam periode waktu tertentu Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah

dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Perkembangan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Tapin selama rentang waktu 2011- 2015, disajikan dalam Tabel 5.14.

Tabel 5.14
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapi
Menurut Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2011 - 2015

Tahun	Nilai PDRB (Dalam Rp. Juta)	Pertumbuhan (%)
2011	Rp. 1.057.862.504	5,27
2012	Rp. 1.124.719.414	6,32
2013	Rp. 1.187.366.285	5,75
2014	Rp. 1.251.959.010	5,44
2015	Rp. 1.302.663.349	4,05

Sumber : BPS : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2016

Jika dilihat dari besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Tapin telah mencapai sebesar Rp. 1.302.663.349 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,05%. Keadaan ini menurun jika dibanding dengan keadaan tahun 2011, dimana nilai PDRB hanya mencapai Rp. 1.057862.505, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,27%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tapin mempunyai kinerja yang kurang baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pergerakan dari laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Hal ini sangat berguna dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapin di masa mendatang.

b. Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin

Struktur ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungannya terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor ekonomi. Dalam hubungan ini, struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi. Melihat kontribusi masing-masing sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), maka akan dapat diketahui peranan suatu sektor ekonomi dalam menunjang perekonomian suatu

daerah. Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Tapin selama rentang waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.15.

*Tabel 5.15
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Tahun 2000
Periode Tahun 2007 - 2015 (Dalam %)*

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	20,48	20,88	19,68	19,65	19,94
2.	Pertambangan & Galian	35,18	34,76	36,99	36,52	34,89
3.	Industri Pengolahan	8,02	7,78	6,44	6,33	6,31
4.	Listrik & Air bersih	0,36	0,35	0,35	0,34	0,37
5.	Bangunan	5,03	5,07	5,01	5,01	5,11
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	7,31	7,54	7,62	7,90	8,20
7.	Pengangkutan & Komunikasi	8,16	8,19	8,34	8,5	8,81
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	2,36	2,38	2,45	2,44	2,45
9.	Jasa-jasa	13,1	13,26	13,14	13,31	13,92
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS : Kabupaten Tapin, 2016

Berdasarkan Tabel 5.15 terlihat bahwa kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB (Produk Domestik Bruto) Kabupaten Tapin selama kurun waktu 2011-2015 masih didominasi oleh 4 (empat) sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor pertambangan & galian, sektor jasa-jasa, dan sektor perdagangan, restoran dan hotel. Sampai dengan tahun 2015, kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Tapin mencapai sebesar 19,94%. Sedangkan sektor pertambangan & galian kontribusinya mencapai sebesar 34,89%. Kemudian sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 13,92%, serta sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 8,20%. Sementara kontribusi sektor lainnya masih di bawah 8%.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan pergeseran yang cukup berarti, dari perekonomian agraris menuju sektor industri dan jasa. Meskipun pada tahun 2015 sektor industri dan jasa menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya.

5.2.6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara geografis terletak antara 02° 29' 58" - 02° 56' 10" Lintang Selatan, dan antara 114° 51' 19" - 115° 36' 19" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 1.804,94 KM². Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai potensi besar untuk pengembangan berbagai komoditas perkebunan, seperti kelapa dalam, kelapa sawit, karet, kakao/coklat, kulit manis, dsb. Sedangkan industri yang dikembangkan berupa industri pembuatan roda kapal, alat-alat pertanian, kerajinan imitasi yang terbuat dari tembaga dan perak, serta industri makanan.

a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan cerminan pencapaian kinerja perekonomian pada suatu periode waktu tertentu terhadap kinerja periode waktu sebelumnya. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting bagi perencanaan terutama dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangat tergantung pada potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, baik sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM), serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja cukup baik. Sampai tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 5,90% pertahun. Angka ini meningkat dibanding tahun 2011, dimana angka pertumbuhan adalah sebesar 5,77% pertahun. Perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terus membaik ini, tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan yang terus membaik, sehingga sangat menunjang perkembangan perekonomian kabupaten/kota. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) selama rentang waktu 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.16 berikut ini.

Tabel 5.16

*Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2000
Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)*

No	Sektor Ekonomi	T a h u n				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	4,53	2,96	5,12	5,40	8,16
2.	Pertambangan & Galian	13,23	(2,25)	0,60	1,17	(8,22)
3.	Industri Pengolahan	6,44	3,63	2,88	6,92	8,52
4.	Listrik & Air bersih	(1,34)	(0,48)	(0,69)	16,87	32,12
5.	Bangunan	4,80	0,94	3,85	8,76	9,11
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,28	5,57	5,22	6,50	6,27
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,06	5,06	9,36	15,00	11,32
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	18,60	16,58	11,79	24,88	12,81
9.	Jasa-jasa	21,34	15,98	21,14	27,54	37,14
Hulu Sungai Selatan		5,77	3,27	4,38	5,88	5,90

Sumber: BPS : Kabupaten HSS, 2016

Dilihat secara sektoral, pertumbuhan sektor listrik dan air bersih pada tahun 2015 cukup tinggi, yakni mencapai sebesar 32,12%. Selanjutnya pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor jasa yaitu sebesar 37,14%. Sedangkan sektor Keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan pertumbuhannya hanya mencapai sebesar 12,81%,. Sementara sektor pertanian angka pertumbuhannya Sebesar 8,16%, dan sektor perdagangan, restoran dan hotel mencapai sebesar 6,27%.

b. Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Secara umum, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2015 mencapai 8,16%. Melihat kontribusi ini berarti meningkat dibanding kontribusi sektor pertanian tersebut tahun 2011 yang kontribusinya mencapai sebesar 4,53%. Meskipun demikian, selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015 disajikan dalam Tabel 5.17.

Tabel 5.17
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hss Provinsi Kalimantan Selatan Menurut
Harga Konstan Tahun 2000
Periode Tahun 2011 -2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	30,80	29,65	27,51	27,02	27,07
2.	Pertambangan & Galian	6,66	7,60	9,41	9,27	8,41
3.	Industri Pengolahan	8,65	8,46	8,05	7,96	8,03
4.	Listrik & Air bersih	0,43	0,41	0,39	0,40	0,43
5.	Bangunan	8,01	7,87	7,79	7,94	8,12
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	8,91	9,12	9,25	9,31	9,23
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,97	12,85	12,89	13,11	13,03
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	4,43	4,52	4,69	4,77	4,64
9.	Jasa-jasa	19,15	19,53	20,02	20,23	21,04
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016

Berdasarkan Tabel 5.17 tersebut, dapat dikatakan bahwa peranan/kontribusi sektor pertanian masih mendominasi dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2011, sektor pertanian memberikan kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai sebesar 30,80%, dan kemudian pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian tersebut mencapai sebesar 27,07%. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya yang telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sektor jasa dengan kontribusi sebesar 21,04% pada tahun 2015. Kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,03%, perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi mencapai sebesar 9,23%, dan industri pengolahan sebesar 8,03%.

5.2.7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, secara geografis terletak antara 2° 27' - 2° 46' Lintang Selatan dan antara 115°5' - 115° 31' Bujur Timur. Luas wilayah mencapai 1.472 KM², yang terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai julukan “Parijs van Borneo”. Selain itu juga, kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu pusat industri kecil kosmetika tradisional, industri jamu, dan industri kopiah haji yang sudah di ekspor ke beberapa negara, diantaranya Brunei Darussalam, Malaysia, serta negara-negara timur tengah khususnya Arab Saudi dan Yaman. Salah satu komoditas unggulan sektor pertanian di kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah padi dan karet. Barabai sebagai ibukota kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sebagai kota transit menuju kota-kota lain di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, memberikan harapan bagi pengembangan sektor jasa. Dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana diantaranya jalan darat, air bersih, perbankan, serta telekomunikasi.

a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dihitung berdasarkan perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. Hal ini karena mengabaikan pengaruh perubahan harga, dan semata-mata dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode waktu tertentu. Untuk melihat fluktuasi perekonomian secara riil, maka perlu disajikan PDRB harga konstan secara berkala.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.18. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2011-2015 terlihat mengalami perkembangan yang positif. Bahkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai sebesar 6,12 %. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2011 yaitu hanya sebesar 5,98 %. Dilihat secara sektoral, maka terlihat, bahwa sektor jasa-jasa mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya sangat kecil yaitu hanya sebesar 3,49 %, sehingga sektor jasa-jasa pada tahun 2015 tumbuh sebesar 30,33 %. Sedangkan sektor-sektor lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Tabel 5.18
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2000
Periode Tahun 2011 -2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	5,57	1,59	5	3,59	4,99
2.	Pertambangan & Galian	6,37	10,04	6,12	6,43	5,86
3.	Industri Pengolahan	4,70	4,91	4,56	4,46	2,04
4.	Listrik & Air bersih	11,72	11,85	8,74	25,06	37,74
5.	Bangunan	6,43	5,65	5,05	6,54	7,33
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	7,02	7,66	6,76	7,05	9,37
7.	Pengangkutan & Komunikasi	20,55	18,41	21,12	19,97	21,89
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	17,11	19,81	27,02	18,36	15,22
9.	Jasa-jasa	26,84	24,86	24,89	27,95	30,33
Hulu Sungai Tengah		5,98	4,85	5,83	5,56	6,12

Sumber : BPS Kabupaten HST, 2016

b. Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara umum, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun waktu tahun 2011-2015 masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai sebesar 25,53%. Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama rentang waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.19 berikut ini:

Tabel 5.19
Perkembangan Ekonomi Sektor Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2000
Periode Tahun 2011 – 2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	27,96	26,54	29,09	25,74	25,53
2.	Pertambangan & Galian	0,68	0,71	0,72	0,72	0,74
3.	Industri Pengolahan	15,98	15,70	15,48	15,52	15,07
4.	Listrik & Air bersih	0,59	0,58	0,56	0,58	0,50
5.	Bangunan	8,47	8,46	8,37	8,45	8,64
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	9,52	9,79	9,96	10,01	10,20
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,39	12,10	12,60	12,69	12,41
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	5,32	5,49	5,68	5,70	5,51
9.	Jasa-jasa	19,38	20,19	20,52	20,61	21,31
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

Berdasarkan Tabel 5.19, terlihat bahwa sektor-sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah, sektor jasa-jasa, dengan kontribusi mencapai 21,31%. Kemudian sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi mencapai sebesar 10,20%, dan kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 15,07%. Sedangkan sektor-sektor lainnya mempunyai kontribusi di bawah 10%.

5.2.8. Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan terletak di bagian utara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan berada pada titik koordinat 114° 50- 24" sampai 115° 50' 24" Bujur Timur serta 2° 25' 58" Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Balangan ± 1.878,30 KM Secara administratif wilayah Kabupaten Balangan terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan dan 152 desa. yaitu Kecamatan Paringin, Kecamatan Batu Mandi, Kecamatan Halong, Kecamatan Juai, Kecamatan Awayan, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Paringin Selatan Potensi yang dimiliki Kabupaten Balangan ini antara lain adalah batubara dan biji besi, serta

sektor perkebunan, khususnya karet.

a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan pencapaian kinerja perekonomian pada periode waktu tertentu terhadap kinerja periode waktu sebelumnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangat tergantung pada potensi- potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Potensi tersebut baik berupa sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM), serta kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada dasarnya dirancang agar dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan.

*Tabel 5.20
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2011 – 2015 (Dalam %)*

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	4,99	2,68	3,44	4,85	4,69
2.	Pertambangan & Galian	10,30	7,63	9,34	6,13	0,99
3.	Industri Pengolahan	5,17	5,22	5,20	4,73	4,67
4.	Listrik & Air bersih	14,75	12,32	6,34	24,66	24,78
5.	Bangunan	6,06	6,17	6,01	6,05	5,72
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,48	5,81	6,13	4,34	5,89
7.	Pengangkutan & Komunikasi	14,96	14,88	18,68	20,00	18,42
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	36,44	22,65	28,93	24,26	25,44
9.	Jasa-jasa	17,16	16,83	16,95	20,84	20,49
Kabupaten Balangan		8,84	6,69	8,04	5,90	2,41

Sumber: BPS : Kabupaten Balangan, 2016

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan menurut Sektor-sektor ekonomi selama rentang waktu 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.20. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan selama rentang waktu 5 (lima tahun) yaitu tahun 2011-2015 mengalami perkembangan yang negatif.

Bahkan Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai sebesar 2,41%. Secara sektoral, sektor keuangan, persewaan & jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu masing-masing 25,44% dalam tahun 2015. Sedangkan sektor-sektor lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang positif.

b. Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan

Struktur perekonomian Kabupaten Balangan dalam kurun waktu tahun 2011- 2015 sangat didominasi oleh sektor pertambangan & galian. Besarnya kontribusi sektor pertambangan & galian untuk tahun 2015 mencapai 64,42%. Sedangkan sektor pertanian hanya sebesar 11,94%. Kondisi seperti ini perlu mendapatkan perhatian, mengingat bahan tambang dan galian merupakan sumber aya alam (SDA) yang tidak bisa diperbaharui. Bila sumber daya alam tersebut dieksploitasi secara besar-besaran, dan tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam dan ekosistem. Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.21 berikut:

*Tabel 5.21
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Th 2010
Periode Tahun 2011 – 2015 (Dalam %)*

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	10,77	10,83	10,54	10,78	11,94
2.	Pertambangan & Galian	70,74	69,82	69,87	68,78	64,42
3.	Industri Pengolahan	1,47	1,50	1,48	42,52	1,75
4.	Listrik & Air bersih	0,20	0,20	0,19	0,21	0,24
5.	Bangunan	3,16	3,33	3,30	3,50	4,07
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	3,78	3,94	4,04	4,12	4,75
7.	Pengangkutan & Komunikasi	2,68	2,75	2,76	2,90	3,22
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	0,94	1,01	1,03	1,08	1,20
9.	Jasa-jasa	6,26	6,62	6,79	7,11	8,39
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Balangan, 2016

Berdasarkan Tabel 5.21 di atas, terlihat bahwa sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Balangan, selain sektor pertambangan adalah, sektor pertanian, dengan kontribusi mencapai sebesar 11,94 %, dan sektor jasa-jasa sebesar 8,39%. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya mempunyai kontribusi di bawah 5 %. Sehingga selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Balangan selalu didominasi sektor pertambangan dan galian. Hal ini patut mendapat perhatian mengingat sumber daya alam merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Pemerintah Kabupaten Balangan harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor-sektor yang selama ini masih menjadi unggulan daerah, seperti, karet alam dan pertanian tanaman pangan.

5.2.9. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara luas wilayahnya mencapai $\pm 892,7 \text{ Km}^2$ atau sekitar 2,38 dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terletak pada koordinat 2 sampai 3° Lintang Selatan dan 115° sampai 116° Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi dalam 7 (tujuh) Kecamatan, yakni Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Danau Panggang, Babirik, Sungai Pandan, dan Kecamatan Banjang. Jumlah Desa/Kelurahan di sebanyak 219 buah. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi rawa lebak sebagai sentra pengembangan usaha pertanian, dan pengembangan kerbau rawa, dan itik Alabio. Selain itu, kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki sektor industri kecil (meubel kayu) sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian daerah. Keberadaan industri kecil meubel kayu tersebut cukup besar peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah ini

a. Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil Sensus Pendudukan Tahun 2010 adalah sebanyak 209.246 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 102.351 jiwa, wanita sebanyak 106.895 jiwa. Berdasarkan data tersebut, Penduduk wanita lebih banyak daripada penduduk laki-laki, yang berarti ratio mencapai 95,75%. Rata-rata pertumbuhan selama tahun 2000 - 2010 adalah sebesar 0,61% pertahun. Salah satu karakteristik penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kebiasaan mereka untuk “merantau” baik antar kabupaten maupun antar

provinsi. Hal ini terkait dengan pola pekerjaan mereka yang umumnya berdagang, dan petani. Jika dilihat dan sejarah, perpindahan penduduk asal kabupaten Hulu Sungai Utara ini sudah lama terjadi, yaitu sekitar akhir abad ke 19, terutama menuju daerah-daerah semenanjung Malaysia serta pantai timur Sumatera dan pulau Jawa. Perpindahan pada masa lalu lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan penjajah yang menerapkan pajak tinggi terhadap penduduk. Namun pola perpindahan pada masa sekarang sudah bergeser, tidak lagi menuju Malaysia atau pantai timur Sumatera. Perpindahan sekarang bergerak menuju ke daerah-daerah yang mempunyai aktivitas perekonomian yang ramai.

b. Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terdapat di wilayah tersebut. Struktur ekonomi menggambarkan besarnya kemampuan dan peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah (Value added). Semakin besar nilai tambah yang dapat diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi tertentu akan menjadikan peranan/kontribusi sektor ekonomi tersebut Menjadi semakin penting. Di dalam struktur ekonomi tersebut akan tercermin pula komposisi peringkat nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ekonomi.

Kontribusi sektor-sektor ekonomi tersebut akan dapat menjelaskan peranan dari masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah. Sehingga dengan memperhatikan peranan atau kontribusi sektor- sektor ekonomi akan dapat diketahui sektor-sektor ekonomi mana saja yang paling dominan peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah yang bersangkutan. Perubahan yang terjadi pada kontribusi ekonomi secara sektoral inilah akan dapat diketahui bagaimana kinerja masing-masing sektor ekonomi dimaksud dalam membentuk struktur perekonomian daerah. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan menurut Sektor-sektor ekonomi selama rentang waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.22.

Tabel 5.22
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hsu Provinsi Kalimantan Selatan Menurut
Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	19,70	19,10	18,30	18,60	18,40
2.	Pertambangan & Galian	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20
3.	Industri Pengolahan	9,90	10,40	10,70	10,60	10,30
4.	Listrik & Air bersih	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5.	Bangunan	10,50	10,30	10,20	10,30	10,40
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	12,60	12,80	13,10	13,30	13,30
7.	Pengangkutan & Komunikasi	14,30	14,30	13,90	13,80	13,40
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	7,00	7,00	7,20	7,10	6,80
9.	Jasa-jasa	25,1	25,20	25,80	25,50	26,50
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2016

Secara umum, perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara bercirikan agraris. Hal ini disebabkan karena dominasi dari sektor pertanian, khususnya dari sub sektor tanaman bahan makanan yang cukup besar. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, rata-rata kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian dalam pembentukan pendapatan regional mencapai 18,16% per tahunnya. Besarnya kondisi sektor pertanian ini tidak terlepas dari kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai potensi lahan pertanian yang relatif luas berupa rawa lebak, dan telah digarap secara turun temurun oleh masyarakat. Selain itu, dari lahan perairan yang dimiliki, baik berupa sungai maupun perairan rawa, diperoleh tambahan kontribusi yang berasal dari sub sektor perikanan. Sektor lainnya yang mempunyai kontribusi relatif besar pada tahun 2015 adalah sektor jasa-jasa sebesar 26,50%, perdagangan, restoran, dan perhotelan, yakni sebesar 13,13%. Kemudian dan sektor industri pengolahan sebesar 10,30%.

Melalui perkembangan kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian kabupaten Hulu Sungai Utara. Terlihat bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara bergerak positif. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menentukan arah, sasaran,

dan fokus perhatiannya terhadap sektor- sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam perekonomian daerah.

5.2.10. Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung, terletak diwilayah paling Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah mencapai $\pm 3.946 \text{ KM}^2$ atau sekitar 10,61% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong mempunyai 131 Desa/Kelurahan, yang terbagi dalam 12 (dua belas) kecamatan, yaitu: Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara, Kecamatan Upau, Kecamatan Haruai, Kecamatan Bin tang Ara, Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Tanta, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Kelua, Kecamatan Pugaan, dan Kecamatan Benua Lawas, Kabupaten Tabalong memiliki potensi sumber daya alam berupa batubara, serta perkebunan, terutama karet.

a. Perkembangan PDRB Kabupaten Tabalong

Peranan atau kontribusi sektor-sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran atau kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah (value added). Hal tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor perekonomiannya. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka akan dapat pula dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi pada daerah bersangkutan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan sebagai akibat timbulnya berbagai kegiatan atau aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah/regional tertentu. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, terlebih lagi setelah era otonomi daerah (OTDA) mulai diterapkan di daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Karena itu besaran angka/nilai PDRB yang mampu dihasilkan oleh suatu daerah sangat tergantung kepada faktor produksi yang telah dimiliki oleh daerah bersangkutan.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai sarana/alat yang sering dipergunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta dalam analisis ekonomi atau sosial. PDRB berguna sebagai bahan persiapan perencanaan dan analisis kebijakan ekonomi makro pada suatu daerah, seperti misalnya kebijakan pajak dan lain sebagainya. Sebagai bahan perencanaan dan alat analisis pembangunan, dapat dilihat dampaknya bagi perekonomian, di samping sebagai bahan pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan seperti mengukur laju pertumbuhan ekonomi dan melihat laju inflasi atau deflasi. Sebaliknya jika dinyatakan dalam perkapita, PDRB dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat pada suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu.

Perkembangan besaran nilai PDRB (Produk Domestik Bruto) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.23.

Tabel 5.23

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Tabalong Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Nilai PDRB (Dalam Rp.)	Pertumbuhan (%)
2011	Rp. 3.188.857,87	-
2012	Rp. 3.355.635,13	5,23
2013	Rp. 3.501.940,82	4,36
2014	Rp. 3.643.069,03	4,03
2015	Rp. 3.730.866,99	2,41

Sumber : BPS : Tabalong Dalam Angka, 2016

Sesuai dengan Tabel 5.23 halaman 128 terlihat bahwa selama periode tahun 2011-2015, nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), mengalami penurunan. Pada tahun 2011 nilai PDRB Kabupaten Tabalong mencapai Rp. 3.188.857,87 dengan pertumbuhan sebesar 5,60%. Hal ini dikarenakan melemahnya ekspor dari hasil pertambang dan galian yang merupakan unggulan di Kabupaten Tabalong.

b. Struktur Perekonomian Kabupaten Tabalong

Struktur perekonomian Kabupaten Tabalong selama 2011- 2015

didominasi oleh sektor pertambangan & galian. Besarnya kontribusi sektor pertambangan & galian pada 2011 mencapai 69,11%. Sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 12,38%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, mengingat sebagian besar hasil pertambangan tersebut di ekspor ke luar negeri yang sangat rentan terhadap perkembangan ekonomi global. Bahan tambang dan galian merupakan sumber daya alam (SDA) yang tidak bisa diperbaharui. Eksploitasi secara besar-besaran terhadap SDA, bila tidak terkontrol berdampak pada kerusakan lingkungan. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Tabalong selama 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.24.

*Tabel 5.24
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)*

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	9,92	10,02	9,96	10,40	10,86
2.	Pertambangan & Galian	61,61	60,05	59,01	56,90	51,48
3.	Industri Pengolahan	6,15	6,48	6,45	6,61	7,86
4.	Listrik & Air bersih	0,23	0,23	0,23	0,25	0,29
5.	Bangunan	3,71	3,85	3,98	4,20	4,98
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,19	6,70	6,98	7,42	8,42
7.	Pengangkutan & Komunikasi	3,78	3,89	3,98	4,31	4,78
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	5,14	5,39	5,91	6,09	6,99
9.	Jasa-jasa	3,27	3,39	3,51	3,81	4,35
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Tabalong, 2016

Berdasarkan Tabel 5.24 tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2015, sektor sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Tabalong adalah sektor pertambangan & galian dengan kontribusi mencapai sebesar 51,48 %, Sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 10,86% pada tahun 2015. Kemudian sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan sebesar 6,99%, selanjutnya sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi 8,42 sedangkan sektor jasa-jasa, dengan kontribusi sebesar 4,35%.

5.2.11. Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru berada pada titik koordinat 03° 27 ' 03° 29' Lintang Selatan dan 114° 45' - 114° 45' Bujur Timur, pada posisi geografis ±35 KM² pada arah 296° 30' tenggara Kota Banjarmasin. Kota Banjarbaru terletak pada perlintasan utama trans Kalimantan yang menghubungkan kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kota-kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Secara administratif, Kota Banjarbaru yang mempunyai luas wilayah ± 371,30 KM² terbagi atas 12 Kelurahan dengan 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1999, dan menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang sebelumnya berstatus sebagai "Kota Administratif" dan sempat berpredikat sebagai salah satu kota administratif tertua di Indonesia.

a. Perkembangan Penduduk Kota Banjarbaru.

Wilayah Kota Banjarbaru yang sekarang ini, dulunya merupakan perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal sebagai Gunung Apam. Kota Banjarbaru pada masa lalu dikenal sebagai tempat peristirahatan para buruh penambang intan selepas menambang di daerah Cempaka. Pada era tahun 1950-an Gubernur Kalimantan waktu itu Dr. Murjani, dibantu oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda bernama Van Der Pijl merancang kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Namun dalam perjalanannya, perencanaan dan pembangunan Kota Banjarbaru sempat terhenti sampai terjadinya perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif, yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Banjar.

Kota Banjarbaru semakin hari semakin berkembang, dan jumlah Penduduknya pun terus bertambah seiring dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk lokasi kawasan industri maupun untuk dijadikan daerah Pemukiman penduduk. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru berdasarkan data Sensus penduduk tahun 2010 tercatat sebanyak 199.627 jiwa, dengan rata-rata angka pertumbuhan mencapai sebesar 4,84 % pertahunnya. Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru tersebut, tidak terlepas daripada daya tarik karena kedudukan Kota Banjarbaru sekarang yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan, selain

sebagai kota pendidikan, serta tempat pemukiman.

b. Perkembangan Perekonomian Kota Banjarbaru

Perekonomian Kota Banjarbaru jika dilihat dari nilai PDRB menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal ini seiring dengan peningkatan pembangunan fisik, baik perumahan/*real estate*, bangunan usaha berupa Mall, pertokoan/pusat pembelanjaan, Hotel-hotel, rumah makan, dsb. Sejak tahun 2009 secara bertahap dilakukan perpindahan kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan bersamaan dengan perpindahan pusat pemerintahan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru. Perkembangan nilai PDRB Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.25.

*Tabel 5.25
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banjarbaru Menurut
Harga Konstan Tahun 2010
Periode Tahun 2011 – 2015*

Tahun	Nilai PDRB (Dalam juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
2011	Rp. 1.007.498,74	-
2012	Rp. 1.073.389,15	6,54
2013	Rp. 1.143.588,80	6,59
2014	Rp. 1.219.980,53	6,68
2015	Rp. 1.304.281,18	6,91

Sumber : BPS : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2016

Berdasarkan Tabel 5.25 terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 2011-2015, nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2015 nilai PDRB Kota Banjarbaru mencapai Rp. 1.304.281,18, dengan pertumbuhan sebesar 6,91%. Nilai PDRB yang dapat dicapai selama tahun 2015 tersebut, lebih tinggi dibanding pencapaian tahun 2011, dengan nilai sebesar Rp. 1.007.498,74 juta. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa perekonomian Kota Banjarbaru mempunyai kinerja yang cukup baik dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c. Struktur Perekonomian Kota Banjarbaru

Struktur perekonomian Kota Banjarbaru selama rentang waktu

antara tahun 2011 hingga tahun 2015 didominasi oleh 4 (empat) sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi tersebut meliputi, sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, dan sektor industri pengolahan. Pada tahun 2015, sektor perdagangan, restoran dan hotel telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Banjarbaru sebesar 32,35%, kemudian sektor keuangan, Persewaan & Komunikasi sebesar 17,66% disusul oleh sektor bangunan sebesar 14,72% serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi mencapai 13,26%.

Selanjutnya sektor yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi mencapai sebesar 7,82%. Meskipun Kota Banjarbaru tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang besar seperti batubara, biji besi dsb. Namun wilayah Kota Banjarbaru mempunyai areal penambangan intan dan galian C yaitu berupa pasir dan batu-batuan., seperti yang terdapat di wilayah kecamatan Cempaka, Karang Intan, dan Landasan Ulin. Kegiatan penambangan intan dan bahan tambang galian C yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat Kota Banjarbaru. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertambangan & galian ini dalam perekonomian Kota Banjarbaru telah mencapai sebesar 4,06%.

Perkembangan struktur perekonomian Kota Banjarbaru mulai tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.26 berikut ini.

Tabel 5.26
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Th 2010
Periode Tahun 2011 – 2015 (Dalam %)

No	SEKTOR EKONOMI	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	2,49	2,36	2,28	2,22	2,13
2.	Pertambangan & Galian	4,45	4,49	4,25	4,13	4,06
3.	Industri Pengolahan	9,04	8,73	8,24	7,98	7,82
4.	listrik & air bersih	0,84	0,75	0,71	0,74	0,78
5.	bangunan	14,82	14,54	14,24	14,51	14,72
6.	perdagangan, restoran & hotel	29,14	30,15	32,03	32,20	32,35
7.	Pengangkutan & Komunikasi	8,19	7,89	7,42	7,53	7,23
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	17,25	17,44	17,57	17,46	17,66
9.	Jasa-Jasa	13,78	13,64	13,25	13,23	13,26
TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS : Kota Banjarbaru, 2016

Sesuai dengan Tabel 5.26 tersebut di atas, menunjukkan bahwa perekonomian Kota Banjarbaru berkembang cukup baik. Semua sektor ekonomi berkembang secara Positif Namun demikian tidak terjadi pergeseran dalam struktur perekonomian. Selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor perekonomian Kota Banjarbaru selalu didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu, sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, dan industri pengolahan. Sedangkan sumbangan sektor-sektor lainnya masih di bawah 10%.

5.2.12. Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala dengan ibukotanya Marabahan. Secara administratif Kabupaten Barito Kuala terbagi dalam 17 (tujuh belas) Kecamatan, yakni Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan. Kecamatan Kuripan, Kecamatan Bakumpai. Kecamatan Cerbon, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Barambai, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Belawang, Kecamatan Jejangkit, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Mekar Sari, Kecamatan Tamban, dan Kecamatan Tabunganen. Kabupaten Barito Kuala

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Sebelumnya Kabupaten ini berstatus Kawedanaan di bawah Kabupaten Banjar. Kabupaten Barito Kuala berjarak 47 km dari Kota Banjarmasin adalah 47 km. Kondisi lahan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala ini sebagian besar merupakan lahan gambut. Hal ini cukup mempengaruhi kondisi infrastruktur khususnya akses jalan. Karena itu sebagian besar transportasi yang dilakukan oleh penduduk, masih menggunakan perahu, ketotok dan speedboat. Hal ini menyebabkan konsentrasi pengembangan wilayah menjadi berbeda. Untuk pengembangan wilayah kabupaten bagian selatan sungai. Barito, maka interaksi sosial ekonominya diarahkan untuk mengikut. perkembangan Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan mengingat wilayah ini lebih dekat dengan kota Banjarmasin. Diwilayah bagian selatan Kabupaten Barito Kuala ini secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, seperti Kecamatan Tamban, Anjir Muara, Alalak, Berangas. Daerah bagian selatan kabupaten Barito Kuala ini, bahkan menjadi alternatif pemukiman warga Banjarmasin.

Pengembangan wilayah pembangunan, Kabupaten Barito Kuala terbagi atas 3 (tiga) Sub Wilayah Pembangunan yaitu: Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusatnya Marabahan, meliputi beberapa Kecamatan, yaitu Kecamatan Marabahan, Bakumpai, Cerbon, Barambai, Tabukan, Kuripan, Belawang, dan Wanaraya (merupakan Kecamatan pemekaran kecamatan Belawang). Sedangkan Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusatnya kecamatan Berangas, meliputi Kecamatan Alalak, Rantau Badauh, dan Mandastana. Selanjutnya Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusatnya adalah kecamatan Tamban, meliputi kecamatan Tamban, Anjir Pasar, Anjir Muara, Mekarsari, dan Tabunganen.

a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

Secara umum perekonomian Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan yang cukup berarti Hal ini terjadi seiring dengan terjadinya peningkatan pembangunan fisik, baik perumahan, bangunan usaha, Hotel/penginapan, rumah makan, serta bangunan perkantoran Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala selama rentang waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015, disajikan dalam Tabel 5.27. Sesuai dengan Tabel 5.27, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2011 hingga tahun

2015 telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Bahkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 5,26%, jika dilihat dari perkembangan pertumbuhan secara sektoral. Maka sektor ekonomi yang mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi adalah, sektor listrik & air bersih mencapai sebesar 30,65%, sektor Keuangan, Persewaan & Jasa 26,75%, sektor jasa-jasa mencapai 24,25%, sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 20,96%.

Tabel 5.27

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Th 2010 Periode Tahun 2011 – 2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	2,80	3,46	(0,93)	0,84	2,15
2.	Pertambangan & Galian	4,92	6,19	7,16	7,23	6,73
3.	Industri Pengolahan	2,13	3,34	4,53	2,19	3,62
4.	Listrik & Air bersih	11,32	14,06	13,96	30,00	30,65
5.	Bangunan	6,79	7,32	5,91	6,67	6,70
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	5,47	6,94	8,85	8,71	7,82
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,78	14,54	16,44	22,49	20,96
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	25,54	23,48	33,64	27,31	26,75
9.	Jasa-jasa	13,91	19,28	22,84	25,44	24,25
Barito Kuala		4,24	4,88	4,12	4,51	5,26

Sumber: BPS : Kabupaten Barito Kuala, 2016

Sektor ekonomi lainnya yang mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam perekonomian Kabupaten Barito Kuala adalah sektor perdagangan, restoran & Hotel sebesar 7,82%, dan yang terendah adalah sektor industri pengolahan sebesar 3,62% dan sektor pertanian yang menurun hingga mencapai 2,15% dikarenakan pesatnya daerah Barito Kuala menjadi penopang pembangunan perumahan untuk warga Banjarmasin terutama di daerah Handil Bakti, sektor industri pengolahan mengalami penurunan, hal ini terkait dengan kondisi industri perkayuan yang sedang mengalami kesulitan bahan baku. Akibatnya beberapa industri perkayuan terpaksa menghentikan sebagian kegiatan produksinya, bahkan menutup

perusahaan yang bergerak dalam pengolahan kayu (Plywood).

b. Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Kuala

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu lima tahun, yakni dari tahun 2011 hingga tahun 2015 didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, restoran dan hotel, serta sektor bangunan. Sampai tahun 2015, kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Barito Kuala mencapai 28,41%, sektor ekonomi lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi mencapai sebesar 17,61%. Sementara itu sektor perdagangan, restoran dan hotel memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Barito Kuala sebesar 11,34%, serta sektor bangunan sebesar 13,20%.

Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala selama rentang lima tahun, yaitu, tahun 2011 hingga tahun 2015, disajikan dalam Tabel 5.28, dimana terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2011-2015 belum menunjukkan pergeseran yang cukup berarti. Perekonomian Kabupaten Barito Kuala selama periode tersebut masih bertumpu kepada 4 (empat) sektor perekonomian. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, restoran dan hotel, serta sektor bangunan. Pada tahun 2015, sektor pertanian telah memberikan kontribusi kepada perekonomian Kabupaten Barito Kuala mencapai sebesar 28,41%. Selanjutnya sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 17,61%, disusul oleh sektor keuangan, persewaan & komunikasi sebesar 13,74%, selanjutnya sektor bangunan sebesar 13,20%, sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi sebesar 11,34%.. Sedangkan sumbangan sektor-sektor lainnya masih di bawah 10%.

Tabel 5.28

Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	32,29	31,41	29,80	28,66	28,41
2.	Pertambangan & Galian	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
3.	Industri Pengolahan	18,59	18,46	18,44	18,16	17,61
4.	Listrik & Air bersih	0,30	0,30	0,30	0,32	0,33
5.	Bangunan	12,32	12,42	12,57	12,98	13,20
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	10,03	10,38	10,77	11,17	11,34
7.	Pengangkutan & Komunikasi	7,81	7,81	7,83	8,04	7,91
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	12,07	12,50	13,29	13,48	13,74
9.	Jasa-jasa	6,49	6,65	6,91	7,11	7,33
Barito Kuala		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Barito Kuala, 2016

5.2.13. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin terletak antara 3°16'4" - 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" - 114°39'55" Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut. Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai, yang sebagian dari anak sungai tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sarana transportasi di samping transportasi darat yang sudah ada. Kota Banjarmasin berada dekat dengan muara Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura.

Kota Banjarmasin yang luasnya hanya ± 72.000 KM² atau sekitar 0,19% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 50 (lima puluh) wilayah kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Timur, dengan 9 Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Barat, dengan 9 Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dengan 12 Kelurahan, dan Kecamatan Banjarmasin Utara, dengan 9 Kecamatan.

a. Perkembangan Penduduk Kota Banjarmasin

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan subyek maupun obyek yang menjadi sasaran dari pembangunan itu sendiri. Penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 berjumlah 381.286 jiwa. Pada sensus penduduk tahun 1990 jumlahnya meningkat menjadi 480.737 jiwa. Selama kurun waktu sepuluh tahun, yaitu periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarmasin rata-rata sebesar 2,34% pertahun. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya sebesar 2,32% pertahun, dan angka pertumbuhan nasional sebesar 1,98% selama periode 1980-1990 (BPS : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2011).

Peningkatan penduduk terus terjadi, dimana pada tahun 2000, jumlah penduduk Kota Banjarmasin bertambah menjadi 585.100 jiwa. Kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 625.481 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,69% pertahun. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Selama ini Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi, pusat bisnis dan perdagangan selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Perkembangan yang pesat di sektor pertambangan batubara sejak tahun 2000-an rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang, sehingga Kota Banjarmasin tidak lagi menarik untuk didatangi.

b. Perkembangan Ekonomi Kota Banjarmasin

Nilai PDRB Kota Banjarmasin selama rentang waktu lima tahun terakhir, yakni pada periode tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 PDRB Kota Banjarmasin atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp.6.703.540,- dan atas dasar harga konstan mencapai sebesar Rp. 4.080.298. Pada tahun 2011 PDRB meningkat menjadi Rp. 10.534.540 (berdasarkan Harga Berlaku), dan atas dasar Harga Konstan nilainya mencapai sebesar Rp. 5.112.940,.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu Kota yang di wilayahnya tidak mempunyai sumber kekayaan alam (SDA) misalnya Batubara, biji besi, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan Namun Kota Banjarmasin mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang cukup baik.

sehingga berpotensi untuk dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Banjarmasin Kegiatan/aktivitas perekonomian masyarakat sebagian besar bergerak di sektor-sektor perdagangan. industri pengolahan. restoran dan hotel, pengangkutan dan telekomunikasi, lembaga keuangan, serta jasa-jasa. Perkembangan PDRB Kota Banjarmasin selama rentang waktu 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.29.

*Tabel 5.29
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Th 2010
Periode Tahun 2011 – 2015 (Dalam %)*

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	-0,89	3,70	5,49	-0,38	3,35
2.	Pertambangan & Galian	-	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	1,76	3,27	3,36	2,07	2,94
4.	Listrik & Air bersih	10,71	13,85	7,46	32,61	32,87
5.	Bangunan	6,38	6,61	3,82	6,57	6,23
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,75	7,08	7,54	8,01	6,54
7.	Pengangkutan & Komunikasi	19,24	20,86	24,48	23,25	20,39
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	27,65	28,83	34,00	24,98	26,25
9.	Jasa-jasa	15,2	15,06	20,86	24,24	20,43
Barito Kuala		5,15	6,18	6,93	6,11	5,79

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2016

Berdasarkan Tabel 5.29 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin, memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. Sektor yang paling dominan pada tahun 2015 adalah sektor listrik & air bersih sebesar 32,87% disusul oleh sektor keuangan, persewaan & jasa berkontribusi sebesar 26,25% selanjutnya sektor jasa-jasa sebesar 20,43%. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kota Banjarmasin didominasi oleh jasa-jasa sedangkan pertambangan & galian tidak ada di kota Banjarmasin.

c. Struktur Perekonomian Kota Banjarmasin

Struktur perekonomian Kota Banjarmasin seperti yang terlihat dalam Tabel 5.30. dimana sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor ekonomi yang paling besar sumbangannya terhadap perekonomian Kota

Banjarmasin pada tahun 2015, yaitu sebesar 19,47%. Sektor lain yang cukup besar kontribusinya adalah sektor keuangan, persewaan & jasa dengan kontribusi sebesar 19,08%. Kemudian sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 18,45%.

*Tabel 5.30
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Harga Konstan Th 2010
Periode Tahun 2011 – 2015*

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	2,82	2,70	2,64	2,51	2,50
2.	Pertambangan & Galian	0	0	0	0	0
3.	Industri Pengolahan	21,31	20,51	19,72	18,91	18,45
4.	Listrik & Air bersih	1,42	1,34	1,18	1,35	1,41
5.	Bangunan	9,88	9,84	9,42	9,57	9,80
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	11,71	12,04	12,09	12,18	12,36
7.	Pengangkutan & Komunikasi	19,34	19,36	19,33	19,63	19,47
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	17,51	18,31	19,40	19,40	19,08
9.	Jasa-jasa	16,03	16,08	16,17	16,46	16,94
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Kota Banjarmasin, 2016

Sementara sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 16,94%. Jika diamati dengan seksama, maka selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Banjarmasin hampir tidak mengalami pergeseran. Struktur perekonomian Kota Banjarmasin selama periode 2011-2015 didominasi oleh 4 (empat) sektor sebagaimana tersebut di atas. Selain itu terlihat pula bahwa, sumbangan sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga pada tahun 2015 kontribusinya hanya mencapai 2,50%. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat Kota Banjarmasin luas wilayahnya hanya sekitar 72 KM persegi. Sebagai pusat kegiatan bisnis, pembangunan pusat pembelanjaan, Pertokoan, hotel berkembang pesat, restoran/rumah-rumah makan memerlukan lahan yang besar.

Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya selama 5 (lima) tahun terakhir juga cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, yakni periode tahun 2011-2015 menunjukkan keadaan yang cukup baik. Berarti kebijakan-kebijakan yang telah di programkan dalam perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin telah dilaksanakan dengan baik.

5.3. Deskripsi Variabel Penelitian

5.3.1. Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah dalam penelitian ini adalah belanja modal berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun dalam penggunaannya oleh pemerintah. Belanja modal dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, jembatan, irigasi, jaringan dan aset lainnya dalam satuan rupiah. Aset tetap tidak berwujud yang dianggarkan dalam bentuk anggaran belanja modal sebesar harga beli aset ditambah seluruh belanja yang terkait dalam pengadaan sampai aset tersebut digunakan.

Investasi pemerintah dianggap sebagai investasi publik/investasi negara adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau sumber daya investasi tersebut berasal dari milik atau kekayaan negara (*public asset*) untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan publik. (Noor Herny Faisal, 2013 : 40). Investasi seperti ini bersifat nirlaba yang dilakukan pemerintah sehingga anggarannya melalui APBN dan APBD sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang APBD yang menyatakan bahwa belanja modal sebagai salah satu sumber belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pemerintah daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dinikmati masyarakat dalam bentuk pelayanan umum. Pelayanan umum dalam pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Tabel 5.31
Investasi Pemerintah Kabupaten/Kota Diprovinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2011-2015 (Jutaan/Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Tanah Laut	324.300	349.058	360.085	370.722	390.810	358.995
Kotabaru	318.816	339.023	350.620	365.622	375.211	349.858
Banjar	152.070	232.702	242.711	251.614	263.710	228.561
Barito Kuala	273.034	287.390	295.710	301.213	305.620	292.593
Tapin	175.159	245.400	255.200	268.730	280.721	245.042
Hulu Sungai Selatan	292.936	313.597	339.329	345.298	355.600	329.352
Hulu Sungai Tengah	286.625	307.115	320.831	328.710	335.830	315.822
Hulu Sungai Utara	129.257	160.866	175.722	183.980	190.820	168.129
Tabalong	327.626	353.169	360.730	365.710	372.650	355.977
Tanah Bumbu	249.611	269.339	275.821	280.645	286.730	272.429
Balangan	524.808	611.427	620.713	645.820	652.720	611.098
Banjarmasin	883.219	966.998	985.820	1.005.100	1.025.210	973.269
Banjarbaru	479.178	352.413	360.271	365.820	367.812	385.099
Rata-Rata	339.741	368.346	380.274	390.691	400.265	375.863

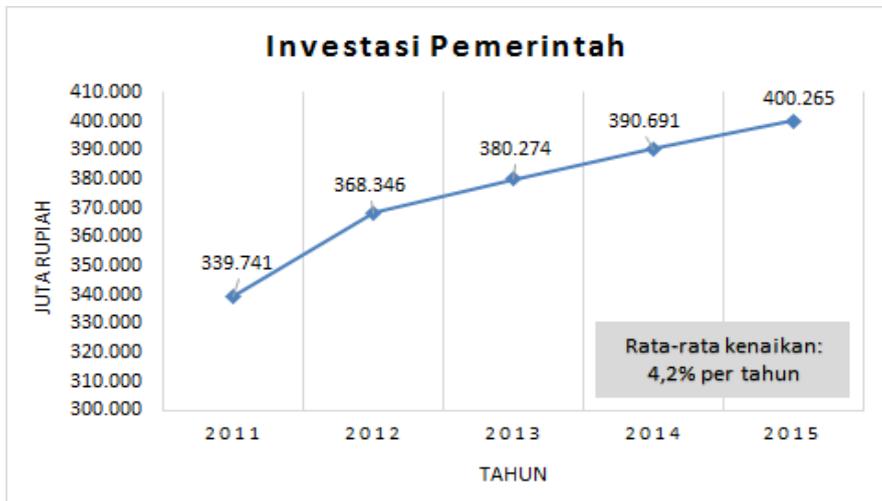
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Pengeluaran pemerintah berupa belanja modal dalam APBD masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan *Selatan* dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan kemampuan masing-masing daerah dalam *mengalokasikan* belanja *modalnya* bagi pembangunan daerah. *Semua* daerah sudah mengalokasikan belanja modalnya di atas Rp 150 milyar, yang paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Rp 168,129 milyar. Kontras dengan daerah hasil pemekaran Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Kabupaten Balangan yang belanja modalnya mencapai Rp 611,098 milyar. Keadaan ini menjadi sebuah kajian dan perhatian karena kabupaten induk setelah pemekaran mengalami penurunan APBD dan belanja modalnya

apalagi pada tahun 2013 sudah berakhir kontrak bagi hasil 50 % dari royalty pertambangan batubara di Kabupaten Balangan tidak lagi disetor ke Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga semakin memperlemah kemampuan keuangan daerah.

Pengeluaran pemerintah yang paling besar adalah belanja modal rata-rata tahun 2011-2015 pada APBD Kota Banjarmasin yang mencapai Rp 973,269 milyar disusul Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu. Besarnya rata-rata belanja modal pada daerah ini karena daerah ini sangat banyak membangun infrastruktur, Kota Banjarmasin melakukan pembenahan kota, kemudian Kabupaten Balangan alokasi belanja modal untuk membangun daerah kabupaten yang baru pemekaran sedangkan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah yang paling luas sehingga perlu anggaran besar dalam belanja modal untuk membangun daerah.

Kecenderungan (*trend*) nilai investasi pemerintah berdasarkan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut:



Gambar 5.1 Trend Investasi Pemerintah Tahun 2011-2015

Gambar 5.1 menunjukkan rata-rata nilai investasi pemerintah berdasarkan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui cenderung naik, dengan rata-rata kenaikan di setiap tahunnya mencapai 4,2%.

5.3.2. Investasi Swasta

Investasi swasta ini dianggap sebagai investasi menurut Sukimo (2008:121) yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal dan

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi swasta menurut Noor Henry Faizal (2013:41) adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya pengusaha dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa laba yang dilakukan usaha mikro/rumah tangga, usaha kecil dan manfaat berupa laba yang dilakukan usaha mikro/rumah tangga, usaha kecil dan menengah, dan usaha besar yang terdiri dari PMDN dan PMA termasuk BUMN dan BUMD.

Secara konsep investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya (*resources*) saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat di kemudian hari (masa yang akan datang) yang dikonversi ke dalam satuan moneter yaitu uang. Investasi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi perkembangan output dan pertumbuhan ekonomi. Investasi otomatis merupakan fungsi pendapatan nasional/produk domestik bruto yang berarti investasi otonom akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Noor Henry Faizal, 2013 :34)

Tabel 5.32
Investasi Swasta Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2011-2015 (Jutaan/Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Tanah Laut	411.716	428.162	396.009	424.800	458.582	423.854
Kotabaru	6.367.368	6.571.176	2.810.823	231.753	5.347.534	4.265.731
Banjarnegara	685.047	873.238	993.482	545.987	591.376	737.826
Barito Kuala	615.636	626.486	10.000	2.975.983	191.422	883.905
Tapin	55.200	12.500	97.572	309.480	193.825	133.715
Hulu Sungai Selatan	23.667	24.851	170.954	185.071	200.359	120.980
Hulu Sungai Tengah	180.548	189.575	8.263.380	9.603.041	8.896.462	5.426.601
Hulu Sungai Utara	15.073	15.827	155.735	167.480	180.406	106.904
Tabalong	822.250	691.862	1.506.240	7.456.321	7.456.321	3.586.599
Tanah Bumbu	904.278	320.000	863.575	537.907	584.555	642.063
Balangan	398.936	346.593	123.851	429.420	142.380	288.236
Banjarmasin	2.068.047	1.463.020	869.434	6.167.793	192.464	2.152.152
Banjarnegara	104.763	111.374	369.273	396.932	435.001	283.469
Rata-Rata	973.271	898.051	1.279.256	2.263.998	1.913.130	1.465.541

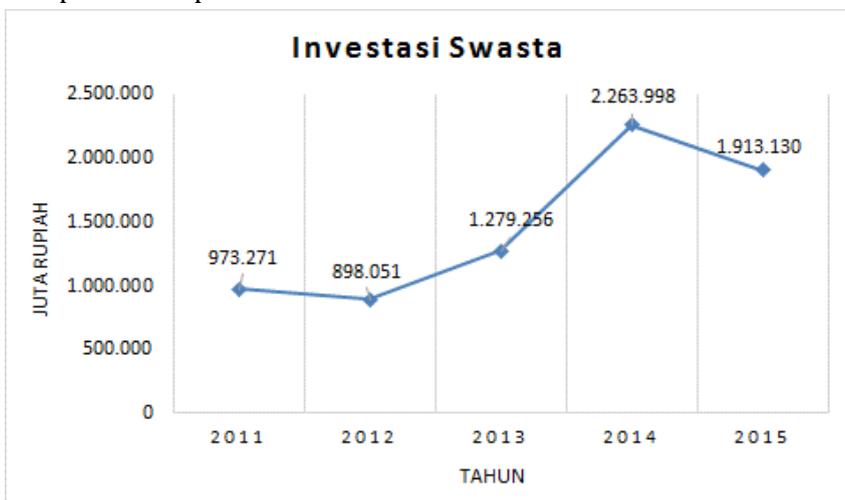
Sumber : BPS dan BKMPD Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Perkembangan investasi swasta per kabupaten/kota dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki rata-rata penanaman modal swasta yang paling tinggi yaitu Rp 5.426.601,00 juta, investasi terbesar pada tahun 2011 sebesar Rp 9.603.041,00 juta hal ini menunjukkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai daerah tujuan investasi. Diikuti Kabupaten Kotabaru dengan rata-rata Rp. 4.265.731,00 juta dikarenakan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah potensial dan memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti sector pertambangan, sub sector perkebunan, sub sektor perikanan dan sektor industry sehingga banyak investor yang tertarik dan kemudian menanamkan modalnya di daerah ini.

Daerah yang memiliki rata-rata investasi per tahun paling kecil adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar Rp 106.904,00 juta, daerah ini baru terjadi peningkatan investasi swasta pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 180.406,00 juta dengan masuknya perusahaan swasta.

Kontribusi investasi swasta terhadap perekonomian daerah sangat besar dan jika memperhatikan besarnya investasi swasta secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Selatan yang besarnya mencapai Rp. 24,870 trilyun pada tahun 2015 maka sangat tepat menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang menjanjikan.

Kecenderungan (*trend*) nilai investasi swasta berdasarkan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut:



Gambar 5.2 Trend Investasi Swasta Tahun 2011-2015

Gambar 5.2 menunjukkan rata-rata nilai investasi swasta pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui cenderung berfluktuatif. Selama tahun 2011-2014, rata-rata investasi swasta cenderung meningkat, sedangkan pada tahun 2015 ada penurunan. Kenaikan terbesar investasi swasta terjadi di tahun 2015, yaitu ada kenaikan 77% dibandingkan tahun sebelumnya, selanjutnya ada penurunan 15,5% investasi swasta di tahun 2015.

5.3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznet dalam Todaro (2000), posisi pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang dewasa ini dalam berbagai aspeknya sangat berlainan dengan pengalaman negara-negara maju pada saat mereka merintis pertumbuhan ekonomi modern. Semua negara baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran sangat mendambakan dan memomorsatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional.

Tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi bam yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. Jadi menurut Kuznet dalam Todaro (2000:144) definisi pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Karakteristik terjadinya proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui pada semua negara dengan meningkatnya pertumbuhan output, kenaikan total produktivitas, terjadinya transformasi struktur ekonomi, transformasi sosial dan ideologi, perluasan pemasaran dan masih terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi bagi penduduk. Karakteristik ini semuanya terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kekhasan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan PDRB yang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, produktivitas sektor makin meningkat, terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian kepada sektor lainnya yaitu sektor pertambangan. Perilaku masyarakat dan pola pikir telah terjadi transformasi sosial dengan meningkatnya keterbukaan sosial ekonomi. Kemampuan daya saing ekonomi daerah yang meningkat dan ekspansi pasar produk daerah namun

pertumbuhan ini masih belum merata dengan masih terkonsentrasi pada kawasan yang kaya potensi sumber daya alam.

*Tabel 5.33
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2011-2015 (Rupiah)*

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Tanah Laut	6,97	5,97	5,33	4,84	3,82	5,39
Kotabaru	6,35	6,03	5,49	3,19	2,87	4,79
Banjar	7,28	6,28	4,60	5,08	4,40	5,53
Barito Kuala	4,24	4,88	4,12	4,51	5,26	4,60
Tapin	6,55	6,32	5,75	5,44	4,05	5,62
Hulu Sungai Selatan	5,40	5,33	5,68	5,79	6,05	5,65
Hulu Sungai Tengah	5,98	4,85	5,83	5,56	6,12	5,67
Hulu Sungai Utara	6,42	5,40	5,34	5,99	5,34	5,70
Tabalong	7,23	5,33	4,36	4,03	2,41	4,67
Tanah Bumbu	7,91	6,29	3,80	2,74	2,94	4,74
Balangan	8,84	6,69	8,04	5,90	2,41	6,38
Banjarmasin	5,15	6,18	6,93	6,11	5,79	6,03
Banjarbaru	5,99	6,54	6,59	6,68	6,91	6,54
Rata-Rata	6,49	5,85	5,53	5,07	4,49	5,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015 sebesar 5,48% masih lebih tinggi dari beberapa daerah yang rata-rata pertumbuhannya masih rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala (4,60%), Kotabaru (4,79%), Tabalong (4,67%). Tanah Bumbu (4,73%). Pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi dicapai oleh Kota Banjarbaru (6,54%) dan Kabupaten Balangan (6,37%). kedua daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena daerah ini merupakan daerah tujuan investasi dengan nilai investasi swasta maupun investasi pemerintah yang besarnya cukup signifikan.

Kecenderungan (*trend*) pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu

2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut:



Gambar 5.3 Trend Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015

Gambar 5.3 menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui cenderung menurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2012, yaitu ada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-rata, penurunan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 adalah sebesar 0,50% per tahunnya.

5.3.4. Penyerapan Tenaga Kerja

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan diantaranya adalah mampu mengurangi tingkat pengangguran yaitu pembangunan yang dapat menyerap tenaga kerja sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja yang luas dan kualitas yang memadai agar menyerap tenaga kerja dan tambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Produsen harus bisa mengombinasikan modal dan tenaga kerja agar mendapatkan laba maksimal Para produsen diasumsikan untuk mampu memproduksi dengan proses teknologi padat karya hingga padat modal, jadi pada saat harga modal lebih mahal maka produsen akan memilih teknologi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Gambaran umum penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di

Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian sub sektor perkebunan terutama perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan karet adalah sektor yang banyak menyerap tenaga kerja sejak jaman kolonial Belanda sampai sekarang, bahkan 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan semuanya memiliki lahan perkebunan karet yang luas yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, HSU, HST, HSS, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Sub sektor perkebunan komoditi kelapa sawit yang menjadi primadona penyumbang PDRB dan banyak menyerap tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir ini banyak menyerap tenaga kerja. Perkebunan kelapa sawit ini tersebar pada 10 kabupaten yaitu Tabalong, Balangan, HSU, HSS, Tapin, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Sektor ekonomi yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertambangan terutama komoditi batubara yang tersebar pada kabupaten Tabalong, Balangan, HSS, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Sektor pertambangan ini walaupun padat modal namun tenaga kerja yang terserap cukup tinggi demikian pula usaha-usaha yang tumbuh mengiringinya banyak menyerap tenaga kerja dan peluang usaha sehingga sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian daerah.

Gambaran penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan pada semua daerah. Pada tahun 2015, penyerapan tenaga kerja terbesar masih pada Kota Banjarmasin (288.995 orang), selanjutnya Kabupaten Banjar (287.572 orang), Tanah Laut (160.807 orang) dan Kotabaru (139.121 orang). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di kabupaten/kota tersebut sebagian besar adalah penduduk produktif dalam usia kerja 15 tahun ke atas.

Tabel 5.34
Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Tanah Laut	46,20	44,43	47,47	46,67	49,59	46,87
Kotabaru	44,45	44,64	40,85	46,90	43,45	44,06
Banjar	42,76	40,62	49,22	47,82	51,87	46,46
Barito Kuala	56,73	53,52	47,10	49,10	55,19	52,33
Tapin	48,09	51,53	63,50	68,33	46,75	55,64
Hulu Sungai Selatan	52,51	52,83	48,09	76,99	47,68	55,62
Hulu Sungai Tengah	51,05	51,07	47,81	49,59	52,44	50,39
Hulu Sungai Utara	56,00	56,93	49,14	49,88	53,07	53,01
Tabalong	48,21	46,94	48,94	47,98	49,08	48,23
Tanah Bumbu	37,95	38,22	41,78	44,06	40,82	40,57
Balangan	86,27	87,73	92,03	91,80	55,37	82,64
Banjarmasin	44,08	45,21	42,37	43,38	42,79	43,57
Banjarbaru	36,38	37,86	42,91	43,21	38,80	39,83
Rata-Rata	50,05	50,12	50,86	54,29	48,22	50,71

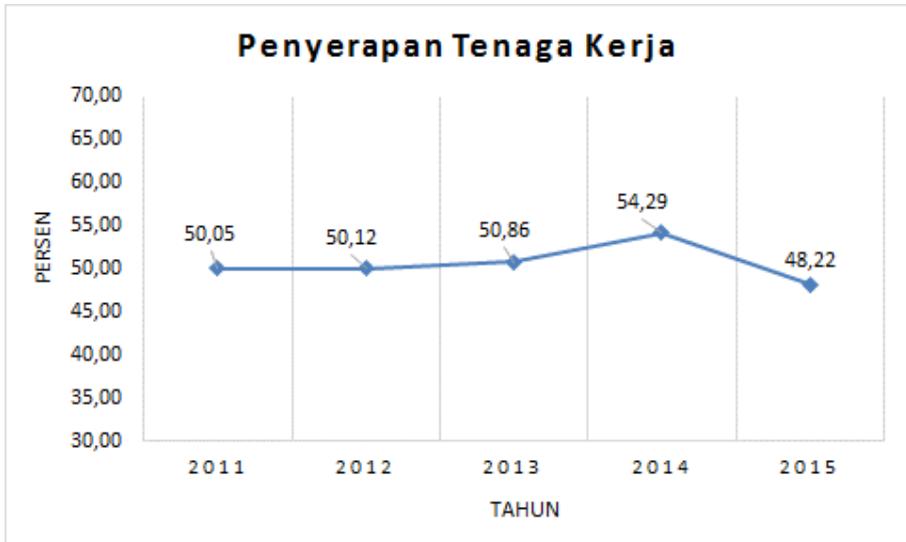
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Kabupaten yang paling sedikit penyerapan tenaga kerja adalah Kabupaten Balangan sebesar 68.355 orang dan Tapin sebesar 84.975 orang. Daerah ini kegiatan ekonominya andalannya adalah sektor pertambangan yang penyerapan tenaga kerja masyarakat lokalnya rendah karena padat modal dan tenaga kerja umumnya datang daerah-daerah lain. Di samping itu penduduk daerah ini juga cukup kecil dibanding daerah lain, sementara penduduk lokalnya sudah memiliki pekerjaan utama sendiri sehingga tidak banyak terserap pada sektor dengan investasi besar dan banyak menyerap tenaga kerja dengan keahlian tertentu.

Apabila jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka kondisinya berbeda. Secara rata-rata selama tahun 2011-2015, wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi justru adalah Kabupaten Balangan, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar

82,64%, sedangkan wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah adalah Kabupaten Banjarbaru, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 39,83%,

Kecenderungan (*trend*) tingkat penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut:



Gambar 5.4 Trend Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2011-2015

Gambar 5.4 menunjukkan rata-rata penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui berfluktuasi, selama tahun 2011-2014 ada sedikit kecenderungan naik, sedangkan pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan. Penurunan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di tahun 2015, yaitu ada penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,06% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan ada kecenderungan menurun, akan tetapi ada 5 kabupaten yang penyerapan tenaga kerjanya naik, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5.3.5. Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)

Menurut hasil empiris penelitian yang sudah banyak dilakukan bahwa konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup serta migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi akan berakibat membebani pertumbuhan ekonomi.

Walaupun korelasi statistik agregat antara ukuran kemiskinan antara ukuran kemiskinan dan penambahan penduduk tidak begitu jelas, namun berdasarkan pendapat Todaro (2000) bahwa penambahan penduduk akan mengakibatkan dampak negatif dengan bertambahnya penduduk miskin terutama penduduk yang paling miskin, dengan tidak memiliki lahan dan alat produksi sendiri sehingga menjadi korban dari langkah penghematan pemerintah dengan pembatasan pendanaan pembangunan.

Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari segi persentase dan jumlah, bahkan diperingkat nasional berada di peringkat 3 dari 33 provinsi secara nasional pada tahun 2013, dengan IPM berada di peringkat 26 dari 33 provinsi secara nasional. Sejak tahun 2011-2015 persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan terus menerus mengalami penurunan, hanya pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan kembali, sehingga pada tahun 2015 total penduduk miskin se Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 198.450 orang atau sebesar 5,32% dari total penduduk. Rata-rata terendah penduduk miskin adalah Kabupaten Banjar (3,03%) dan Kabupaten Tapin (4,25%), rendahnya penduduk miskin kedua daerah ini disebabkan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar dengan sumber daya melimpah para penduduknya pada umumnya memiliki pekerjaan terutama sektor perkebunan karet dengan pada umumnya memadai, sementara daerah itu juga sektor pertambangan cukup besar sehingga peluang usaha dan kegiatan usaha cukup berkembang. Menurunnya jumlah penduduk miskin ini menunjukkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum.

Tabel 5.35 memperlihatkan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 yang setiap tahunnya mengalami penurunan.

Tabel 5.35
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2011-2015 (Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Tanah Laut	4,85	4,57	4,35	4,40	4,56	4,55
Kotabaru	5,17	4,88	4,75	4,79	4,60	4,84
Banjar	3,17	2,98	2,85	2,88	3,26	3,03
Barito Kuala	5,43	5,14	5,14	5,21	5,35	5,25
Tapin	5,31	5,01	3,43	3,64	3,86	4,25
Hulu Sungai Selatan	7,30	6,92	6,69	6,79	6,42	6,82
Hulu Sungai Tengah	6,02	5,69	5,59	5,66	5,79	5,75
Hulu Sungai Utara	7,36	6,97	6,95	7,03	7,07	7,07
Tabalong	6,22	5,86	6,17	6,24	6,56	6,21
Tanah Bumbu	5,99	5,52	5,24	5,24	5,51	5,50
Balangan	7,31	6,89	6,20	6,32	5,90	6,52
Banjarmasin	4,79	4,53	4,23	4,28	4,43	4,45
Banjarbaru	5,59	5,20	4,53	4,38	4,89	4,92
Rata-Rata	5,73	5,40	5,09	5,14	5,25	5,32

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Kecenderungan (*trend*) tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut:



Gambar 5.5 Trend Tingkat Kemiskinan Tahun 2011-2015

Gambar 5.5 menunjukkan rata-rata tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui berfluktuasi, selama tahun 2011-2013 ada kecenderungan turun, sedangkan pada tahun 2014-2015 tingkat kemiskinan mengalami sedikit kenaikan. Penurunan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2012 dan 2013, yaitu ada penurunan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 0,33% dan 0,31% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015, ada kenaikan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 0,06% dan 0,10%.

5.3.6. Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan merupakan kesenjangan distribusi pendapatan antara individu atau kelompok masyarakat pada masing-masing kabupaten/kota yang diproksi dengan nilai Indeks Gini dalam satuan desimal. Indeks Gini ini menggunakan pendapatan individu atau kelompok masyarakat sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat kemakmuran antar kelompok individu atau masyarakat. Data disparitas pendapatan berdasarkan Rasio Gini pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 disajikan pada Tabel 5.36 berikut:

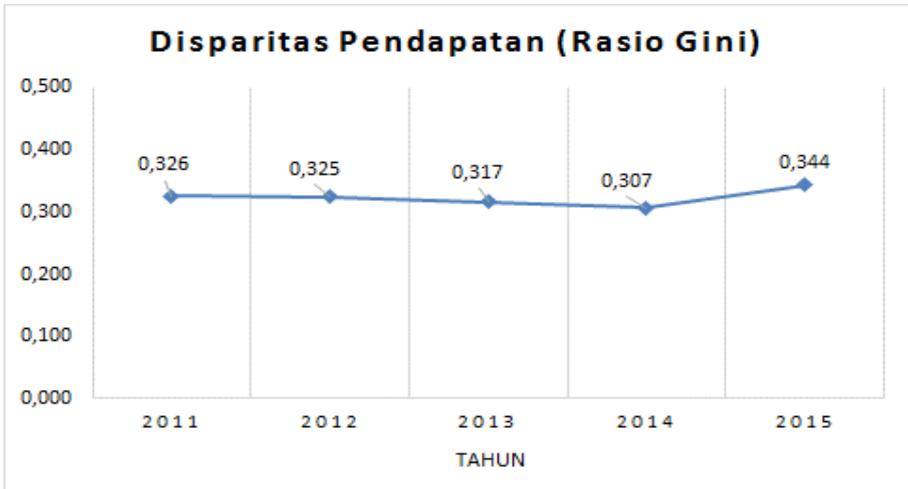
Tabel 5.36
Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2011-2015 (Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Tanah Laut	0,327	0,324	0,332	0,347	0,349	0,336
Kotabaru	0,333	0,313	0,326	0,351	0,323	0,329
Banjar	0,354	0,333	0,326	0,351	0,324	0,338
Barito Kuala	0,321	0,318	0,333	0,335	0,366	0,335
Tapin	0,258	0,295	0,279	0,265	0,345	0,288
Hulu Sungai Selatan	0,345	0,295	0,264	0,269	0,312	0,297
Hulu Sungai Tengah	0,290	0,301	0,301	0,279	0,327	0,300
Hulu Sungai Utara	0,283	0,293	0,259	0,266	0,359	0,292
Tabalong	0,345	0,327	0,332	0,297	0,285	0,317
Tanah Bumbu	0,348	0,319	0,329	0,294	0,333	0,325
Balangan	0,308	0,329	0,304	0,247	0,403	0,318
Banjarmasin	0,382	0,413	0,370	0,325	0,388	0,376
Banjarbaru	0,339	0,370	0,361	0,365	0,352	0,357
Rata-Rata	0,326	0,325	0,317	0,307	0,344	0,324

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Sejak tahun 2011-2014 disparitas pendapatan berdasarkan Rasio Gini pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung menurun, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali. Rata-rata disparitas pendapatan tertinggi selama tahun 2011-2015 adalah Kota Banjarmasin (0,376), sedangkan disparitas pendapatan terendah adalah Kabupaten Tapin (0,288).

Kecenderungan (*trend*) disparitas pendapatan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.6 berikut:



Gambar 5.6 Trend Disparitas Pendapatan Tahun 2011-2015

Gambar 5.6 menunjukkan rata-rata disparitas pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2014 diketahui cenderung menurun, sedangkan pada tahun 2015 disparitas pendapatan mengalami sedikit kenaikan. Penurunan disparitas pendapatan tertinggi terjadi di tahun 2014, yaitu ada penurunan disparitas pendapatan sebesar 0,01 dibandingkan tahun 2013, sedangkan pada tahun 2015, ada kenaikan disparitas pendapatan sebesar 0,037.

5.4. Hasil Analisis Data PLS (*Partial Least Square*)

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode PLS (*Partial Least Square*). Di dalam PLS, terdapat dua bagian utama dalam mengevaluasi model, yaitu evaluasi *measurement model (outer model)* dan evaluasi *structural model (inner model)*. Evaluasi *outer model* digunakan untuk menganalisis dan menguji validitas dan reliabilitas indikator pada setiap konstruk/variabel, sedangkan evaluasi *inner model* digunakan untuk menganalisis dan menguji hubungan kausalitas antar variabel serta tingkat kesesuaian model (*goodness of fit*).

5.4.1. Evaluasi Outer Model

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari indikator dan konstruk yang digunakan. Validitas diukur melalui *convergent validity* dan *discriminant validity*, sedangkan reliabilitas diukur melalui *composite reliability*. Evaluasi *outer model* dilakukan pada

variabel dengan indikator reflektif, pada variabel dengan indikator reflektif mengasumsikan indikator saling terikat satu sama lain dalam mencerminkan konstruk latennya (Jogiyanto dan Abdilah, 2014).

a. Analisis Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

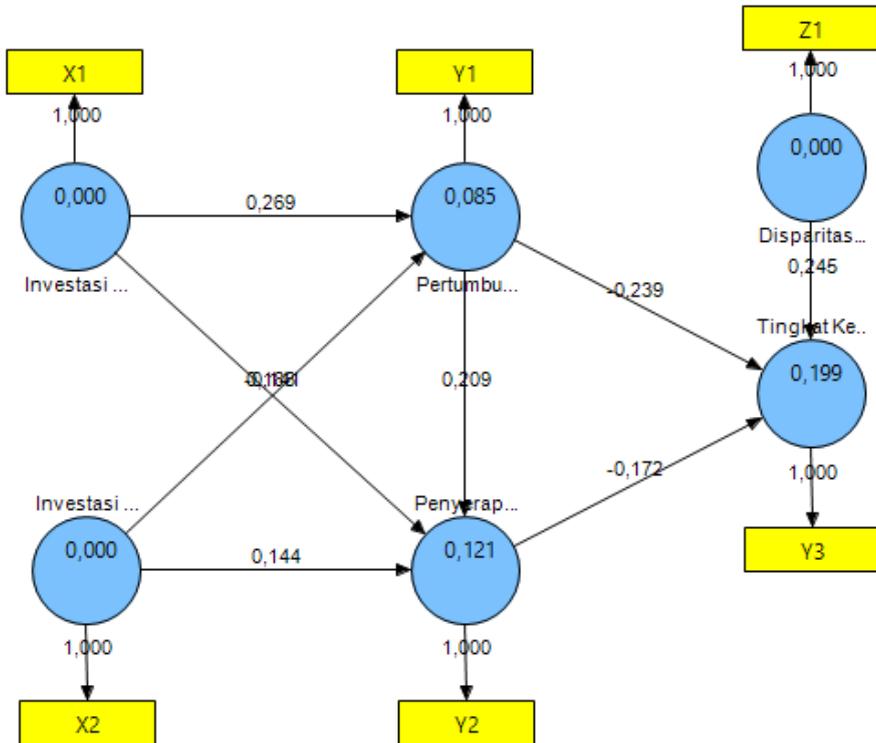
Convergent validity dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *outer loading*. *Rule of thumb* yang digunakan untuk validitas konvergen adalah *outer loading* > 0,50 dan *average variance extracted* (AVE) > 0,50 (Chin, 1995 dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2014: 60). Indikator dikatakan valid juga bisa dinilai dari nilai T-statistics, dengan ketentuan apabila nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 maka indikator tersebut dikatakan valid. Berikut ini adalah nilai *outer loading* untuk setiap indikator pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan.

Tabel 5.37
Nilai Outer Loading Setiap Indikator

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	<i>Cut-off value</i>	Keterangan
Investasi Pemerintah	X1	1,00	≥ 0,50	Valid
Investasi Swasta	X2	1,00	≥ 0,50	Valid
Pertumbuhan Ekonomi	Y1	1,00	≥ 0,50	Valid
Penyerapan Tenaga Kerja	Y2	1,00	≥ 0,50	Valid
Tingkat Pemiskinan	Y3	1,00	≥ 0,50	Valid
Disparitas Pendapatan	Z	1,00	≥ 0,50	Valid

Berdasarkan evaluasi *convergent validity* diketahui semua indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0,50, sehingga semua indikator tersebut disimpulkan valid dalam mengukur variabel yang diukur dan memenuhi validitas konvergen (*convergent validity*) sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Hasil evaluasi *convergent validity* berdasarkan nilai *outer loading* untuk setiap indikator pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan

disparitas pendapatan juga bisa dilihat pada Gambar 5.7 berikut:



Evaluasi *Outer Loading* Setiap Indikator

Selain menggunakan *outer loading* dan nilai T-statistics, pengujian validitas konvergen juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE untuk setiap konstruk investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan disajikan pada tabel 5.38 berikut:

Tabel 5.38
 Nilai Ave Pada Evaluasi Outer Model

Variabel	AVE	Cut-off value	Keterangan
Investasi Pemerintah (X_1)	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Investasi Swasta (X_2)	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Tingkat Kemiskinan (Y_3)	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Disparitas Pendapatan (Z)	1,00	$\geq 0,50$	Valid

Berdasarkan nilai AVE, semua konstruk/variabel laten memiliki nilai AVE di bawah 0,50, yaitu investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan, sehingga indikator pada semua konstruk tersebut disimpulkan valid dalam mengukur variabel laten atau memenuhi validitas konvergen (*convergent validity*).

b. Analisis Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Discriminant validity dilihat berdasarkan nilai *cross loading* untuk setiap indikator pada konstruk yang dibentuk. Suatu indikator dikatakan memenuhi *discriminant validity* jika indikator tersebut memiliki nilai *cross loading* yang lebih besar pada konstruk yang dibentuk, dibandingkan terhadap konstruk yang lain. Hasil pengujian *discriminant validity* melalui perhitungan *cross loading* pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan disajikan pada Tabel 5.39 di bawah.

Tabel 5.39
 Nilai Cross Loading Pada Evaluasi Outer Model

Indikator	Investasi Pemerintah	Investasi Swasta	Pertumbuhan Ekonomi	Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Kemiskinan	Disparitas Pendapatan
X1	1,000	0,093	0,256	0,226	-0,370	0,016
X2	0,093	1,000	-0,116	-0,151	0,076	-0,247
Y1	0,256	-0,116	1,000	0,273	-0,290	-0,015
Y2	0,226	-0,151	0,273	1,000	-0,318	-0,330
Y3	-0,370	0,076	-0,290	-0,318	1,000	0,305
Z1	0,016	-0,247	-0,015	-0,330	0,305	1,000
Ket.	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

Berdasarkan Tabel 5.39 diketahui semua indikator memiliki nilai *cross loading* lebih tinggi pada variabel yang dibentuknya dan rendah pada variabel yang lain, sehingga disimpulkan semua indikator pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan disimpulkan valid dalam membentuk konstruk dan memenuhi *discriminant validity*.

Metode lain yang dapat digunakan untuk mengetahui *discriminant validity* adalah dengan membandingkan nilai dari akar *average variance extracted* (AVE) pada setiap variabel dengan nilai korelasi yang melibatkan variabel tersebut dengan variabel lainnya di dalam model. Jika nilai dari akar AVE lebih besar dibandingkan nilai korelasi-korelasi yang terjadi, maka variabel tersebut dapat dikatakan variabel memenuhi *discriminant validity*. Berikut adalah pengujian *discriminant validity* menggunakan perbandingan akar AVE dengan nilai korelasi antar variabel:

Tabel 5.40
Pengujian Discriminant Validity Dengan Akar Ave

Variabel	Akar AVE	Korelasi Antar Variabel						
			X1	X2	Y1	Y2	Y3	Z
Investasi Pemerintah (X1)	1,000	X1	1,000					
Investasi Swasta (X2)	1,000	X2	0,093	1,000				
Pertumb. Ekonomi (Y1)	1,000	Y1	0,256	-0,116	1,000			
Penyerapan TK (Y2)	1,000	Y2	0,226	-0,151	0,273	1,000		
Tingkat Kemiskinan (Y3)	1,000	Y3	-0,370	0,076	-0,290	-0,318	1,000	
Disparitas Pendapatan (Z)	1,000	Z	0,016	-0,247	-0,015	-0,330	0,305	1,000

Tabel 5.40 menunjukkan semua variabel memiliki nilai akar AVE lebih besar apabila nilai tersebut dibandingkan dengan nilai korelasi antara

variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan memiliki *discriminant validity* yang baik dan memenuhi *discriminant validity*.

c. Analisis Reliabilitas Konstruk (*Composite Reliability*)

Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (Chin dan Gopal, 1995 dalam Salisbury, *et al.*, 2002). *Composite reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk (Werts *et al.*, 1974 dalam Salisbury *et al.*, 2002). *Rule of thumb* nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70, meskipun nilai 0,60 masih dapat diterima (Hair *et al.*, 2010 dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2014:62). Berikut adalah hasil perhitungan *cronbach alpha* dan *composite reliability* evaluasi *outer model* pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan:

Tabel 5.41
Hasil Composite Reliability

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>	Keterangan
Investasi Pemerintah (X_1)	1,00	1,00	Reliabel
Investasi Swasta (X_2)	1,00	1,00	Reliabel
Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)	1,00	1,00	Reliabel
Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)	1,00	1,00	Reliabel
Tingkat Kemiskinan (Y_3)	1,00	1,00	Reliabel
Disparitas Pendapatan (Z)	1,00	1,00	Reliabel

Berdasarkan Tabel 5.41 di atas terlihat semua variabel memiliki nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* lebih besar dari 0,70, sehingga variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan disimpulkan reliabel/ handal.

d. Ringkasan Hasil Evaluasi *Outer Model*

Hasil evaluasi *outer model* berdasarkan uji validitas konvergen (*convergent validity*), uji validitas diskriminan (*discriminant validity*), dan uji reliabilitas komposit (*composite reliability*) menunjukkan semua indikator valid sehingga juga berdampak pada tingkat reliabilitas variabel yang besar dan memenuhi dari nilai yang dipersyaratkan. Dengan demikian semua indikator selanjutnya dikeluarkan dapat digunakan untuk menyusun model penelitian, dan selanjutnya model dapat dilakukan evaluasi *inner model*.

5.4.2. Evaluasi Inner Model

Model struktural (*inner model*) dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R^2 dan Q^2 untuk konstruk dependen, dan nilai koefisien *path* atau *t-value* (*t-statistics*) untuk uji signifikansi antar konstruk. Semakin tinggi nilai R^2 dan Q^2 berarti semakin baik prediksi dari model yang diajukan. Skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan nilai *t-statistics* harus di atas 1,96 untuk pengujian hipotesis pada α (tingkat kesalahan penelitian) sebesar 5% (Jogiyanto dan Abdillah, 2014).

a. Analisis *R-square* dan *Q-square*

Berdasarkan pengolahan data dengan PLS, dihasilkan nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebagai berikut:

Tabel 49
Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R Square</i>
Investasi Pemerintah (X_1)	-
Investasi Swasta (X_2)	-
Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)	0,085
Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)	0,121
Tingkat Kemiskinan (Y_3)	0,199
Disparitas Pendapatan (Z)	-

Goodness of fit pada model PLS dapat diketahui dari nilai R^2 . Semakin tinggi R^2 , maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. Nilai *R-square* pada variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0,085 artinya besarnya pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi adalah hanya sebesar 8,5%. Nilai *R-square* pada variabel penyerapan tenaga kerja adalah 0,121 artinya besarnya pengaruh investasi pemerintah, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi terhadap

penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 12,1%. Sedangkan nilai *R-square* pada variabel tingkat kemiskinan adalah 0,199 artinya besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 19,9%.

Pada model PLS, penilaian *goodness of fit* diketahui dari nilai Q^2 . Nilai Q^2 memiliki arti yang sama dengan koefisien determinasi (*R-Square*) pada analisis regresi, dimana semakin tinggi *R-Square*, maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. Dari Tabel 5.42 dapat dihitung nilai Q^2 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai } Q^2 &= 1 - (1 - 0,085) \times (1 - 0,121) \times (1 - 0,199) \\ &= 0,355 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diketahui nilai Q^2 sebesar 0,355, artinya besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model struktural yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebesar 35,5%.

b. Evaluasi Goodness of Fit

Hasil pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*) pada analisis PLS dilakukan dengan menggunakan statistik SRMR, *d*_ULS, *d*_G, *Chi Square*, dan NFI, yang disajikan pada Tabel 5.43 berikut:

Tabel 503
Evaluasi Goodness Of Fit

Kriteria	<i>Cut off</i> (syarat)	Hasil model	Keterangan
SRMR	≤ 0,08	0,067	Fit
<i>d</i> _ULS	≤ 0,95	0,093	Fit
<i>d</i> _G	≤ 0,95	0,022	Fit
<i>Chi-square</i>	≤ 12,59	7,341	Fit
NFI	≥ 0,90	0,624	Tidak fit

Hasil pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*) menunjukkan bahwa model penelitian telah sesuai dengan data atau fit terhadap data. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.43 yang menunjukkan nilai SRMR, *d*_ULS, *d*_G, dan *Chi Square* yang telah sesuai dengan *cutt of* yang dipersyaratkan dalam kesesuaian model. Ada satu kriteria kesesuaian model yang tidak fit, yaitu NFI. Hasil evaluasi *goodness of fit* menunjukkan bahwa dengan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini, model yang disusun peneliti sudah fit, dan nilai NFI yang masih rendah menunjukkan perlunya menambahkan variabel-variabel lainnya pada penelitian selanjutnya, agar

nilai NFI semakin besar, yang artinya masih perlu dimasukkan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini juga dikuatkan oleh nilai Q^2 pada evaluasi sebelumnya yang menunjukkan angka 35,5%.

c. Koefisien *Inner Weight*

Kekuatan pengaruh antar variabel (konstruk) dapat dianalisis melalui koefisien jalur dari semua garis dengan anak panah satu ujung. Berikut adalah hasil estimasi koefisien pengaruh antar variabel dengan menggunakan PLS :

Tabel 51
 Nilai Koefisien PLS Pengaruh Antar Variabel

Pengaruh Antar Variabel		Nilai <i>Original Sample</i> (O) atau koefisien <i>path</i>
Investasi Pemerintah (X_1)	→ Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)	0,269
Investasi Pemerintah (X_1)	→ Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)	0,186
Investasi Swasta (X_2)	→ Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)	0,141
Investasi Swasta (X_2)	→ Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)	0,144
Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)	→ Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)	0,209
Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)	→ Tingkat Kemiskinan (Y_3)	-0,239
Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)	→ Tingkat Kemiskinan (Y_3)	-0,172

Penjelasan analisis koefisien *path* pengaruh antar variabel pada Tabel 5.44 di atas adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi oleh investasi pemerintah karena memiliki koefisien pengaruh terbesar, yaitu sebesar 0,269. Selanjutnya adalah investasi swasta (0,141).

2. Penyerapan tenaga kerja lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi karena memiliki koefisien pengaruh terbesar, yaitu sebesar 0,209. Selanjutnya adalah investasi pemerintah (0,186), dan investasi swasta (0,144).

Variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi karena memiliki koefisien pengaruh terbesar, yaitu sebesar -0,239. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja (-0,172).

5.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah analisis koefisien pengaruh antar variabel, tahap selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan menggunakan nilai *t-statistics*. Parameter ada tidaknya pengaruh secara parsial dapat diketahui berdasarkan nilai *t-statistics*, dengan ketentuan melalui perbandingan *t-statistics* > 1,96 maka ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen atau variabel endogen terhadap variabel endogen. Sebaliknya jika *t-statistics* < 1,96 maka tidak ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen atau variabel endogen terhadap variabel endogen.

Tabel 52
Pengujian Hipotesis Dengan Inner Weight

Hip.	Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Path	T stat.	Keterangan
H ₁	Investasi Pemerintah (X ₁) → Pertumbuhan Ekonomi (Y ₁)	0,269	3,926	Signifikan
H ₂	Investasi Pemerintah (X ₁) → Penyerapan Tenaga Kerja (Y ₂)	0,186	1,822	Tidak signifikan
H ₃	Investasi Swasta (X ₂) → Pertumbuhan Ekonomi (Y ₁)	0,141	1,518	Tidak signifikan
H ₄	Investasi Swasta (X ₂) → Penyerapan Tenaga Kerja (Y ₂)	0,144	3,292	Signifikan
H ₅	Pertumbuhan Ekonomi (Y ₁) → Penyerapan Tenaga Kerja (Y ₂)	0,209	2,549	Signifikan

Dari Tabel 5.45 dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,269 dengan nilai *T-statistics* sebesar 3,926, dimana nilai *T-statistics* tersebut lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin besar investasi pemerintah pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat diterima (**H₁ diterima**).
2. Besarnya pengaruh investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 0,186 dengan nilai *T-statistics* sebesar 1,822, dimana nilai *T-statistics* tersebut lebih kecil dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin besar investasi pemerintah pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan hanya berdampak kecil pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, tidak dapat diterima (**H₂ ditolak**).
3. Besarnya pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,141 dengan nilai *T-statistics* sebesar 1,518, dimana nilai *T-statistics* tersebut lebih kecil dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi swasta berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin besar investasi swasta pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan hanya berdampak kecil pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak dapat diterima (**H₃ ditolak**).
4. Besarnya pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 0,144 dengan nilai *T-statistics* sebesar 3,292, dimana nilai *T-statistics* tersebut lebih besar dari

1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin besar investasi swasta pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dapat diterima (**H₄ diterima**).

5. Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 0,209 dengan nilai *T-statistics* sebesar 2,549, dimana nilai *T-statistics* tersebut lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dapat diterima (**H₅ diterima**).

5.6. Pengujian Pengaruh Moderasi

Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam Jogiyanto dan Abdillah (2014), pengujian efek moderasi pada PLS dapat dilakukan apabila pengaruh variabel independen terhadap dependen signifikan, dan pengaruh variabel moderasi terhadap variabel dependen juga harus signifikan. Hasil analisis PLS menunjukkan syarat tersebut terpenuhi, karena pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah signifikan, serta pengaruh disparitas pendapatan terhadap tingkat kemiskinan juga signifikan, sehingga pengujian efek moderasi bisa dilanjutkan.

Pada penelitian ini, akan diuji efek moderasi disparitas pendapatan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, yang hasilnya disajikan pada Tabel 5.46 berikut:

Tabel 53
Pengujian Hipotesis Pengaruh Moderasi

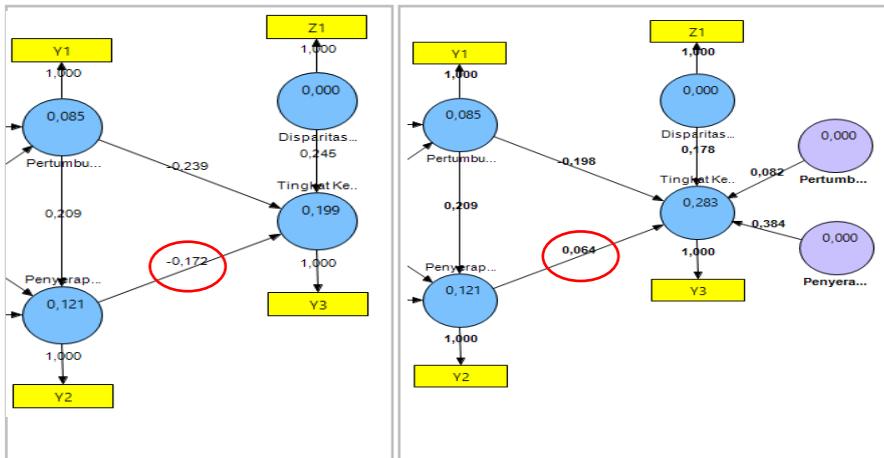
Hip.	Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Path	T stat.	Keterangan
H ₆	Pertumbuhan Ekonomi * Disparitas Pendapatan (Y ₁ *Z) → Tingkat Kemiskinan (Y ₃)	0,082	0,868	Moderasi tidak signifikan
H ₇	Penyerapan Tenaga Kerja * Disparitas Pendapatan (Y ₂ *Z) → Tingkat Kemiskinan (Y ₃)	0,384	3,264	Moderasi signifikan

Dari Tabel 5.46 di atas dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh interaksi pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan (Y₁*Z) terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,082 dengan nilai *T-statistics* sebesar 0,868, dimana nilai *T-statistics* tersebut lebih kecil dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sama, baik pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah ataupun tinggi. Dengan demikian, hipotesis keenam yang menyatakan disparitas pendapatan memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, tidak dapat diterima (**H₆ ditolak**). Gambar 5.8. menunjukkan sebelum ada efek moderasi, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar -0,239. Hasil uji efek moderasi menunjukkan koefisien pengaruh variabel interaksi Y₁*Z adalah sebesar 0,082 (positif), nilai positif menunjukkan efek moderasi ke arah kanan, karena pengaruh sebelumnya adalah -0,239, maka semakin ke arah kanan menunjukkan pengaruh negatif yang semakin mengecil, atau dengan kata lain dikatakan moderasi disparitas pendapatan adalah memperlemah pengaruh negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Memperlemah pengaruh negatif dikuatkan dengan

pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah dan kabupaten dengan disparitas pendapatan tinggi. Nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi disparitas pendapatan sebuah kabupaten/ kota, maka akan memperlemah pengaruh negatif dari penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, dengan kata lain, pada kabupaten/kota dengan disparitas pendapatan tinggi maka tingginya penyerapan tenaga kerja tidak memberikan dampak yang besar pada penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis ketujuh yang menyatakan disparitas pendapatan memoderasi pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, dapat diterima (**H₇ diterima**). Gambar 5.9 menunjukkan sebelum ada efek moderasi, pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar -0,171. Hasil uji efek moderasi menunjukkan koefisien pengaruh variabel interaksi Y_2*Z adalah sebesar 0,384 (positif), nilai positif menunjukkan efek moderasi ke arah kanan, karena pengaruh sebelumnya adalah -0,171, maka semakin ke arah kanan menunjukkan pengaruh negatif yang semakin mengecil, atau dengan kata lain moderasi disparitas pendapatan adalah memperlemah pengaruh negatif dari penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan. Memperlemah pengaruh negatif dikuatkan dengan perubahan koefisien pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, sebelum ada pengaruh moderasi adalah sebesar -0,171, setelah ada moderasi disparitas pendapatan maka pengaruh negatifnya mengecil bahkan menjadi positif sebesar 0,064. Perlemahan pengaruh dari -0,171 menjadi 0,064 tersebut diputuskan cukup signifikan karena nilai T-stat lebih besar dari 1,96.

Gambar 5.9
 Visualisasi Pengaruh Moderasi $Y2 * Z$ Terhadap $Y3$



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota dengan disparitas pendapatan yang rendah, sedangkan pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan yang tinggi, pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan menjadi tidak berpengaruh.

BAB 6

PEMBAHASAN



Bab 6 (enam) merupakan bab pembahasan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis studi pada Pembahasan dengan memperhatikan hubungan kausalitas sebagai hasil pengujian dan pembuktian hipotesis. Teori-teori dan hasil studi empiris yang dilakukan peneliti sebelumnya digunakan dalam pembahasan hasil studi yang diperoleh bisa mendukung atau justru bertentangan dengan teori maupun studi sebelumnya. Pembahasan juga memuat berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dapat dijadikan dasar bagi studi-studi selanjutnya.

1.1. Pembahasan Hasil Deskripsi Variabel

6.1.1. Investasi Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini diukur dengan belanja modal dalam APBD, yang menunjukkan kemampuan masing-masing daerah dalam *mengalokasikan* belanja *modalnya* bagi pembangunan daerah. Hasil deskripsi variabel investasi pemerintah menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengalokasikan belanja modalnya di atas Rp 150 miliar, yang paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Rp 168,129 miliar. Pengeluaran pemerintah yang paling besar adalah Kota Banjarmasin yang mencapai Rp 973,269 miliar, besarnya rata-rata belanja modal pada daerah ini karena daerah ini sangat banyak membangun infrastruktur. Selanjutnya berdasarkan hasil deskripsi juga menunjukkan rata-rata nilai investasi pemerintah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui cenderung naik, dengan rata-rata kenaikan mencapai 4,2% per tahunnya.

6.1.2. Investasi Swasta

Investasi swasta pada penelitian ini diukur menggunakan pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian daerah. Investasi ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa laba yang dilakukan usaha mikro/rumah

tangga, usaha kecil dan manfaat berupa laba yang dilakukan usaha mikro/rumah tangga, usaha kecil dan menengah, dan usaha besar yang terdiri dari PMDN dan PMA termasuk BUMN dan BUMD.

Hasil deskripsi pada variabel investasi swasta diketahui Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki rata-rata penanaman modal swasta yang paling tinggi, hal ini menunjukkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai daerah tujuan investasi, juga dikarenakan sebagai daerah potensial dan memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti sektor pertambangan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan dan sektor industri sehingga banyak investor yang tertarik dan kemudian menanamkan modalnya di daerah ini. Sedangkan daerah yang memiliki rata-rata investasi per tahun paling kecil adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, daerah ini baru terjadi peningkatan investasi swasta pada tahun 2015 dengan masuknya perusahaan swasta.

Kontribusi investasi swasta terhadap perekonomian daerah sangat besar dan jika memperhatikan besarnya investasi swasta secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Selatan yang besarnya mencapai Rp. 24,870 triliun pada tahun 2015 maka sangat tepat menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang menjanjikan. Hal ini dikuatkan dari kecenderungan nilai investasi swasta berdasarkan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 yang menunjukkan peningkatan selama tahun 2011-2014, hanya pada tahun 2015 saja yang sedikit ada penurunan sebesar 15,5%.

6.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini diukur dengan memperhatikan tiga faktor utama, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari daerah bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Hasil deskripsi pada variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011-2015 menunjukkan sebesar 5,48%. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi dicapai oleh Kota Banjarbaru dan Kabupaten Balangan, karena merupakan daerah tujuan investasi dengan nilai investasi swasta maupun investasi pemerintah yang besarnya cukup

signifikan.

Trend pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan kecenderungan yang menurun, yang secara rata-rata penurunan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 adalah sebesar 0,50% per tahunnya. Hal ini disebabkan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam 5 tahun terakhir terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian kepada sektor lainnya yaitu sektor pertambangan. Meningkatnya ekspansi pasar produk daerah masih belum diimbangi dengan belum meratanya ekonomi, yang saat ini masih terpusat hanya pada kawasan-kawasan tertentu yang kaya potensi sumber daya alam.

6.1.4. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada penelitian ini diukur menggunakan rasio jumlah tenaga kerja terserap dengan jumlah penduduk. Hasil deskripsi pada variabel penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011-2015 menunjukkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, penyerapan tenaga kerja terbesar ada di Kota Banjarmasin, hal ini dikarenakan penduduk produktif dalam usia kerja 15 tahun ke atas. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit penyerapan tenaga kerja adalah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tapin, dikarenakan kedua daerah ini kegiatan ekonominya andalannya adalah sektor pertambangan yang penyerapan tenaga kerja masyarakat lokalnya rendah karena padat modal dan tenaga kerja umumnya datang daerah-daerah lain.

Apabila dilihat dari prosentase penyerapan tenaga kerjanya, maka kondisinya berbeda. Secara rata-rata selama tahun 2011-2015, wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi justru adalah Kabupaten Balangan, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 82,64%, sedangkan wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah adalah Kabupaten Banjarbaru, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 39,83%. Sedangkan kecenderungan tingkat penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan kecenderungan naik, dan bila dilihat pada tiap kabupaten/ kota, maka secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan ada kecenderungan

menurun, akan tetapi ada 5 kabupaten yang penyerapan tenaga kerjanya naik, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lima kabupaten yang penyerapan tenaga kerjanya naik tersebut menunjukkan meningkatnya kemampuan daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran karena dapat menyerap tenaga kerja melalui terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkualitas.

Penyerapan tenaga kerja dilihat dari sektor, menunjukkan lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian sub sektor perkebunan terutama perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan karet adalah sektor yang banyak menyerap tenaga kerja sampai sekarang. Sub sektor perkebunan komoditi kelapa sawit yang menjadi primadona penyumbang PDRB dan banyak menyerap tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir ini banyak menyerap tenaga kerja. Sektor ekonomi lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertambangan terutama komoditi batubara. Sektor pertambangan ini walaupun padat modal namun tenaga kerja yang terserap cukup tinggi demikian pula usaha-usaha yang tumbuh mengiringinya banyak menyerap tenaga kerja dan peluang usaha sehingga sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian daerah.

6.1.5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada penelitian ini diukur menggunakan persentase penduduk yang masuk kategori miskin. Hasil deskripsi pada variabel tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa sejak tahun 2011-2015 persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan terus menerus mengalami penurunan, hanya pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan kembali. Rata-rata terendah penduduk miskin adalah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin, rendahnya penduduk miskin kedua daerah ini disebabkan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar dengan sumber daya melimpah para penduduknya pada umumnya memiliki pekerjaan terutama sektor perkebunan karet dengan pada umumnya memadai, sementara daerah itu juga sektor pertambangan cukup besar sehingga peluang usaha dan kegiatan usaha cukup berkembang. Menurunnya jumlah penduduk miskin ini menunjukkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum.

Kecenderungan (*trend*) tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 juga menunjukkan kecenderungan turun, sedangkan pada tahun 2014-2015 tingkat kemiskinan mengalami sedikit kenaikan. Penurunan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2012 dan 2013, yaitu ada penurunan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 0,33% dan 0,31% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015, ada kenaikan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 0,06% dan 0,10%. Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam 2 tahun terakhir (2014 dan 2015) mengalami penurunan dari segi persentase, walaupun begitu, Kalimantan Selatan masih ada di peringkat nasional ke-3 dari 33 provinsi.

6.1.6. Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan pada penelitian ini diukur dengan rasio Gini atau Index Gini, yang menggunakan pendapatan individu atau kelompok masyarakat sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat kemakmuran antar kelompok individu atau masyarakat. Hasil deskripsi disparitas pendapatan berdasarkan Rasio Gini pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan kecenderungan menurun, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali. Rata-rata disparitas pendapatan tertinggi selama tahun 2011-2015 adalah Kota Banjarmasin, sedangkan disparitas pendapatan terendah adalah Kabupaten Tapin.

Kecenderungan disparitas pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 juga diketahui cenderung menurun, sedangkan pada tahun 2015 disparitas pendapatan mengalami sedikit kenaikan. Penurunan disparitas pendapatan tertinggi terjadi di tahun 2014, yaitu ada penurunan disparitas pendapatan sebesar 0,01 dibandingkan tahun 2013, sedangkan pada tahun 2015, ada kenaikan disparitas pendapatan sebesar 0,037.

6.2. Pembahasan Pengaruh Antar Variabel

6.2.1. Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Peranan investasi pemerintah dalam pembangunan daerah sangat penting dalam merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi

terutama dalam hal membangun infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana publik. Menurut Todaro (2000), salah satu faktor komponen utama pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal yang meliputi semua bentuk investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal dan sumber daya manusia. Kuznet dalam Arsyad (2010) sejalan dengan Todaro menyatakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara sebagai peningkatan kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan kemampuan dan kemajuan teknologi, kelembagaan dan penyesuaian ideologi.

Investasi pemerintah yang dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi ini adalah belanja modal yang menjadi komponen belanja langsung pada total pengeluaran pemerintah yang dialokasikan penggunaan untuk membiayai pembangunan sektor publik. Kegiatan pembangunan pemerintah daerah dapat meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang mendorong produksi dan meningkatnya kegiatan perekonomian yang mendorong peningkatan pembentukan nilai absolut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relatif perubahan PDRB berupa pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS menunjukkan koefisien pengaruh sebesar 0,269 (positif) dengan nilai T-stat lebih besar dari 1,96 (signifikan), yang artinya investasi pemerintah memberikan dampak positif dan signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Koefisien positif juga bermakna bahwa pengaruh investasi pemerintah adalah searah yaitu apabila investasi pemerintah meningkat maka berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Signifikannya pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh :

1. Meningkatnya penggunaan APBD untuk investasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Penggunaan investasi pemerintah yang sebagian besar adalah untuk infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana publik lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Investasi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebarannya cukup merata.
4. Investasi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih menyerap banyak tenaga kerja karena pembangunan infrastruktur umumnya padat karya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian Mursinto (2004) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Adolf Wagner dalam Soepangat (1991) dan Mursinto (2005b) juga menunjukkan pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan.

Temuan ini juga konsisten dengan definisi Halim (2007) bahwa belanja modal dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu tanah, Peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan fisik lainnya. Dengan demikian meningkatnya belanja modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori yang mendukung ini adalah strategi pesawat tinggal landas Rostow dalam Hakim (2010) bahwa upaya dorongan besar diperlukan untuk meluncurkan Perekonomian sebuah negara pada sebuah tingkat pertumbuhan yang secara otomatis akan tumbuh sendiri dengan sendirinya seperti menaikkan pesawat dari landasan pacu, jika pesawat berlari di landasan dengan kecepatan rendah dan bahan bakar yang cukup maka tidak akan bisa lepas landas dan sampai ke tujuan. Analogi ini jika dikaitkan dengan pembangunan suatu negara maka investasi sangat diperlukan dalam tahapan pembangunan untuk menuju tinggal landas.

6.2.2. Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian hipotesis pengaruh investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software SmartPLS menunjukkan koefisien pengaruh hanya sebesar 0,186 (positif) dengan nilai T-stat lebih kecil dari 1,96 (tidak signifikan), yang artinya investasi pemerintah tidak memberikan dampak yang besar pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Koefisien bertanda positif bermakna pengaruh investasi pemerintah

sejalan dengan penyerapan tenaga kerja namun nilainya kecil (tidak signifikan). Semakin tinggi investasi pemerintah maka semakin banyak tenaga kerja dapat terserap sebaliknya jika terjadi penurunan investasi akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Investasi pemerintah berpengaruh langsung dalam penyerapan tenaga kerja karena dengan adanya investasi maka dibutuhkan tenaga kerja, namun karena investasi pemerintah sehingga penyerapan tenaga kerja tidak sebesar investasi swasta.

Pemerintah berperan dalam menciptakan kesempatan kerja yang sangat bergantung dari alokasi pengeluaran pemerintah dalam ekonomi yaitu belanja modal. Kesempatan kerja tercipta melalui investasi pemerintah dapat dibuktikan berdasarkan nilai koefisien yang bernilai positif. Investasi pemerintah yang terjadi pada pengeluaran pemerintah dalam belanja modal yang sulit dilakukan oleh swasta. Investasi pemerintah berbagai kabupaten/kota kebanyakan belanja modal dalam pembangunan infrastruktur yang membutuhkan padat modal bukan padat karya. Infrastruktur yang dibangun seperti jalan, jembatan dan irigasi memerlukan pengeluaran pemerintah yang besar namun tidak dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Belanja modal juga banyak untuk penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, instalasi listrik dan air sehingga tidak dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rostow dan Musgrave dalam Mangkosoebroto (2001) tentang perkembangan pengeluaran pemerintah awalnya menyediakan berbagai sarana dan prasarana publik yang berinvestasi padat modal infrastruktur yang tidak banyak membutuhkan tenaga kerja. Investasi pemerintah kebanyakan diarahkan pada perbaikan, penyediaan barang modal yang rusak, pemeliharaan, belanja alat kantor dan rumah tangga sehingga belanja modal tidak digunakan untuk perluasan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian India (2012) bahwa investasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan karena investasi pemerintah digunakan untuk penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana transportasi. Selain itu belanja modal juga digunakan pada komponen yang tidak secara langsung berpengaruh menyerap tenaga kerja yaitu biaya untuk biaya sewa peralatan, biaya perencanaan, dan biaya pengawasan, perizinan, biaya konsultan dan biaya lainnya yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.

6.2.3. Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian hipotesis pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software SmartPLS menunjukkan koefisien pengaruh hanya sebesar 0,141 (positif) dengan nilai T-stat lebih kecil dari 1,96 (tidak signifikan), yang artinya investasi swasta tidak memberikan dampak yang besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan Kuznet dalam Pressman (2000) bahwa investasi swasta sektor pertambangan yang cukup besar berasal dari PMA sehingga hasil investasi lebih dinikmati oleh investor warga negara asing. Kontribusi hasil investasi swasta pada sektor pertambangan terhadap pemerintah daerah masih jauh sangat kecil dibandingkan terhadap pemerintah pusat karena pemerintah daerah hanya mendapatkan bagi hasil dan royalti yang nilainya sangat kecil sehingga hasilnya tidak dapat digunakan secara maksimal dan leluasa untuk pembangunan daerah.

6.2.4. Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian hipotesis pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software SmartPLS menunjukkan koefisien pengaruh sebesar 0,144 (positif) dengan nilai T-stat lebih besar dari 1,96 (signifikan), yang artinya semakin tinggi investasi swasta maka akan memberikan dampak yang besar pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Investasi swasta yang ditanamkan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan adalah investasi sub sektor perkebunan karet yang banyak menyerap tenaga kerja sejak lama, kemudian sub sektor perkebunan kelapa sawit yang banyak menyerap tenaga kerja sejak pembukaan lahan, pembibitan, pengolahan, penanaman, pemeliharaan dan panen, demikian pula investasi pada industri pakan ternak yang banyak menyerap tenaga kerja. Tingginya daya serap tenaga kerja didukung sumber daya manusia yang cukup memadai dan mampu mengakses pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan. Tingginya rencana dan realisasi investasi sub sektor perkebunan ini penting peranannya dalam menyerap tenaga kerja, demikian pula sektor pertambangan batubara juga cukup besar menyerap

tenaga kerja. Namun yang menjadi permasalahan lainnya adalah tingginya migrasi masuk dari luar daerah untuk bekerja pada sektor pertambangan dan sektor perkebunan sehingga menjadi pesaing utama tenaga kerja lokal. Pada saat perekonomian daerah menurun besarnya migrasi masuk untuk mendapatkan pekerjaan maka dampaknya akan ada konsekuensi terjadi pengangguran yang selanjutnya menjadi beban daerah.

6.2.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil pengujian hipotesis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software SmartPLS menunjukkan koefisien pengaruh sebesar 0,209 (positif) dengan nilai T-stat lebih besar dari 1,96 (signifikan), yang artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan memberikan dampak yang besar pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Faktor input pembangunan adalah tenaga kerja, modal, tanah dan teknologi, tenaga kerja sebagai salah satu komponen potensial. Dengan perekonomian yang berjalan normal maka perekonomian dapat berkembang dan berdampak. Pertumbuhan ekonomi memperbaiki distribusi pendapatan dan kesejahteraan dengan terjadinya perluasan kesempatan kerja dan produktivitas. Kesempatan kerja yang tersedia mendorong terjadinya spesialisasi dan peningkatan produktivitas.

6.2.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian hipotesis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software SmartPLS menunjukkan koefisien pengaruh sebesar -0,239 (negatif) dengan nilai T-stat lebih besar dari 1,96 (signifikan), yang artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan memberikan dampak yang besar pada penurunan tingkat kemiskinan.

Nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik yang wajar yaitu terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang didefinisikan meningkatkan kenaikan pendapatan per kapita dan perbaikan kelembagaan dan struktur sosial serta perubahan perilaku merupakan komponen penting bagi pembangunan. Pendapatan per kapita merupakan indikator

penting meningkatnya kesejahteraan ekonomi penduduk yang mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil pengujian ini sudah sesuai teori karena dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kuncoro (1997) penyebab kemiskinan adalah 1) adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumber daya dan distribusi pendapatan yang timpang, 2) terjadinya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas rendah, upah rendah, rendahnya pendidikan, adanya diskriminasi dan karena keturunan, 3) kemiskinan muncul akibat perbedaan akses modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga rendahnya pendapatan yang diterima.

Pendekatan rata-rata pendapatan per kapita yang diterapkan dalam perhitungan kemiskinan dari masa ke masa yang pada umumnya kurang mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi. Bank Dunia menetapkan nilai 1 US dolar sebagai satuan *purcashing power parity* (daya beli) per kapita per hari bagi penduduk miskin. Di Indonesia kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan setara 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, *transport* dan barang lainnya. (BPS, 2008a).

6.2.7. Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengangguran merupakan fenomena besar yang mempunyai pengaruh langsung pada distribusi pendapatan. Kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran melalui ekspansi industri, skema perluasan kesempatan kerja publik, produksi lebih padat karya, pengurangan distorsi harga faktor produksi, pembangunan ekonomi dan jasa sosial yang lebih besar di daerah perdesaan, sistem pendidikan yang relevan, konsistensi dan optimasi mekanisme pasar dalam penentuan harga dan upah. (Hakim, 2010)

Hasil pengujian hipotesis pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software SmartPLS menunjukkan koefisien pengaruh sebesar -0,245 (negatif) dengan nilai T-stat lebih besar dari 1,96

(signifikan), yang artinya semakin tinggi penyerapan tenaga kerja maka akan memberikan dampak yang besar pada penurunan tingkat kemiskinan.

Fenomena ini menunjukkan tingkat kemiskinan yang meningkat apabila terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah. Setelah mengamati dan meneliti fenomena ini ternyata tenaga kerja yang terserap pada kebanyakan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan terutama pada sektor investasi pemerintah maupun investasi swasta ternyata cukup mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Tenaga kerja yang dapat bekerja pada sektor pemerintah maupun swasta harus memiliki pendidikan yang cukup memadai dan memiliki keterampilan tertentu sehingga tingkat kemiskinan yang memiliki kualitas sumber daya yang lemah tidak bisa masuk sektor ini sehingga tetap miskin. Selain itu tenaga kerja yang terserap dan tersebar di kabupaten / kota se Provinsi Kalimantan Selatan sudah banyak yang berasal dari tenaga kerja lokal, sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang pada umumnya adalah penduduk lokal.

6.2.8. Pengaruh Moderasi Disparitas Pendapatan pada Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian hipotesis pengaruh moderasi disparitas pendapatan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software SmartPLS menunjukkan besarnya pengaruh interaksi adalah sebesar 0,082 dengan nilai *T-statistics* lebih kecil dari 1,96 (tidak signifikan), sehingga dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sama, baik pada kabupaten/kota dengan disparitas pendapatan rendah ataupun tinggi.

Tidak signifikannya disparitas pendapatan dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sama, baik pada kabupaten/kota dengan disparitas pendapatan rendah ataupun tinggi. Hasil uji efek moderasi menunjukkan koefisien pengaruh 0,082 (positif), nilai positif menunjukkan efek moderasi adalah ke arah kanan atau pengaruh negatif yang semakin mengecil (tingginya disparitas pendapatan memperlemah pengaruh negatif

dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan). Memperlemah pengaruh negatif dikuatkan dengan perubahan koefisien pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, sebelum ada pengaruh moderasi adalah sebesar -0,239, setelah ada disparitas pendapatan yang tinggi, maka pengaruh negatifnya mengecil menjadi -0,198. Akan tetapi perlemahan pengaruh ini masih dinilai tidak signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada semua daerah, baik pada kabupaten/kota dengan disparitas pendapatan tinggi maupun pada kabupaten/kota dengan disparitas pendapatan rendah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Susanto (2012) mengenai disparitas pendapatan di Indonesia. Masalah besar yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia adalah disparitas distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan, tidak meratanya distribusi pendapatan berpotensi memicu munculnya masalah kemiskinan. Pendapat ini konsisten dengan hasil penelitian ini bahwa ada perlemahan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan pada wilayah dengan disparitas pendapatan yang tinggi.

Safitri, R.I. (2015) dalam penelitiannya mengenai pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan, dan kemiskinan juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi ternyata berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, hal ini bisa disebabkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Sholeh (2015) juga memperkuat hasil penelitian ini, yang hasil penelitiannya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berpihak pada penduduk miskin, yang disebabkan timpangnya antar wilayah. Sehingga hendaknya pemerintah secara sungguh-sungguh berupaya mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat berdampak besar pada pengentasan kemiskinan.

6.2.9. Pengaruh Moderasi Disparitas Pendapatan pada Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian hipotesis pengaruh moderasi disparitas pendapatan pada pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software SmartPLS menunjukkan besarnya pengaruh interaksi penyerapan tenaga kerja dan disparitas pendapatan terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,384 dengan nilai *T-statistics* lebih besar dari 1,96 (signifikan), sehingga dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan memoderasi pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah berbeda pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah dan kabupaten dengan disparitas pendapatan tinggi.

Nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi disparitas pendapatan sebuah kabupaten/ kota, maka akan memperlemah pengaruh negatif dari penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, dengan kata lain, pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan tinggi maka tingginya penyerapan tenaga kerja tidak memberikan dampak yang besar pada penurunan tingkat kemiskinan. Hasil uji efek moderasi menunjukkan koefisien positif yang artinya pengaruh negatif yang semakin mengecil, atau disparitas pendapatan memperlemah pengaruh negatif dari penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan. Memperlemah pengaruh negatif dikuatkan dengan perubahan koefisien pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, sebelum ada pengaruh moderasi adalah sebesar -0,171, setelah ada moderasi disparitas pendapatan maka pengaruh negatifnya mengecil bahkan menjadi positif sebesar 0,064. Perlemahan pengaruh ini dinilai signifikan karena nilai *T-stat* lebih besar dari 1,96, sehingga disimpulkan penyerapan tenaga kerja hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota dengan disparitas pendapatan yang rendah, sedangkan pada kabupaten/kota dengan disparitas pendapatan yang tinggi, penyerapan tenaga kerja menjadi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Suhariyanto *et al.* (2015) mengenai analisis kemiskinan, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan,

pengangguran dan ketimpangan di berbagai bidang merupakan tiga masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan sebuah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan secara makro menunjukkan performa yang baik, namun di sisi lain realitas kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan masih menyelimuti sebagian besar masyarakat. Dengan memperhatikan struktur pertumbuhan ekonomi tersebut, peneliti menilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan belum berkualitas sehingga pertumbuhan ekonomi lepas kaitan dan tidak membawa dampak yang positif terhadap penurunan kemiskinan khususnya pada daerah dengan disparitas pendapatan yang tinggi.

6.3. Temuan Penelitian

Setelah mengkaji dan menganalisis disparitas pendapatan memoderisasi pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, maka temuan-temuan baik secara teoritik yang dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

6.3.1. Temuan Teoritis

1. Temuan teoritis pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Keynes tentang permintaan efektif agregat dapat diterapkan masa kelangkaan lapangan pekerjaan dan sumber daya dengan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: Kenaikan tabungan dapat menyusutkan pendapatan dan mengurangi Pertumbuhan ekonomi, konsumsi lebih penting ketimbang produksi untuk mendorong investasi dan karenanya berbalikan dengan hukum Say: "permintaan menciptakan penawaran sendiri" (1973a).

Menurut Keynes untuk menaikkan output nasional (Y) komunitas bisnis tidak mau membahayakan investasi dan konsumen tidak menaikkan konsumsi karena pendapatan yang tidak menentu maka solusi yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus melakukan pengeluaran (G).

Pemerintah sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik dan percetakan. Kebijakan pemerintah yang ekspansif dapat menaikkan permintaan efektif jika dipakai tanpa meninggikan konsumsi atau investasi.

Keynes berpendapat bahwa dengan kebijakan fiskal yaitu mengubah pengeluaran pemerintah dan pajak lebih efektif dibanding kebijakan moneter, kerja publik berupa pengeluaran pemerintah positif dengan efek berantai (*multiflier*). Kenaikan sedikit saja dalam investasi akan menghasilkan *full employment*. (Skousen, 2009:427-428). Disisi fiskal, kebijakan diupayakan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan serta memberikan stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi. (Hamzah, 2007). Peacock dan Wiseman (1979) menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah yang bersifat sementara akan membawa Peningkatan permanen bagi sektor penerimaan.

Kebijakan fiskal pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat, menurut Jhingan dalam rangka meningkatkan laju investasi pemerintah dapat menerapkan kebijakan investasi sektor publik yang berdampak terhadap peningkatan volume investasi swasta. Untuk menjaga stabilitas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik menurut Mangkususubroto dalam Yuliadi (2007) peranan pemerintah adalah memelihara pertahanan dan keamanan, menyelenggarakan tugas peradilan dan menyediakan barang-barang publik yang tidak bisa disediakan oleh swasta.

Penelitian Mursinto (2004) menyimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Miar (2014) menegaskan hasil temuannya yang menyatakan pengaruh pengeluaran pemerintah alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi signifikan. Hasil penelitian ini menegaskan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh investasi pemerintah berupa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan demikian mendukung teori investasi publik dan teori pertumbuhan ekonomi.

Temuan teoritis lainnya yang mendukung dari pendapat Wicksell dalam Pressman (2000) dan Kuznet dalam Pressman (2000) bahwa faktor jumlah stok modal dan perkembangannya dari waktu ke waktu akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini terjadi karena belanja modal sebagai investasi pemerintah dapat berperan cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Temuan teoritis pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi

Pendapat Todaro (2000) tentang tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi setiap Negara yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Menurut Solow dan Swan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi dalam Arsyad (2010). Menurut Harrod-Domar dalam Arsyad, (2010) dan Todaro (2009) bahwa dalam pertumbuhan ekonomi peranan investasi memperbesar kapasitas produksi yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat dan pendapatan nasional. Sesuai dengan pemikiran Ricardo dan Smith, bahwa peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, *the law of diminishing return* dan memperlambat penurunan tingkat hidup. (Skousen, 2009).

Peranan investasi dalam perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi maka kegiatan ekonomi semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Studi tentang pentingnya peranan investasi dalam pembangunan ekonomi telah dilakukan oleh Rostow mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi (*the stages of economic growth*). Rostwo mengemukakan bahwa perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara melalui tahapan masyarakat tradisional, pra syarat tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, masa konsumsi tinggi. Suatu negara dikatakan tinggal landas manakala sudah memenuhi ciri:

- a. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5 % atau kurang menjadi 10 % dari produk nasional netto.
- b. Berlakunya perkembangan satu atau beberapa industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
- c. Tercipta sebuah rangka dasar politik, sosial dan institusional yang akan menciptakan suatu kenyataan untuk perluasan sektor modern serta tumbuhnya sektor ekonomi eksternal sehingga

proses pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut

Kemudian menurut Ranis dan Fei tentang teori pertumbuhan ekonomi juga mensyaratkan adanya kegiatan investasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Demikian pula teori Nelson yang mensyaratkan adanya tingkat penanaman modal yang tinggi agar masyarakat dapat terlepas dari *the low level equilibrium trap* (Yuliardi, 2007). Proses pertumbuhan modal menurut Ricardo dalam Rahardjo (2013) tergantung pada kemampuan untuk menabung dan kemauan untuk menabung, semakin besar surplus makin tinggi kemampuan untuk menabung.

Temuan studi ini ternyata berbeda dengan teori yang ada yaitu investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan studi yang diperkuat oleh Todaro (2006), bahwa tabungan dan investasi yang lebih banyak tidak lagi merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Diperkuat oleh Kuznet (Todaro, 2000) bahwa pertumbuhan ekonomi selain dipengaruhi oleh variabel ekonomi agregat yaitu perubahan output dan kenaikan produktivitas juga dipengaruhi oleh variabel transformasi struktural. Penelitian terdahulu Sulistiwati (2012) menyimpulkan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan demikian penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya tersebut.

3. Temuan teoritis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja

Analisis Lewis menyatakan bahwa tujuan dari mengemukakan teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukkan kepada negara-negara yang mengalami masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menyatakan ketidakpuasannya terhadap teori neo klasik dan Keynes yang tidak berpihak pada negara-negara yang sedang berkembang. Neo klasik berpandangan penawaran tenaga kerja dalam masyarakat tidak berlebihan, sedangkan Keynes beranggapan bahwa bukan saja terdapat penawaran tenaga kerja berlebihan akan tetapi juga tanah yang tersedia dan kapasitas produksi jumlahnya tidak terbatas. Keadaan ini bertentangan dengan keadaan yang terjadi pada negara-negara berkembang. Lewis menganggap banyak negara-negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebihan akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal.

Analisis Lewis dalam Sukimo (1985), mengenai proses pembangunan dalam perekonomian yang mengalami kelebihan tenaga kerja dilihat dari aspek corak proses pertumbuhan ekonomi, faktor tingkat penanaman modal yang bertambah tinggi dan faktor- faktor yang menyebabkan proses pembangunan tidak berlaku. Perekonomian dibedakan menjadi sektor kapitalis dan subsistem, pada saat kegiatan sektor kapitalis menghasilkan keuntungan maka dana ditanamkan kembali yang menciptakan kesempatan kerja. Temuan teoritis ini diperkuat dengan bahwa pada akhirnya penanaman modal akan meningkatkan produksi dan pembangunan ekonomi. Sebagai akibat dari kegiatan ini lebih banyak kegiatan ekonomi dilakukan di sektor kapitalis lebih banyak kesempatan tercipta di sektor tersebut.

Lebih lanjut menurut Lewis menganalisis investasi di sektor industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern akan menimbulkan perluasan output pada sektor modern tersebut. Makin tinggi pendapatan perkapita suatu negara semakin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan lapangan kerja, sebaliknya peranan sektor industri semakin penting. Pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Temuan teoritis ini didukung oleh teori Solow - Swan (Arsyad, 2010) bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor produksi penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Dalam asumsi Lewis tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja pada sektor modern pasti sebanding dengan tingkat akumulasi modal sektor modern.

Temuan studi ini ternyata berbeda dengan teori yang ada yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan teoritis ini sesuai dengan pendapat Todaro, 2000 100-104 bahwa reinvests kembali dalam bentuk barang-barang modal yang lebih canggih dan lebih hemat tenaga kerja Untuk meningkatkan *output* dan pendapatan masa depan reinvestasi justru dilakukan oleh negara berkembang untuk mengembangkan sektor industri yang tidak padat tenaga kerja. Pelarian modal keluar negeri dapat terjadi dengan adanya berupa penambahan deposito pada bank-bank bam. Kelangkaan tenaga kerja terjadi di pedesaan sementara pengangguran juga semakin banyak di

perkotaan akibat terjadinya pergeseran struktur ekonomi yang tidak seimbang sebagai transformasi struktural perekonomian dari perekonomian pertanian tradisional ke perekonomian industri modern pada pola kehidupan perkotaan.

Asumsi teori Lewis yang dipersoalkan oleh Todaro (2000) bahwa adanya dugaan bahwa pedesaan terjadi kelebihan tenaga kerja sedangkan perkotaan terjadi *fall employment* dan surplus penawaran tenaga kerja habis terpakai tidak dapat diterima sehingga pendapat ini mendukung temuan teoritis ini dimana pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Temuan teoritis ini juga diperkuat oleh Fei dan Ranis dalam Jhingan (2003) yang membagi perubahan tenaga kerja dalam tahapan pertama pengangguran tidak kentara di sektor pertanian beralih ke sektor industri dengan upah yang sama, tahapan kedua pekerja sektor pertanian produktivitas rendah dialihkan ke sektor industri dengan upah sama juga dan ketiga kelebihan buruh sektor pertanian seluruhnya sudah terserap pada sektor industri dan sektor pertanian komersial modern. Model pertumbuhan Arthur Lewis menjelaskan terjadinya proses alih tenaga kerja serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor perkotaan (modern) yang dipengaruhi oleh tingkat investasi dan akumulasi modal di sektor industri. (Sukirno:196). Jadi temuan studi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga tidak signifikan yang berarti menolak teori yang sudah diuraikan namun mendukung teori yang sebaliknya juga menolak adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja.

4. Temuan teoritis pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan. Model Harrod-Domar dan Neo Klasik tentang akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan output namun lambat dalam penciptaan lapangan kerja. Apabila tujuan utama pembangunan adalah memaksimalkan tingkat pertumbuhan GNP maka dapat dibenarkan. Namun jika yang lebih dipentingkan adalah penciptaan lapangan kerja maka perlu dibuat kebijakan lain seperti mendorong industri padat karya di sektor pertanian dan industri kecil (Todaro, 1993) dan Todaro, 2000)).

Teori Keynes menyatakan bahwa kenaikan investasi dapat menyebabkan kenaikan pendapatan, dengan kenaikan pendapatan akan menyebabkan muncul permintaan yang lebih banyak akan barang dan jasa yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja (Jhingan, 2003). Temuan studi ini diperkuat juga oleh teori Ricardo dalam Skousen (2009) bahwa peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi akan cenderung meningkatkan produktivitas kerja dan memperlambat terjadinya *The Law of Dimishing Return*. Diperlukan penanaman modal yang lebih besar yang dapat menjamin agar dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi selalu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk dalam penerapan teori pembangunan seimbang. Teori pembangunan (*big push*) seimbang Rosenstein-Rodan dan Nurkse dalam Sukimo (1985) beranggapan bahwa mengadakan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara untuk meningkatkan pendapatan yang lebih merata dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah semacam itu dengan lebih cepat daripada di daerah yang lebih kaya. Temuan studi pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja signifikan yang berarti menerima teori akumulasi modal dan pembentukan modal swasta dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

5. Temuan teoritis pengaruh investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja

Hollis B. Chenery dan Alan Strout dalam sebuah model berdasar bukti empiris 50 negara berkembang dari tahun 1957 sampai dengan 1962 mengidentifikasi tiga tahap pembangunan yang masing-masing dicirikan oleh faktor kendala pembangunan. Tahap - tahap sekaligus faktor kendala yaitu keterbatasan skill, gap tabungan yaitu investasi dikurangi tabungan dan gap devisa yaitu impor dikurangi ekspor. Investasi sektor modern terjadi karena adanya kelebihan keuntungan sektor modern. Menurut teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tergantung kepada pertumbuhan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan kemajuan teknologi. (Sukimo, 2006).

Menurut Keynes pemerintah harus melakukan pengeluaran sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik dan percetakan. Kebijakan publik berupa kebijakan fiskal yang lebih efektif ketimbang kebijakan moneter. Kerja publik adalah pengeluaran positif membuat orang bekerja dan menempatkan uang ke kantong bisnis

dengan multiplier “kenaikan sedikit saja dalam investasi akan menghasilkan *full employment* JM Keynes (1973a) dalam Skousen (2009).

Teori pengeluaran publik yang dikembangkan oleh Anderson dkk (2006) yang menjelaskan bahwa persediaan modal publik dapat meningkatkan agregat output. Menurut Balducci (2005:5-7) bahwa penggunaan belanja modal publik untuk menyediakan konsumsi publik bagi rumah tangga dan kesempatan investasi produktif bagi perusahaan, yang pada gilirannya investasi tersebut akan memperluas lapangan pekerjaan. Teori supply dan demand tenaga kerja Keynes dalam Pressman (2002) pemerintah merespon kelebihan tenaga kerja dan pengangguran melalui kebijakan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah terutama belanja modal yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Temuan studi ini Pengaruh investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja tidak signifikan dan menolak teori investasi publik.

6. Temuan teoritis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan

Menurut Djoyhadikusumo (1994) bahwa ekonomi pertumbuhan berbeda dengan ekonomi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebagai sebuah proses transformasi yang dalam suatu kurun ditandai perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Sen dalam Pressman (2000), Todaro dan Smith (2006) dan Sukimo (2006) bahwa berbeda pengertian antara ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan).

Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang merupakan proses yang multidimensional (Sukimo, 2006). Pada tahap tinggal landas dengan kenaikan investasi produktif dari 5 % atau kurang menjadi 10 % dari Produk Nasional Bersih dengan terjadi perkembangan satu atau lebih sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tercipta kerangka dasar politik, social dan kelembagaan yang dapat menciptakan pengembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja. Tahap menuju kedewasaan

masyarakat telah secara efektif menggunakan teknologi modern dan hampir semua kegiatan produksi dan muncul sektor-sektor unggulan, perhatian masyarakat menekankan masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan.

Kemiskinan menurut Kuncoro (1997) penyebab kemiskinan adalah ketidaksamaan kepemilikan sumber daya dan ketimpangan distribusi pendapatan, perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima, berimplikasi rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat keterbelakangan dan kemiskinan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan ekonomi maka produktivitas meningkat sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

Menurut Kuznets dalam Hakim (2010) menghipotesiskan bahwa sepanjang industrialisasi ketimpangan distribusi pendapatan mengikuti pola kurva U-terbalik, pertama meningkat kemudian menurun, seiring proses pertumbuhan ekonomi. Kebanyakan kaum miskin berasal dari negara dengan berkembang dengan tingkat pendapatan yang rendah. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makro ekonomi yang stabil sering dipandang sebagai pendekatan yang paling memuaskan baik untuk mengurangi kemiskinan maupun untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan studi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan signifikan dan bernilai negatif yang berarti tidak searah yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi tingkat kemiskinan.

7. Temuan teoritis pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan

Pentingnya penyerapan tenaga kerja dalam sebuah model yang lebih mengutamakan perkembangan sektor - sektor ekonomi yang padat karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil yang lebih baik dan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Kenaikan lapangan kerja dapat dicapai tanpa harus mengorbankan pertumbuhan output. Pendapat tahun 1950 an dan 1960 an yang mengatakan bahwa pertumbuhan output dan pemerataan pendapatan merupakan dua tujuan yang saling bertolak belakang kini telah ditinggalkan.

Strategi pembangunan yang berorientasi kepada penciptaan lapangan

kerja juga dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi. Kesesuaian ini terutama sekali dapat dilihat pada pola pertumbuhan dan pembangunan sektor perdesaan dan sektor perkotaan berskala kecil. Terciptanya lebih banyak kesempatan kerja berarti tersedianya lebih banyak sumber-sumber pendapatan potensial bagi kalangan penduduk miskin (Todaro. 2003). Temuan studi ini pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan signifikan dan bernilai negatif, yang maknanya terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja akan menurunkan tingkat kemiskinan sehingga hal ini konsisten dengan teori.

6.3.2. Temuan Empiris (Pengembangan Praktis)

1. Investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Investasi pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, semakin besarnya investasi yang ditanamkan pemerintah melalui belanja modal mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten yang membelanjakan belanja modalnya untuk pembangunan infrastruktur yang paling besar adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan yang merupakan dua kabupaten pemekaran baru sehingga membutuhkan banyak infrastruktur yang dibangun dari anggaran belanja modal. Terbukti kedua daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan perekonomian masyarakatnya semakin meningkat. Secara keseluruhan perekonomian kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif seiring besarnya investasi pemerintah daerah yang ditanamkan.

Investasi pemerintah yang ditanamkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya berupa belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan untuk masyarakat Kegiatan pemerintah daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan mendorong peningkatan demand, disisi lain produsen sebagai penyedia barang dan jasa akan berproduksi menghasilkan barang dan jasa, yang pada akhirnya menimbulkan aktivitas ekonomi yang membentuk produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relatif perubahannya sebagai pertumbuhan ekonomi. Belanja modal digunakan untuk mendorong daerah dalam

pembangunan dan mengejar ketertinggalannya.

Temuan empiris penelitian ini mendukung penelitian empiris Mursinto (2004) bahwa pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Temuan empiris yang mendukung juga dari M. Rizal Mubaraq dkk tentang adanya pengaruh investasi pemerintah berpengaruh signifikan dan positif kabupaten di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2007-2010.

Penelitian empiris yang tidak mendukung yaitu studi Zhang dan Zao (1998) bahwa adanya pengaruh negatif ratio pengeluaran APBD pada pengeluaran APBN terhadap pertumbuhan ekonomi di China. Demikian pula studi Oreggio dan Andreas R Pose (2004) yang menyatakan sektor publik tidak berpengaruh signifikan dalam penelitiannya di Meksiko.

2. Investasi swasta berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Temuan empiris yang tidak mendukung Raharjo, 2006 tentang pengaruh investasi swasta yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Investasi swasta berpengaruh tidak signifikan karena investasi swasta tidak mampu mendorong peningkatan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk semakin meningkat. Hal ini disebabkan investasi swasta yang ditanamkan pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar adalah padat modal dan pemilik modalnya dari daerah lain bahkan dari pusat sehingga hasil investasi ditransfer keluar daerah dan tidak dibelanjakan di daerah.

3. Investasi pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Investasi pemerintah merupakan pengeluaran berupa belanja modal yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta karena tingkat pengembalian yang lama dan lambat sehingga tidak menarik bagi investasi swasta. Kegiatan pembangunan kebanyakan padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini menyebabkan tidak signifikannya investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan temuan empiris oleh Elina Situmorang (2007) menjelaskan pesatnya pertumbuhan investasi pemerintah tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja. Demikian pula temuan empiris Miar (2014) juga menemukan pengaruh yang tidak

signifikan investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Bukti empiris yang berbeda yang menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan belanja modal terhadap penyerapan tenaga kerja yang diteliti oleh Wurarah, 2011. Dan penelitian Sach (2005) juga menjelaskan anggaran publik mengapresiasi kapital per orang sehingga setiap orang mendapatkan manfaat barang publik. Investasi sektor publik berpengaruh untuk menyerap tenaga kerja (Halim, 2008).

4. Investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kontribusi investasi swasta dalam menyerap tenaga kerja cukup tinggi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan yang padat modal cukup besar berkontribusi menyerap tenaga kerja terutama pada bidang pendukung pertambangan dan kehidupan dunia usaha sekitar tambang. Penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi pada sektor pertanian sub sektor perkebunan sehingga investor yang menanamkan modalnya pada sektor ini berperan sangat penting dalam perekonomian daerah.

5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh penyerapan tenaga kerja akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan akan mampu mendorong produktivitas. Hal inilah yang terjadi dari hasil penelitian ini pada kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja karena sektor ekonomi yang berkembang pada umumnya adalah sektor yang padat modal sehingga sektor ekonomi padat karya kurang berkembang dan tertinggal. Terjadinya pengaruh yang signifikan menjadi suatu pertanda pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan ini mulai ada perbaikan. Hal ini disebabkan lapangan kerja yang tersedia sudah mampu diakses oleh pencari kerja jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah mampu menyediakan lapangan kerja.

6. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif/tidak searah dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin ini memberikan indikasi bahwa

pertumbuhan ekonomi sudah berada pada rel yang tepat. Pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan walaupun kurang bisa menyerap tenaga kerja. Program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan lainnya ternyata berperan mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Brata (2004) dan Huda (2007) yang sama-sama menjelaskan baik pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan.

Hasil empiris penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan cukup berkualitas karena mampu mengurasi penduduk miskin yang ditunjukkan perkembangan penduduk miskin yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan hasil pertumbuhan ekonomi dengan trend positif mampu mengurangi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian empiris lainnya yang tidak mendukung hasil penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan namun tidak searah yaitu pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan dimana kesejahteraan makin turun pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat pada penelitian Badrudin (2011) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan tidak searah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (2005-2008).

Penelitian Nasution (2007) yang menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi Kota Batam berpengaruh signifikan yang searah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, demikian pula penelitian Sasana (2009) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (2001-2005) signifikan dan hubungan positif yang berarti bersama penelitian Nasution (2007) mendukung temuan empiris dari penelitian ini.

7. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Temuan empiris ini memperlihatkan terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena penduduk miskin merupakan umumnya penduduk setempat yang saat ini sudah mulai terserap dalam lapangan

kerja yang tercipta yang disebabkan peningkatan kemampuan mengakses pekerjaan tersebut karena alasan tingkat pendidikan yang semakin baik, perilaku dan budaya setempat yang merasa cukup dengan pekerjaan yang ada walaupun tidak mampu mengeluarkan dari perangkap kemiskinan.

Disisi lain perusahaan yang berinvestasi dan yang mampu banyak menyerap tenaga kerja mendatangkan tenaga kerja dari luar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga tingkat kemiskinan yang ada tidak berkurang secara signifikan malah bahkan bertambah akibat tenaga kerja yang datang sendiri untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja selalu diikuti terjadinya penurunan tingkat kemiskinan karena masyarakat yang bekerja akan mendapatkan penghasilan dan memiliki daya beli sehingga mereka dapat keluar dari jurang kemiskinan. Peningkatan tambahan pendapatan dengan terserap sebagai tenaga kerja sejalan dengan penelitian Rochaida (2005) struktur penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan temuan empiris dari Miar (2014) pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat yang mendukung pendapat Todaro (2010) yang menyatakan kesempatan kerja bagi Penduduk memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan.

6.4. Keterbatasan Studi

Berdasarkan hasil temuan teoritis dan empiris dalam penelitian ini disadari bahwa penelitian ini belum mampu menjawab dan membahas secara menyeluruh semua permasalahan, ini tentu tidak luput dari keterbatasan. Beberapa keterbatasan yang melingkupi penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder sehingga ketersediaan data dan akurasi data sangat tergantung pada instansi penyedia data dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan instansi lainnya selama periode waktu 2011-2015. Ketidakakuratan dalam pengumpulan data berakibat akan berpengaruh terhadap hasil - hasil temuan dalam studi ini.

2. Data sekunder BPS seringkali data yang tersedia masih bertanda bintang sebagai data sementara sehingga diperlukan verifikasi data yang tepat dan akurat.
3. Data sekunder yang diambil dan digunakan mengandung unsur lag/kesenjangan sehingga memerlukan satu tahap interpretasi antara saat terjadinya peristiwa dan pencatatan.

Penggunaan variabel investasi pemerintah sebagai belanja modal dan investasi swasta pada investasi yang ditanamkan oleh pihak swasta pada kabupaten/kota tanpa memperhitungkan penyaluran dana investasi dari perbankan dan Investasi Dana yang bersumber dari APBN.

BAB PENUTUP 7



7.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, koefisien positif bermakna apabila investasi pemerintah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat secara signifikan.
2. Investasi pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, artinya semakin tinggi investasi pemerintah tidak memberikan dampak yang besar pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
3. Investasi swasta berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, artinya semakin tinggi investasi swasta tidak memberikan dampak yang besar pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
4. Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, koefisien positif bermakna apabila investasi swasta meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat secara signifikan.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, koefisien positif bermakna apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat secara signifikan.
6. Disparitas pendapatan tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sama, baik pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah ataupun pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan tinggi.

7. Disparitas pendapatan memoderasi pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah berbeda pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah dan kabupaten dengan disparitas pendapatan tinggi. Koefisien moderasi bernilai positif menunjukkan disparitas pendapatan memperlemah pengaruh negatif penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, sehingga penyerapan tenaga kerja hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan yang rendah saja, sedangkan pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan yang tinggi, meningkatnya penyerapan tenaga kerja menjadi tidak berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan.

7.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil studi mengenai pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, maka saran-saran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi swasta cenderung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan variabel yang sangat kuat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, investasi pemerintah ini patut diprioritaskan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Strategi mengurangi tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan harus dilakukan dengan cara memperbesar penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan realisasi investasi swasta, baik asing maupun domestik, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Peningkatan investasi swasta akan dapat memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan menurunkan angka kemiskinan.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) melalui kebijakan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan daerah, memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat memperbesar lapangan kerja yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan.

4. Investasi pemerintah juga perlu lebih diarahkan untuk peningkatan investasi modal manusia (*human capital*) melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sebagai alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan..
5. Saran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Ekonomi, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan literatur bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh dari investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, disparitas pendapatan, dan tingkat kemiskinan pada tingkat Kabupaten/ Kota. Keterbatasan jumlah variabel yang ada pada penelitian ini hendaknya juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menambahkan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan seperti variabel yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dengan harapan dapat lebih memperkaya isi dan cakupan penelitian, karena perkembangan teknologi saat ini merubah struktur perekonomian, sehingga setiap daerah juga harus mengantisipasi perkembangan teknologi menjadi peluang yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbesar penyerapan tenaga kerja, sehingga diharapkan tingkat kemiskinan bisa menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachim AF, H, 2005, Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Pemkot Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, PPS Unair Surabaya*
- Abdullah, Syukriy, dan Abdul Halim, 2006, *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
- Acemoglu, D. and Robinson, J.A. 2002. The Political Economy of The Kuznets Curve. *Review of Development Economics*, Vol. 6 No. 2: 183-203.
- Adams, R. H. (2003). Economic Growth, Inequality, and Poverty: Finding from A New Data Set. *Policy Research Working Paper 2972*. World Bank. February.
- Adams, Ricahrd H. Jr, 2003. Ecoomic Growth, Inequalitym and Poverty: Finding from a New Data Set. *Policy Research Working Paper #972*. Word Bank. February.
- Adi, P.H. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja pembangunan dan Pendapatan Asli daerah: Studi pada kabupaten dan Kota se Jawa-Bali*. Padang. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 23-26 agustus 2006.
- Adrison, Vid, Martinez-vazquez, J and Nurhalim, Erita, 2012. The Reform of Expenditure Assignments at The Local Level in Indonesia. *International Comprence Alternative Visions for Decentralization in Indonesia*. Borobudur Hotel, Jakarta.
- Aghion, P. and Howitt, P. 1998. Endogenous Growth Theory. MIT Press, Cambridge.
- Agussalaim, 2006. *Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah, pertumbuhan, ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia selama Periode 1976-2003*. Bandung. Disertasi tidak dipublikasikan, PPS universitas Padjajaran.
- Ahmed, J., Devarajan, S., Khemani, S., and S. Shah. 2005. Decentralization and services delivery", *World Bank Policy research Paper 3603*, World

Bank. Washington, D.C.

- Akai, Nobuo and Sakata, Masayo 2005, Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States, *CIRJE Discussion Paper F315*.
- Akai, Nobuo. And Sakata, Masayo. 2002 Fiscal Decentralization Contributtes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section for the aunited States. *Journal of Urban Economics*, LII pp.93-108.
- Akai. Nobuo, Nishimura, Yukihiro and, Masayo, Sakata. 2007. Complementarity, Fiscal Decentralization and Economic Growth. *Economics of Government Heidelberg*: Sep 2007. Vol.8.
- Akita, T. and Lukman, R.J. 1995. Interregional inequalities in Indonesia: a sectoral decomposition analysis for 1975-92", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 31, No. 2, pp. 61-81.
- Albouy, David, 2010, Evaluating the Efficiency and Equity of Federal Fiscalequalization, http://www.bus.umich.edu/ConferenceFiles/MTA XI/Albou_equalization.pdf.
- Alesina, A, and Rodrik, D. 1994. Distributive Politics and Economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 109: 465-490.
- Alexiou Constantinous. 2009. Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE). *Journal of Economic and Social Research* 11(1) : 1-16.
- Alexiou, C. (2009). Government Expenditure and Economic Growth: Econometric Evidence from South Estern Europa (SSE). *Journal of Economic and Social Research*, Vol. 1 (1), 1-16.
- Arjona, R., Ladaique, M, and Pearson, M. 2001. Growth, Inequality and Social Protection. *OECD Labor Market and Social Policy Occasional Papers* No, 51: 80.
- Astuti, Esther dan Haryanto, Joko Tri. 2007. *Studi Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pelayanan Sektor Publik*, Jurnal Ekonomi Indonesia No.1. Juni 2007.
- Badan Pusat Statistik, 2011-2015, *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka*, Banjarmasin

- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), 2011-2015, *Perkembangan Investasi di Provinsi Kalimantan Selatan*
- Bahl, Row W. and McMullen, 2000. *Aturan-aturan Implementasi Desentralisasi Fiskal*. Centre for International Reform and The Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park, March, 2000.
- Bahl, Row W. and Johannes Linn, 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press. New York.
- Barro, Rober J. 2000. Inequality and Growth in Panel Of Countries, *Journal of Economic Growth* 5(1) pp 5-32.
- Barro, R. J. 1990. Government Expenditure in a Simple Model of Endogeneous Growth. *The Journal of Political Economy*, 98(5), 103-125.
- Barro, R. J. 1991. Economic Growth in A Cross-Section of Countries. *Quarterly Journal of Economics* 104: 407-444.
- Barro, R.J and Sala-i-Martin, 2004. *Economic Growth*. 2nd Edition. London. England. *The MIT Press Cambridge, Massachusetts*.
- Barro, Robert J. 1997. *Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study*. Cambridge, Mas: MIT Press.
- Barro. R. J. 2000. Inequality and growth in a panel of countries. *J. Econ. Growth* 5 (1), 87-120.
- Barry, W.Poulson and Jules,G.Kaplan. 2008. State Income Taxes and Economic Growth. *CATO Journal* Vol.28 (Winter 2008).
- Baskaran, Thushyanthan and Lars P. Feld. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is There a Relationship? *CESifo Working Paper No.2721*.
- Behrman J,R, 2003. The Role of Decentralization in Promoting Effective Schooling in Developing Asia. *Asian Development Review*. 20(1)
- Bird, R. 2003. Asymetric Fiscal Decentralization: Glue or Solvent? International Studies Programme. *Georgia State University. Working*

Paper.

- Bird, R. And Vaillacourt, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bonet, J. 2006. Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Colombian experience, *Annals of Regional Science* 40, 661677.
- Bourguignon, Francois, 2004. Poverty-Growth-Inequality Triangle, Paper was presented at the Indian Council for Research on International Economic Realtion, New Delhi, on February 4, from <http://web.worldbank.org>.
- Brata, A.G. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga penelitian Universitas Atamajaya, Yogyakarta.
- Brueckner, J.K. 2006. Fiscal Federalism and Economic Growth. *N Journal of Public Economics*, 90, pp 2107-2120.
- Burtless, G. 2003. Has Widening Inequality Promoted or Retarded US Growth. *Canadian Public Policy*: 185-201.
- Depnaker, 2016, *Data dan Informasi Tenaga Kerja*, <http://www.Depnaker.go.id>.
- Darnanto, T. and Brojonegoro, B.S.P. 2003. *Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Daerah: Analisis Model Ekonomi Makro Simultan*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 4 No.1 Hal 132-144.
- Darumurti, Krishna D, dan Umbu Rauta. 2003. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Pelaksanaan*, Penerbit PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Darwanto dan Yustikasari, Yuli. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Akuntansi X. Unhas. Makassar.
- Davoodi, H.D, Xie and Heng-fu Zou, 1998. Fiscal decentralization and Economic Growth: A cross Country Study, *Journal of Urban Economic*

- Defega, Derrese. 2003 Fiscal Decentralization in Africa: A Review of Ethiopia's Experience. ECA.
- Deininger, K and Squire, L. (1998). New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth. *Journal of Development Economics*, 57 Issue 2: 259-287.
- Deliarnov, 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Desai, R.m, L.M. Freinkma and I. Goldberg. 2005. Fiscal Federalism in Rentier Regions: Evidence from Russia. *Journal of Comparative Economics* 33. pp 814-834.
- Djohanputro, B., 2008. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Dollar, D and Kraay, A. 2001. Trade, Growth, and Poverty. *Policy Research Working Paper*, 2615. Word Bank.
- Dollar, David and Aart Kraay, 2002. Growth is Good for the Poor. *Journal Economic Growth* 7 (3) pp 195-225.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Etharina, 2005, *Disparitas Pendapatan Antardaerah di Indonesia*, *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol 1 No.1 Agustus 2005. MPKP-FE UI, Jakarta
- Darnanto, T. and Brojonegoro, B.S.P. 2003. *Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Daerah: Analisis Model Ekonomi Makro Simultan*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 4 No.1 Hal 132-144.
- Darumurti, Krishna D, dan Umbu Rauta. 2003. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Pelaksanaan*, Penerbit PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Darwanto dan Yustikasari, Yuli. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Akuntansi X. Unhas. Makassar.

- Davoodi, H.D, Xie and Heng-fu Zou, 1998. Fiscal decentralization and Economic Growth: A cross Country Study, *Journal of Urban Economic* 43(2).
- Defega, Derrese. 2003 Fiscal Decentralization in Africa: A Review of Ethiopia's Experience.ECA.
- Deininger, K and Squire, L. (1998). New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth. *Journal of Development Economics*, 57 Issue 2: 259-287.
- Deliarnov, 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Desai, R.m, L.M. Freinkma and I. Goldberg. 2005. Fiscal Federalism in Rentier Regions: Evidence from Russia. *Journal of Comparative Economics* 33. pp 814-834.
- Djohanputro, B., 2008. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, Penerbit PPM, Jakarta
- Dollar, D and Kraay, A. 2001. Trade, Growth, and Poverty. *Policy Research Working Paper*, 2615. Word Bank.
- Dollar, David and Aart Kraay, 2002. Growth is Good for the Poor. *Journal Economic Growth* 7 (3) pp 195-225.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Darnanto, T. and Brojonegoro, B.S.P. 2003. *Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Daerah: Analisis Model Ekonomi Makro Simultan*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 4 No.1 Hal 132-144.
- Darumurti, Krishna D, dan Umbu Rauta. 2003. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Pelaksanaan*, Penerbit PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Darwanto dan Yustikasari, Yuli. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Akuntansi X. Unhas. Makassar.

- Davoodi, H.D, Xie and Heng-fu Zou, 1998. Fiscal decentralization and Economic Growth: A cross Country Study, *Journal of Urban Economic* 43(2)
- Defega, Derrese. 2003 Fiscal Decentralization in Africa: A Review of Ethiopia's Experience.ECA.
- Deininger, K and Squire, L. (1998). New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth. *Journal of Development Economics*, 57 Issue 2: 259-287.
- Deliarnov, 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Desai, R.m, L.M. Freinkma and I. Goldberg. 2005. Fiscal Federalism in Rentier Regions: Evidence from Russia. *Journal of Comparative Economics* 33. pp 814-834.
- Fitriadi, 2008, *Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi terhadap PAD dan Penyerapan TK serta Kesejahteraan Sosek di Prov. Kaltim*, PPS Unair Surabaya.
- Djohanputro, B., 2008. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, Penerbit PPM, Jakarta
- Dollar, D and Kraay, A. 2001. Trade, Growth, and Poverty. *Policy Research Working Paper*, 2615. Word Bank.
- Dollar, David and Aart Kraay, 2002. Grwoth is Good for the Poor. *Journal Enonomic Growth* 7 (3) pp 195-225.
- Dumairy, 1996. Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta. *Gifford, Robert, Environmental Psychology, Principle and Practice, University of Victoria, 1987.*
- Galor, O. and Ziera, J. 1993. Income Distribution and Macroeconomics. *Review of Economic Studies*, 60: 35-52.
- Gruber, Jonathan. 2007. Public Finance and Public Policy. Second Edition. *Worth Publiser*, New york.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics*. 4thEdition. New York: McGraw-Hill Higher Education.

- Hadi, S. 2001. *Studi Dampak Kebijakan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah (Pendekatan Model Analisis Neraca Sosial Ekonomi)*. Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Halim, Abdul, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 2 UPP STEM YKPN Yogyakarta.
- Halim, A. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Hamid, Edy Suwandi, 2003. *Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU)*, Disertasi, UGM (tidak dipublikasi).
- Haq, Mahbub ul, 1995. *Reflections on Human Development*, Oxford University Press, New York.
- Haris, Syamsuddin, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. LIPI Press, Jakarta.
- Hariyanto, Dedy Tri. 2012. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi*, Tesis, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Honzner, M. 2011. Inequality, Growth and Public Spending in Central, East and Southeast Europe. *Working Paper. ECINEQ WP 2011-221*.
- Huang, H., Lin, Y and Yeh, C. (2009). Joint Determinations of Inequality and Growth. *Economics Letters*, 103: 163–166.
- Huang, H., Lin, Y and Yeh, C. The Effect of Growth Volatility on Income Inequality. *Economic Modelling* 45: 212–222.
- Halim, A. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Harun, Mukaramah, Siti Hadijah Che' Mat, Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, 2012, Public eExpenditue expansion and inter-ethnic and rural-urban income disparity, *Procedia Economics and Finance I* (2012)

296-303.

Helpman, E. 2004. *The Mystery of Economic Growth*. Belknap Harvard.

Hill, Hal. 2000. Intra-Country Regional Disparities. Paper for Presentation at the Second Asian Development Forum Singapore, Singapore June 6-8, 2000. [http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Decentr alization/Hill.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Decentr%20alization/Hill.pdf).

Honzner, M. 2011. Inequality, Growth and Public Spending in Central, East and Southeast Europe. *Working Paper. ECINEQ WP 2011-221*.

Imam Mulatif dan Bambang PS Brojonegoro, 2004, *Determinan Pertumbuhan Kota di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. V No. 1 Juli 2004.

ISEI, 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia, Buku 5*, Penerbit Kanisius, Jakarta

Jhingan, ML, 2002, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Press, Jakarta.

Jin, Jin and Hong-fu, Zou. 2005. Fiscal Decentralization, Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China. *Journal of Asian Economics* 16, pp 1047-1064.

Jutting, J., C. Kauffmann, I. McDonnell, H. OsterriEDER, n. Pinaud, and L. Wegner, 2004. Decentralization and Poverty in Developing Countries:

Exploring the Impact. *OECD Development Centre*, Working Paper No. 236. DEV/VOC (2004)05.

Keynes, JM, 1936, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York Harcourt Brace.

Kuncoro, Mundrajat, 2010, *Ekonomika Indonesia*, UPP STIM YPKN, Yogyakarta.

Kuznet, S, 1966, *Toward A Theory of Economic Growth With Reflection on The Economic Growth of Modem Nation*, New York, Norton Publisher

Lang, Jon, *Creating Architectural Theory, The Role of The Behavioral Sciences*

in Environmental Design, Van Nostrand Reinhold Company Inc., 1987.

ISEI, 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia, Buku 5, Penerbit Kanisius, Jakarta.*

Jhingan, ML, 2002, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Press, Jakarta.

Jin, Jin and Hong-fu, Zou. 2005. Fiscal Decentralization, Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China. *Journal of Asian Economics* 16, pp 1047-1064.

Jutting, J., C. Kauffmann, I. McDonnell, H. OsterriedER, n. Pinaud, and L. Wegner, 2004. Decentralization and Poverty in Developing Countries: Exploring the Impact. *OECD Development Centre, Working Paper No. 236. DEV/VOC (2004)05.*

Martinez-Vaquez, and McNab, R., 2003, Fiscal Decentralization, and Economic Growth. *World Development*. Vol.31 No.9 pp 1597-1616.

Martinez-Vaquez, and McNab,R., 2005, Fiscal Decentralization, Macrostability and Growth. International Studies Programme. *Georgia State University. Working Paper 05-06.*

Martinez-Vazquez, J. and R.M. McNab, 2001 Fiscal Decentralization and Economic Growth, Working Paper no. 01-01, International Studies Program, Andrew Young School of Public Studies, *Georgia State University.*

Martinez-Vazquez, Jorge, and Mark Rider, 2005. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Comparative Study of China and India, working paper 05-19, Andrew Young School of Policy Studies, *Georgia State University*

Martin-Vazques, J and Jameson Boex. 2001. The Design of Equalization Grants: Theory and Application Part One: Theory and Concept. World Bank *Institute and Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies*. Atalanta. Georgia.

Meier, Gerald. M. and Josephs E. Stiglitz, 2002. *Frontiers of Development Economics*, Oxford University press, New York

MINEA, Alexandru, 2008, The Role of Public Spending in The growth Theory Evolution, *Romanian Journal of Ecoomic Forecasting-2/2008*. Pp

- Mursinto, D., 2004. *Pengaruh Derajat Deesentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan serta Elastisitas Pendapatan asli Daerah Terhadap kategori Pemerintahan Kabupaten dan Kota pada Awal otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur*. Ringkasan Disertasi, Tidak dipublikasikan, Surabaya, PPS, Universitas airangga.
- Musgrave, R.A and P.B. Musgrave, 1983, *Public Finance in Theory and Practice*, Third Edition, Asian Student Edition, Newyork, *MCGraw-Hill International Book Company*.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, BPFE Yogyakarta
- Noor, Henry Faizal, 2013, *Ekonomi Publik*, Akademia Permata, Padang, Indonesia
- Prebisch, R, 1964, *Toward a New Trade Policy for Development*, United Nations. Pressman, Steven, 2000, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi*, Murai Kencana, IT Radja Gxafindo Persada, Jakarta.
- Rachbini, D.J., 2004, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Edisi pertama, Granit, Jakarta.
- Rostow, WW, 1991, *The Stage Economic*, 3 ed, hal 37-38.
- Safitri, R.I, 2015, *Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan: analisis data provinsi di Indonesia 2010-2013*. *IPB Scientific Repository*, No. 2166.
- Sagir, S, 2010, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sholeh, A, 2015, *Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia*. *Ekombis Review*, Vol. 1 No. 1: 197-209.
- Suhariyanto, K., A. Avenzora, dan Y. Karyono, 2015, *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*, BPS Indonesia Jakarta.
- Sulistiawati, Rini, 2012, *Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat Provinsi di Indonesia*, *PS Ilmu Ekonomi FEB Unair, Surabaya*

- Susanto, H, 2012, *Mengurai Disparitas Pendapatan*, Investor Daily Indonesia, Jakarta
- Tarigan, Robinson, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Todaro, M. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 9. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Wurarah, RN, 2011, *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan TK serta Kesejahteraan Masyarakat di Prov PapuaBarat*, Disertasi, PPS Unair Surabaya.
- Zhang Tao and Heng Fu, Zou, 1998, *Fiscal Desentralization, Public Spending and Economic Growth in China*, Journal of Public Economic, 67 pp 221-240.

INDEKS

- Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM), 196
easy money policy (kebijakan uang longgar), 17
Gross National Income (GNT), 16
Kabupaten Balangan, 12, 22, 24, 26, 27, 91, 117, 118, 119, 120, 138, 139, 143, 146, 171, 172, 193
Kabupaten Banjar, 11, 90, 106, 107, 108, 109, 126, 130, 145, 147, 148, 173
Kabupaten Barito Kuala, 12, 24, 106, 129, 130, 131, 132, 133, 143, 147, 173
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 11, 112, 113, 114, 116
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 12, 24, 114, 115, 116, 117, 141, 147, 171, 173
Kabupaten Hulu Sungai Utara, 22, 92, 120, 121, 122, 138, 141, 147, 170, 171, 173
Kabupaten Kotabaru, 11, 22, 24, 86, 87, 90, 102, 103, 104, 105, 106, 139, 141
Kabupaten Tabalong, 12, 24, 86, 87, 123, 124, 125, 126, 145
Kabupaten Tanah Bumbu, 11, 22, 26, 27, 86, 87, 91, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 139, 193
Kabupaten Tanah Laut, 11, 87, 90, 95, 96, 97, 98, 106, 147, 173
Kabupaten Tapin, 11, 26, 27, 106, 109, 110, 111, 148, 151, 172, 173, 174
Kota Banjarbaru, 12, 26, 86, 90, 91, 106, 126, 127, 128, 129, 143, 171
Kota Banjarmasin, 12, 24, 25, 27, 86, 90, 91, 106, 126, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 145, 151, 170, 172, 174
Kredit Usaha Rakyat (KUR), 196
Penanaman Modal Asing (PMA), 23, 51, 76, 202
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 11, 12, 38, 76, 87, 88, 103, 109, 110, 123, 127, 175
Teori David Ricardo, 41
Teori Ekonomi Klasik dan Modern, 39
Teori pengeluaran publik, 191
Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, 39
Teori *supply* dan *demand* tenaga kerja, 191
Teori Walt Witman Rostow, 42
tight money policy, 18
trickle down effect, 16

RIWAYAT HIDUP PENULIS



M. Ramadhan lahir 8 Desember 1969 di Samarinda, anak keenam dari tujuh bersaudara pasangan dari H.M. Thambrin H. Atin dan Alm. Norjannah, Program S1 ditempuh di STIE Indonesia Banjarmasin Jurusan Akuntansi 1991-1997, S2 Konsentrasi Keuangan Negara & Daerah di FEB ULM Banjarmasin 2010, Program Profesi Akuntan di FEB ULM Banjarmasin 2011, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2020. Karier PNS dimulai dari Staf di Kantor PMD Kota Samarinda 1998, Kasi di Kelurahan Masjid Samarinda Seberang (2000), Kasi di Kelurahan Air Putih Samarinda Ulu (2002), Staf KPKD Pemprov Kalsel 2004, Pemegang Kas KPKD Pemprov Kalsel 2006, Kasi Akuntansi Manajemen RSUD Ulin 2009, Kabag Keuangan RSUD Ansari Saleh 2011, Wadir Administrasi dan Keuangan RSUD Ansari Saleh 2014, Kabag Keuangan RSUD Ulin 2017, Kabid PBKP Dispersip Kalsel 2017, Sekretaris Dispersip Kalsel 2018 s/d sekarang. Dewan Pengawas di beberapa RSUD di Kalsel, Konsultan Keuangan RSUD di beberapa RSUD di Kalsel dan Kalteng, Wakil Ketua IAI Wilayah Kalsel (2021-2024), Wakil Ketua II ISEI Kalsel (2019-2023), Wakil Direktur Keuangan dan Akuntansi RS Sari Mulia (2021 s/d sekarang), Tenaga Pengajar Prodi MM dan S1 Akuntansi STIE Pancasetia Banjarmasin (2021 s/d sekarang), Wakil Direktur Medlawfin Institute (2018 s/d sekarang), Narasumber LPSDM bidang Pengelolaan Keuangan Daerah & RS, Fasilitator BLUD RSUD dan Puskesmas, Anggota Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan PERSI Pusat.